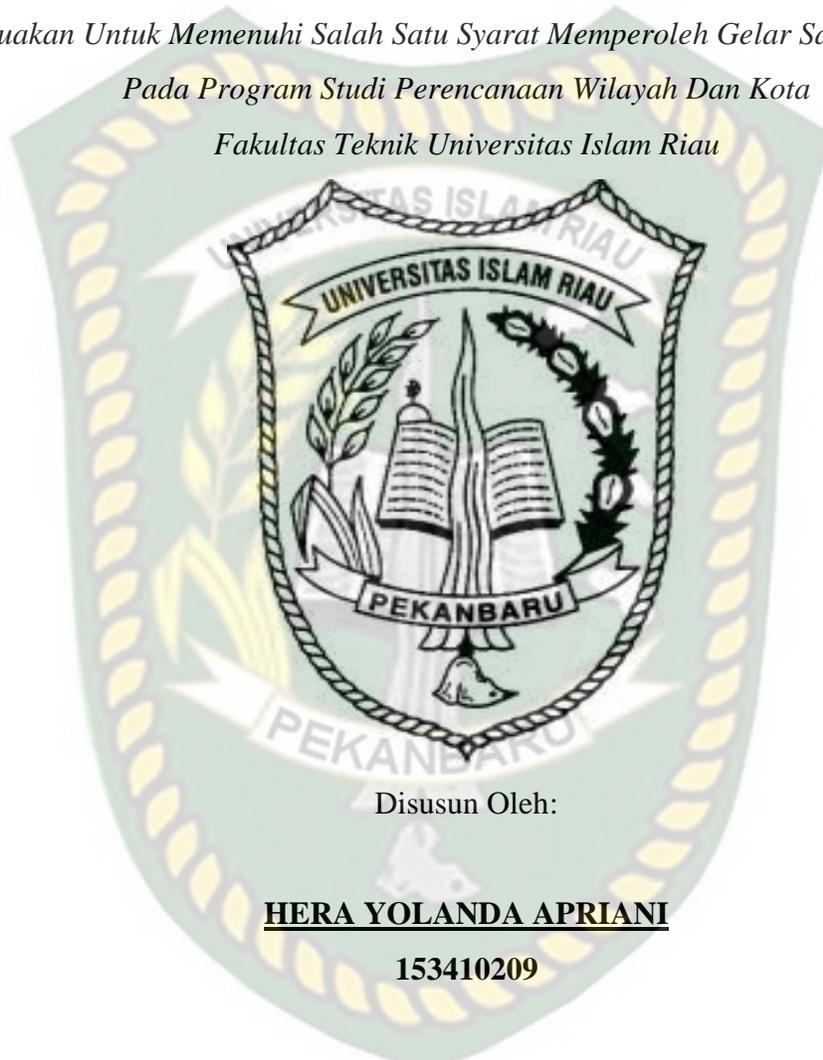


**ANALISIS PENENTUAN PUSAT – PUSAT PERTUMBUHAN  
DI KOTA PEKANBARU**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Teknik  
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota  
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



Disusun Oleh:

**HERA YOLANDA APRIANI**

**153410209**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

2020

## ABSTRAK

### ANALISIS PENENTUAN PUSAT – PUSAT PERTUMBUHAN DI KOTA PEKANBARU

Oleh

Hera Yolanda Apriani

Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai kota transit dan menjadi simpul kegiatan ekonomi di koridor Pulau Sumatera. Namun kenyataannya Kota Pekanbaru belum mampu mengatasi permasalahan yang ada di wilayahnya sendiri. Adanya kesenjangan wilayah antar kecamatan di Kota Pekanbaru yang lebih memusatkan kearah pusat kota tanpa memperhatikan kecamatan di sekitarnya menyebabkan kecamatan yang jauh dari pusat kota sulit untuk berkembang. Untuk itu perlu menetapkan pusat pertumbuhan dengan tujuan untuk mengsejahterahkan masyarakat dan mengurangi terjadinya kesenjangan wilayah antar kecamatan.

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penentuan pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan *analisis scalogram*, *analisis indeks sentralitas marsall* dan *analisis analytical hierarchy process* (AHP) untuk penentuan pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan dan prioritas keputusan stakeholder. Menganalisis interaksi (tingkat keterkaitan) antara pusat pertumbuhan dengan kecamatan disekitarnya menggunakan analisis gravitasi dan analisis titik henti.

Hasil analisis menunjukkan yang menjadi pusat pertumbuhan atau hirarki I (satu) dari 12 (dua belas) kecamatan ialah kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan dengan besaran interaksi tertinggi berada di kecamatan Marpoyan Damai dengan kecamatan Sukajadi. Kecamatan Marpoyan Damai dengan Kecamatan Sukajadi memiliki besaran interaksi sebesar 1559525250. Sedangkan kecamatan yang paling kecil interaksi dengan pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Rumbai dengan besaran interaksi sebesar 30795445,33. Hasil analisis titik henti untuk menentukan batas pengaruh pusat pertumbuhan dengan kecamatan sekitarnya yaitu kecamatan Marpoyan Damai - Sukajadi dengan hasil 1,25 Km dan kecamatan Marpoyan Damai - Rumbai dengan hasil 9,90 Km.

**Kata Kunci :** Pusat – Pusat Pertumbuhan, Hirarki Wilayah, Interaksi, Titik Henti

## ABSTRACT

### ANALYSIS FOR DETERMINING GROWTH CENTER

#### IN THE CITY OF PEKANBARU

By :

Hera Yolanda Apriani

Pekanbaru City is designated as a National Activity Center (PKN) and has a very strategic location as a transit city and is a node of economic activity in the corridor of the Island Of Sumatera. However, in reality the city of Pekanbaru has not been able to solve the problems that exist in its own area. The existence of regional gaps between sub – districts in Pekanbaru city which focused more towards the city center without paying attention to the surrounding sub – districts makes it difficult for sub – districts that are far from the city center to develop. For this reason, it is necessary to establish a growth center with the aim of making the community prosperous and reducing regional disparities between sub – districts.

The purpose of this study is to analyze the determination of growth centers in Pekanbaru City. This research uses *scalogram analysis*, *Marsall centrality index analysis* and *analytical hierarchy process (AHP) analysis* to determine growth centers in Pekanbaru City based on the availability of service facilities and priority decisions of stakeholder. Analyze interactions (level of interrelation) between growth centers and the surrounding sub – districts using gravity analysis and break point analysis.

The results of the analysis show that the center of growth or hierarchy I (one) of 12 (twelve) sub – districts is Marpoyan Damai district. The sub – districts with the highest magnitude of interaction are in the Marpoyan Damai district with the Sukajadi sub – district. Marpoyan Damai Subdistrict and Sukajadi Subdistrict had an interaction magnitude of 1559525250. While the sub – district with the least interaction with the growth center is Rumbai district with an interaction magnitude of 30795445.33. the result of the break pint analysis to determine the limit of the influence of the growth center with the surrounding sub – districts, namely Marpoyan Damai – Sukajadi districts with a result of 1.25 km and Marpoyan Damai – Rumbai districts with a result of 9.90 km.

**Keywords :** Growth Center, Hierarchy Area, Interaction, Break Point

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa Pencipta Alam Semesta yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir dengan judul “*Analisis Penentuan Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru*” untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Sastra 1 (satu) pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Riau.

Melalui pelaksanaan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota untuk menerapkan ilmu perencanaan yang telah diterima selama perkuliahan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Ayahanda dan ibunda serta keluarga yang telah banyak memberi dukungan dan dorongan baik secara moril maupun materil.
2. Bapak Dr.Eng. Muslim, ST., MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Puji Astuti, ST, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dan pembimbing dalam menyelesaikan tugas akhir.

4. Seluruh Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
5. Instansi – instansi di Kota Pekanbaru yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir.
6. Teman – teman Planologi A'15 yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir

Dengan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, menjadi ukuran bagi kesempurnaan tugas akhir ini. Maka kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Demikian dengan selesainya tugas akhir ini, penulis mengharapkan semoga tugas akhir ini berguna dan bermanfaat di kemudian hari.

Pekanbaru, Januari 2020

Hera Yolanda Apriani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Sasaran Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Bagi Akademis .....	7
1.4.2 Bagi Peneliti .....	7
1.4.3 Bagi Pemerintah .....	8
1.5 Ruang Lingkup .....	8
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	8
1.5.2 Ruang Lingkup Materi.....	10
1.6 Kerangka Berfikir .....	11
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Wilayah.....	14

2.1.1	Wilayah Homogen.....	15
2.1.2	Wilayah Nodal.....	15
2.1.3	Wilayah Administratif.....	15
2.1.4	Wilayah Perencanaan.....	16
2.1.5	Tingkatan Wilayah.....	16
2.2	Wilayah Perkotaan.....	17
2.3	Pengembangan Wilayah.....	20
2.3.1	Pengembangan Wilayah Sistem <i>Top Down</i> .....	23
2.3.2	Pengembangan Wilayah Sistem <i>Bottom Up</i> .....	25
2.4	Teori Pusat Pertumbuhan ( <i>Growth Pole Theory</i> ).....	26
2.5	Hirarki Wilayah.....	31
2.5.1	Hirarki Wilayah dan Pusat – Pusat Pelayanan.....	32
2.6	Teori Tempat Sentral.....	34
2.7	Interaksi Antar Wilayah.....	36
2.8	Fasilitas Pelayanan Publik.....	39
2.9	<i>Scalogram</i> .....	43
2.10	<i>Indeks Sentralitas Marsall</i> .....	46
2.11	<i>Analytical Hierarchy Proses (AHP)</i> .....	48
2.11.1	Karakteristik Umum <i>Analytical Hierarchy Process</i> .....	51
2.11.2	Prinsip Dasar <i>Analytical Hierarchy Process</i> .....	54
2.12	Teori Gravitasi.....	58
2.13	Teori Titik Henti.....	60
2.14	Penelitian Terdahulu.....	62

2.15 Sintesa Teori .....	67
--------------------------	----

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Metode Penelitian.....	72
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	75
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	75
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	79
3.5 Bahan dan Alat Penelitian .....	80
3.6 Populasi dan Sampel.....	81
3.7 Teknik Sampling.....	82
3.8 Teknik Analisis.....	84
3.8.1 Identifikasi Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru .....	84
3.8.1.1 Analisis Scalogram .....	84
3.8.1.2 Analisis Indeks Sentralitas Marsall .....	87
3.8.1.3 Analisis Analytical Hierarchy Process .....	89
3.8.2 Menganalisis Interaksi Pusat Pertumbuhan Dengan Kecamatan Disekitarnya.....	98
3.8.2.1 Analisis Gravitasi.....	98
3.8.2.2 Analisis Titik Henti.....	99
3.9 Variabel Penelitian.....	100
3.10 Desain survey .....	103
3.11 Tahapan Penelitian.....	105

## **BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH**

4.1	Sejarah Kota Pekanbaru.....	107
4.2	Letak Geografis Kota Pekanbaru.....	109
4.3	Topografi Kota Pekanbaru.....	113
4.3.1	Ketinggian .....	113
4.3.2	Marfologi.....	113
4.3.3	Kemiringan Lereng.....	115
4.3.4	Klimatologi.....	116
4.3.5	Jenis Tanah .....	117
4.4	Kependudukan Kota Pekanbaru .....	119
4.5	Fasilitas Pendidikan.....	120
4.6	Fasilitas Kesehatan .....	122
4.7	Fasilitas Peribadatan.....	124
4.8	Fasilitas Kelembagaan.....	126
4.9	Fasilitas Ekonomi .....	128
4.10	Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi .....	130
4.11	Fasilitas Ruang terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga .....	132
4.12	Jaringan Jalan .....	134
4.13	Listrik.....	135
4.14	Jaringan Telekomunikasi.....	136
4.15	Kondisi Ekonomi .....	138
4.16	Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru.....	138
4.17	Laju Pertumbuhan Domestik Regional Bruto Kota Pekanbaru.....	139

## **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1	Identifikasi Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru.....	140
5.1.1	Analisis Pusat – Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan.....	140
5.1.1.1	Analisis Scalogram .....	140
5.1.1.2	Analisis Indeks Sentralitas Marsall.....	151
5.1.1.3	Analisis Prioritas Keputusan <i>Stakeholder</i> Dalam Penentuan Lokasi Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru .....	161
5.2	Analisis Besaran Interaksi (Tingkat Keterkaitan) Pusat Pertumbuhan dengan Kecamatan Disekitarnya.....	215
5.2.1	Analisis Gravitasi.....	215
5.2.2	Analisis Titik Henti.....	218

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1	Kesimpulan.....	221
6.2	Saran .....	223

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Penentuan Fasilitas Pelayanan Publik Lingkungan Permukiman .....	42
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	62
Tabel 2.3	Sintesa Teori.....	67
Tabel 3.2	Data Primer .....	77
Tabel 3.3	Data Sekunder .....	78
Tabel 3.4	<i>Stakeholder</i> Dalam AHP .....	83
Tabel 3.5	Tata Urutan Pembuatan <i>Scalogram</i> .....	86
Tabel 3.6	Penentuan Bobot Fungsi Layanan.....	88
Tabel 3.7	Penentuan <i>Indeks Sentralitas Marsall</i> dan Hirarki Wilayah.....	89
Tabel 3.8	Contoh Formula <i>Matriks Pair – Wise Comparison</i> .....	93
Tabel 3.9	Nilai Prioritas AHP .....	94
Tabel 3.10	Nilai Random Indeks.....	96
Tabel 3.11	Variabel Penelitian .....	101
Tabel 3.12	Desain Survey .....	104
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan .....	110
Tabel 4.2	Jarak Kecamatan Menuju Ibukota.....	111
Tabel 4.3	Luas Kemiringan Lereng Kota Pekanbaru .....	116
Tabel 4.4	Banyak Curah Hujan .....	116
Tabel 4.5	Grup Fisiografi Tandah Dan Satuan Lahan.....	118
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, Kepadatan dan Rasio.....	119
Tabel 4.7	Jumlah Fasilitas Pendidikan .....	120

Tabel 4.8	Jumlah Fasilitas Kesehatan .....	122
Tabel 4.9	Jumlah Fasilitas Peribadatan .....	124
Tabel 4.10	Jumlah Fasilitas Kelembagaan .....	126
Tabel 4.11	Jumlah Fasilitas Ekonomi .....	128
Tabel 4.12	Jumlah Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi .....	130
Tabel 4.13	Jumlah Fasilitas Ruang Terbuka,Taman dan Lapangan Olahraga	132
Tabel 4.14	Jalan Di Kota Pekanbaru .....	134
Tabel 4.15	Keadaan Jalan dan Kondisi Jalan .....	134
Tabel 4.16	Jaringan Listrik.....	135
Tabel 4.17	Jumlah BTS .....	137
Tabel 4.18	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha .....	138
Tabel 4.19	Laju Pertumbuhan PDRB.....	139
Tabel 5.1	Jumlah Fasilitas Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru.....	142
Tabel 5.2	<i>Analisis Scalogram</i> Berdasarkan Fasilitas Pelayanan Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru .....	144
Tabel 5.3	<i>Analisis Scalogram</i> Berdasarkan Fasilitas Pelayanan Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru (Lanjutan).....	146
Tabel 5.4	Penentuan Pembobotan Fungsi Fasilitas Pelayanan Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru .....	152
Tabel 5.5	Penentuan Indeks Sentralitas Marsall dan Hirarki Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru .....	155
Tabel 5.6	Penentuan Hirarki Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru .....	157

Tabel 5.7	Responden (Stakeholder Ahli) Dalam Kuesioner AHP .....	164
Tabel 5.8	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat I .....	165
Tabel 5.9	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat II .....	166
Tabel 5.10	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat I .....	170
Tabel 5.11	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat II .....	171
Tabel 5.12	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat I .....	175
Tabel 5.13	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat II .....	176
Tabel 5.14	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat I .....	181
Tabel 5.15	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat II .....	181
Tabel 5.16	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat I .....	185
Tabel 5.17	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat II .....	186
Tabel 5.18	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat I .....	190
Tabel 5.19	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat II .....	191
Tabel 5.20	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat I .....	195
Tabel 5.21	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat II .....	196
Tabel 5.22	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat I .....	200
Tabel 5.23	Nilai Prioritas Kriteria Tingkat II .....	201
Tabel 5.24	Hasil Analisis Gravitasi .....	216
Tabel 5.25	Hasil Analisis Titik Henti .....	219

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kota Pekanbaru.....	9
Gambar 1.2	Kerangka Fikir.....	11
Gambar 3.1	Pohon Analytical Hierarchy Process.....	92
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kota Pekanbaru.....	112
Gambar 4.2	Grafik Fasilitas Pendidikan.....	121
Gambar 4.3	Fasilitas Pendidikan.....	121
Gambar 4.4	Grafik Fasilitas Kesehatan.....	123
Gambar 4.5	Fasilitas Kesehatan.....	123
Gambar 4.6	Grafik Fasilitas Peribadatan.....	125
Gambar 4.7	Fasilitas Peribadatan.....	125
Gambar 4.8	Grafik Fasilitas Kelembagaan.....	127
Gambar 4.9	Fasilitas Kelembagaan.....	127
Gambar 4.10	Grafik Fasilitas Ekonomi.....	129
Gambar4.11	Fasilitas Ekonomi.....	129
Gambar 4.12	Grafik Kebudayaan dan Rekreasi.....	131
Gambar 4.13	Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi.....	131
Gambar 4.14	Grafik Fasilitas Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga.....	133
Gambar 4.15	Fasilitas Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga.....	133
Gambar 4.16	Jalan.....	135
Gambar 4.17	Listrik.....	136

Gambar 4.18	BTS.....	137
Gambar 5.1	Peta Klasifikasi Hirarki Berdasarkan <i>Analisis Scalogram</i> .....	150
Gambar 5.2	Grafik Hirarki Wilayah.....	157
Gambar 5.3	Peta Klasifikasi Hirarki Wilayah Berdasarkan Analisis <i>Indeks Sentralitas Marsall</i> .....	160
Gambar 5.4	Pohon <i>Analytical Hierarchy Process</i> .....	162
Gambar 5.5	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat I .....	167
Gambar 5.6	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi....	167
Gambar 5.7	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi.....	168
Gambar 5.8	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan ...	169
Gambar 5.9	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan ....	169
Gambar 5.10	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat I .....	172
Gambar 5.11	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi....	172
Gambar 5.12	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi.....	173
Gambar 5.13	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan ...	174
Gambar 5.14	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan ....	174
Gambar 5.15	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat I .....	177
Gambar 5.16	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi....	178
Gambar 5.17	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi.....	178
Gambar 5.18	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan ...	179
Gambar 5.19	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan ....	180
Gambar 5.20	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat I .....	182
Gambar 5.21	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi....	183

Gambar 5.22	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi.....	183
Gambar 5.23	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan ...	184
Gambar 5.24	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan ....	184
Gambar 5.25	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat I .....	187
Gambar 5.26	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi....	187
Gambar 5.27	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi.....	188
Gambar 5.28	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan ...	189
Gambar 5.29	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan ....	189
Gambar 5.30	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat I .....	192
Gambar 5.31	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi....	192
Gambar 5.32	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi.....	193
Gambar 5.33	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan ...	194
Gambar 5.34	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan ....	194
Gambar 5.35	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat I .....	197
Gambar 5.36	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi....	197
Gambar 5.37	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi.....	198
Gambar 5.38	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan ...	199
Gambar 5.39	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan ....	199
Gambar 5.40	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat I Seluruh Responden .....	202
Gambar 5.41	Grafik Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat I Seluruh Responden.....	203
Gambar 5.42	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi Seluruh Responden.....	203

Gambar 5.43	Grafik Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi Seluruh Responden .....	204
Gambar 5.44	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi Seluruh Responden.....	205
Gambar 5.45	Grafik Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi Seluruh Responden .....	205
Gambar 5.46	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan Seluruh Responden.....	206
Gambar 5.47	Grafik Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan Seluruh Responden.....	207
Gambar 5.48	Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan Seluruh Responden.....	207
Gambar5.49	Grafik Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan Seluruh Responden .....	208
Gambar 5.50	Peta Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Analisis AHP .....	209
Gambar 5.51	Reparasi Mobil .....	210
Gambar 5.52	Bandara Sultan Syarif Kasim II.....	211
Gambar 5.53	Pertanian.....	212
Gambar 5.54	Perdagangan dan Jasa .....	212
Gambar 5.55	Industri Besar.....	213
Gambar 5.56	Gor Gelanggang Remaja .....	213
Gambar 5.57	Peta Kondisi Eksisting Pusat – Pusat Pertumbuhan.....	214
Gambar 5.58	Peta Besaran Interaksi Analisis Gravitasi.....	217

Gambar 5.59 Peta Hasil Analisis Titik Henti..... 220



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada batasan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, struktur ruang adalah susunan pusat – pusat permukiman dari sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang berupa pusat hirarki yang berfungsi sebagai pengarah dan pembentuk suatu wilayah dan sangat dipengaruhi oleh keberadaan distribusi penduduk, infrastruktur, berpengaruh dalam membangkitkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dan pusat - pusat kegiatan masyarakat dalam struktur ruang yang dibentuk oleh aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat perkotaan.

Untuk mewujudkan struktur ruang yang mencakup fungsi pelayanan internal perkotaan dan eksternal wilayah sekitarnya, perlu dirumuskan prinsip - prinsip umum pengelolaan perkotaan sehingga dapat membantu penyusunan pusat - pusat pertumbuhan baru. Pengembangan wilayah terhadap pusat pertumbuhan akan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan dampak terhadap pembangunan wilayah disekitarnya. Pusat pertumbuhan dapat memberikan efek sebar (*spread effect*) dari daerah yang menjadi pusat pertumbuhan dengan daerah disekitarnya dengan harapan wilayah dapat tumbuh dan berkembang (Tarigan, 2004).

Konsep pusat – pusat pertumbuhan dilandasi dari konsep ruang ekonomi (*economic space*) menurut Perroux dalam Muta'ali (2015). Pusat Pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah dalam waktu bersamaan. Pusat Pertumbuhan akan muncul pada kutub – kutub pertumbuhan dengan waktu yang berbeda dan dengan akibat yang berbeda pula.

Menurut Perroux dalam Muta'ali (2015) Pusat pertumbuhan mempunyai dua arti yang berbeda. Pusat pertumbuhan Fungsional dapat diartikan sebagai suatu lokasi dengan konsentrasi berbagai kelompok usaha. Pusat pertumbuhan mempunyai unsur – unsur kedinamisan sehingga memberikan efek terhadap kehidupan ekonomi baik dari dalam ataupun memberikan dampak keluar. Secara geografis pusat pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas. Pusat pertumbuhan menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai usaha tertarik untuk membuka peluang usaha di daerah yang menjadi pusat pertumbuhan dan masyarakat juga dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038. Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN). Kota Pekanbaru memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai kota transit yang menghubungkan kota - kota utama di pulau Sumatera, dan menjadi simpul kegiatan ekonomi di koridor timur Sumatera. Kota Pekanbaru berkembang pesat dari tahun ke tahun dilihat dari tingginya pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya yang ada di dalamnya (RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2013 – 2033).

Semakin berkembangnya Kota Pekanbaru dan meningkatnya jumlah penduduk, perlu untuk melakukan pengembangan wilayah dengan menetapkan pusat pertumbuhan baru. Tujuannya adalah untuk mensejahterahkan masyarakat dengan cara meningkatkan pertumbuhan wilayah di sekitaran wilayah yang terkena dampak terhadap kesenjangan wilayah, sehingga tercipta keseimbangan lingkungan bagi seluruh masyarakat. Namun pada kenyataannya masih terjadi kesenjangan antar wilayah di berbagai kecamatan di Kota Pekanbaru.

Kesenjangan antar wilayah di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari pembangunan yang lebih memusatkan kearah pusat kota tanpa memperhatikan pembangunan wilayah disekitarnya. Penyebaran penduduk relatif dipengaruhi oleh kecenderungan penduduk terkonsentrasi pada tempat dimana akses terhadap fasilitas pelayanan kota dengan biaya transportasi yang rendah merupakan pilihan utama penduduk dalam menentukan tempat tinggal. Dalam hal ini, rendahnya nilai lahan tidak akan banyak memberikan daya tarik yang dapat mempengaruhi minat penduduk untuk bertempat tinggal di lokasi -lokasi yang relatif masih kosong, namun memiliki tingkat fasilitas pelayanan prasarana dan sarana kota yang rendah (RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2013 - 2033).

Kota Pekanbaru masih dipengaruhi oleh gaya sentralitas yang memusatkan pembangunan pada suatu wilayah yang menyebabkan wilayah lain terabaikan proses pembangunannya. Kesenjangan antar wilayah di Kota Pekanbaru dapat dilihat Wilayah Kota Sebelah Utara Sungai Siak dan Kecamatan yang berada di pinggiran Kota Pekanbaru yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat di pinggiran Kota Pekanbaru dan wilayah yang Kota sebelah utara sungai Siakmasih rendah, kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan belum memadai dan pembangunan yang tidak merata menyebabkan pergerakan dari beberapa kabupaten lebih mengarah ke wilayah pusat kota. Pembangunan hanya difokuskan pada wilayah tertentu menyebabkan wilayah lain sulit berkembang dan kesenjangan antar wilayah di Kecamatan Kota Pekanbaru jelas terlihat, terutama wilayah yang berada di bagian utara dan kecamatan yang berada di kawasan pinggir Kota Pekanbaru.

Untuk mengurangi permasalahan pada wilayah yang berada di pinggiran Kota Pekanbaru dan di bagian Utara Kota Pekanbaru maka strategi yang digunakan untuk mengurangi terjadinya permasalahan di wilayah tersebut yaitu dengan mengembangkan wilayah tertentu menjadi pusat pertumbuhan secara menyebar dengan menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi (Rustiadi, 2009).

Penentuan pusat pertumbuhan akan mendorong pemerataan fasilitas pelayanan di setiap Kecamatan Kota Pekanbaru dan akan memberikan peluang untuk mampu memberikan pelayanan serta menyebarkan efek yang menguntungkan bagi wilayah di sekitarnya dan mereduksi kemungkinan dampak atau pengaruh negatif yang akan ditimbulkan sehingga tercipta keseimbangan lingkungan yang nyaman bagi manusia dan makhluk hidup lain yang termasuk didalamnya. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Penentuan Pusat - Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kota Pekanbaru merupakan kota yang telah berkembang dengan kemajuan pembangunannya. Kota Pekanbaru memiliki dana perimbangan yang cukup tinggi yaitu sebesar Rp 1.277.237.744,50 untuk mendanai kebutuhan desentralisasi. Namun pada kenyataannya dana tersebut masih belum mampu menekan permasalahan terhadap pertumbuhan kota dan perkembangan wilayah yang terjadi di Kota Pekanbaru. Berdasarkan data hasil survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS), penduduk di Kota Pekanbaru yang belum bekerja atau pengangguran sebanyak 45.469 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kota Pekanbaru sebanyak 31.618 jiwa dengan jumlah garis kemiskinan sebesar Rp 499.852 (BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2019).

Terkonsentrasinya pembangunan dan penyediaan fasilitas pelayanan hanya terpusat kepada wilayah yang menjadi pusat kota menyebabkan Wilayah Kota Sebelah Utara Sungai Siak dan kecamatan yang berada di pinggiran Kota Pekanbaru yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Pelalawan sulit berkembang. Sistem pergerakan internal serta interaksi wilayah di beberapa Kecamatan Kota Pekanbaru hanya terpusat kepada wilayah yang memiliki kelengkapan fasilitas pelayanan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekanbaru tahun 2013 - 2033, Kebijakan dan Strategi Struktur Ruang Kota Pekanbaru adalah pemantapan pusat kegiatan sesuai dengan fungsinya, berhirarki serta merata. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana umum dan pengembangan sistem jaringan jalan dan transportasi untuk memperlancar

sistem pergerakan internal maupun untuk mendukung interaksi dengan wilayah sekitar. Untuk menciptakan struktur pelayanan yang merata kepada seluruh penduduk di Kota Pekanbaru melalui distribusi fasilitas dan prasarana dengan arah skenario pengembangan kota diperlukan identifikasi di setiap kecamatan Kota Pekanbaru, dengan tujuan memberikan efek sebar yang menguntungkan pada daerah belakangnya atau *hinterland* dan mengurangi permasalahan yang sama akan terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dari rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti dan diamati dalam penelitian sebagai berikut:

1. Dimanakah lokasi pusat - pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan dan prioritas keputusan *stakeholder*?
2. Bagaimana interaksi (tingkat keterkaitan) antara pusat pertumbuhan (*Growth Centre*) dengan kecamatan disekitarnya ?

### **1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah Menganalisis Penentuan Pusat - Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru. Adapun wilayah yang mencakup dalam penelitian ini adalah Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Lima Puluh,

Kecamatan Sail, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

### **1.3.2 Sasaran Penelitian**

Berdasarkan tujuan tersebut adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi lokasi pusat - pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan dan prioritas keputusan *stakeholder*.
2. Menganalisis interaksi (tingkat keterkaitan) antara pusat pertumbuhan (*Growth Centre*) dengan kecamatan disekitarnya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Akademis**

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktikal terhadap ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota dalam mengetahui Pusat - Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru. Selain itu penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan dasar acuan serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Bagi Peneliti**

Penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan serta untuk mengetahui Pusat - Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru.

### 1.4.3 Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengembangkan wilayah dan guna mengurangi ketimpangan wilayah di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru.

## 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang digunakan dalam studi ini meliputi ruang lingkup ruang lingkup materi penelitian dan ruang lingkup wilayah. Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi materi pembahasan.

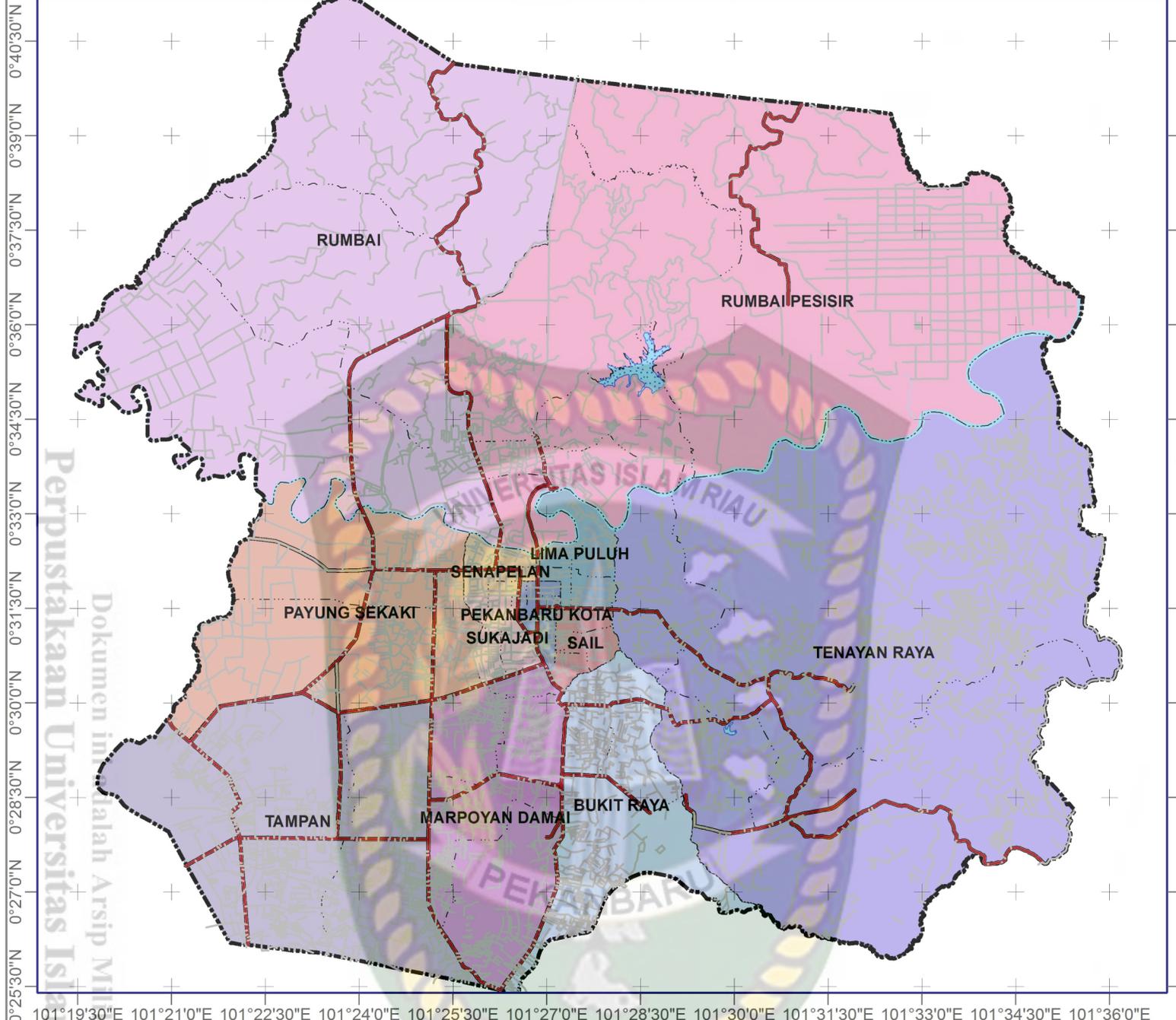
### 1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah  $\pm 632,26$  Km<sup>2</sup>. Kota Pekanbaru terletak antara :  $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$  Lintang Utara. Adapun batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Adapun Wilayah Administrasi Kota Pekanbaru dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :

101°19'30"E 101°21'0"E 101°22'30"E 101°24'0"E 101°25'30"E 101°27'0"E 101°28'30"E 101°30'0"E 101°31'30"E 101°33'0"E 101°34'30"E 101°36'0"E

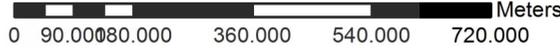




**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS TEKNIK**



**SKALA**  
**1:170.000**



**INSET PETA**



LEGENDA		KECAMATAN			
	Batas Kabupaten Kota		BUKIT RAYA		TAMPAN
	Batas Kecamatan		LIMA PULUH		TENAYAN RAYA
	Batas Kelurahan		MARPOYAN DAMAI		PAYUNG SEKAKI
	Jalan Arteri		PEKANBARU KOTA		RUMBAI
	Jalan Kolektor		RUMBAI PESISIR		SAIL
	Jalan Lokal Edit		SENAPELAN		SUKAJADI
	Sungai				
	Air Danau				

**Dosen Pembimbing**  
**PUJI ASTUTI, ST.,MT**

Nama : Hera Yolanda Apriani  
 NPM : 153410209

Sumber :  
 RTRW KOTA PEKANBARU

**No. Gambar**  
 1.1

**PETA ADMINISTRASI KOTA PEKANBARU**

**Halaman**  
 9

Perustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip MIPA

Gambar 1.1 Peta ADM kota pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

### 1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup penelitian Analisis Penentuan Pusat - Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru menggambarkan atau melukiskan fenomena yang diteliti secara sistematis, faktual, dan akurat. Analisis Pusat - Pusat Pertumbuhan difokuskan di 12 (Dua Belas) kecamatan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Ruang lingkup materi dalam penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan untuk menentukan pusat - pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru sesuai dengan Kebijakan Dan Strategi Struktur Ruang Kota Pekanbaru Tahun 2013 - 2033 tentang pemantapan pusat kegiatan sesuai dengan fungsinya, berhirarki secara merata, peningkatan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana umum dan pengembangan sistem jaringan jalan dan transportasi untuk memperlancar sistem pergerakan internal maupun untuk mendukung interaksi dengan wilayah disekitarnya, dengan fokus kajiannya berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan, potensi ekonomi, potensi lingkungan, jarak antar kecamatan dan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru
2. Penelitian ini menentukan kecenderungan arah dan besaran interaksi pusat – pusat pertumbuhan dengan kecamatan disekitarnya dengan menentukan besaran pergerakan penduduk dalam pengembangan daerah yang jauh dari pusat utamanya.

### 1.6 Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran dijelaskan pada bagan yang terdapat dibawah ini :



**Gambar 1.2**  
**Kerangka Berfikir**  
 Sumber : Hasil Analisis,2020

## 1.7 Sistematika Penulisan

Gambaran tentang sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang secara singkat sebagai dasar penelitian ini dilakukan. Selain itu pada bab ini akan membahas hal yang mencakup rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup yakni ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, kerangka berfikir dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang kumpulan teori yang berkaitan dengan penelitian yang meliputi Analisis Penentuan Pusat - Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, analisis yang digunakan serta metode yang digunakan dalam Analisis Penentuan Pusat - Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

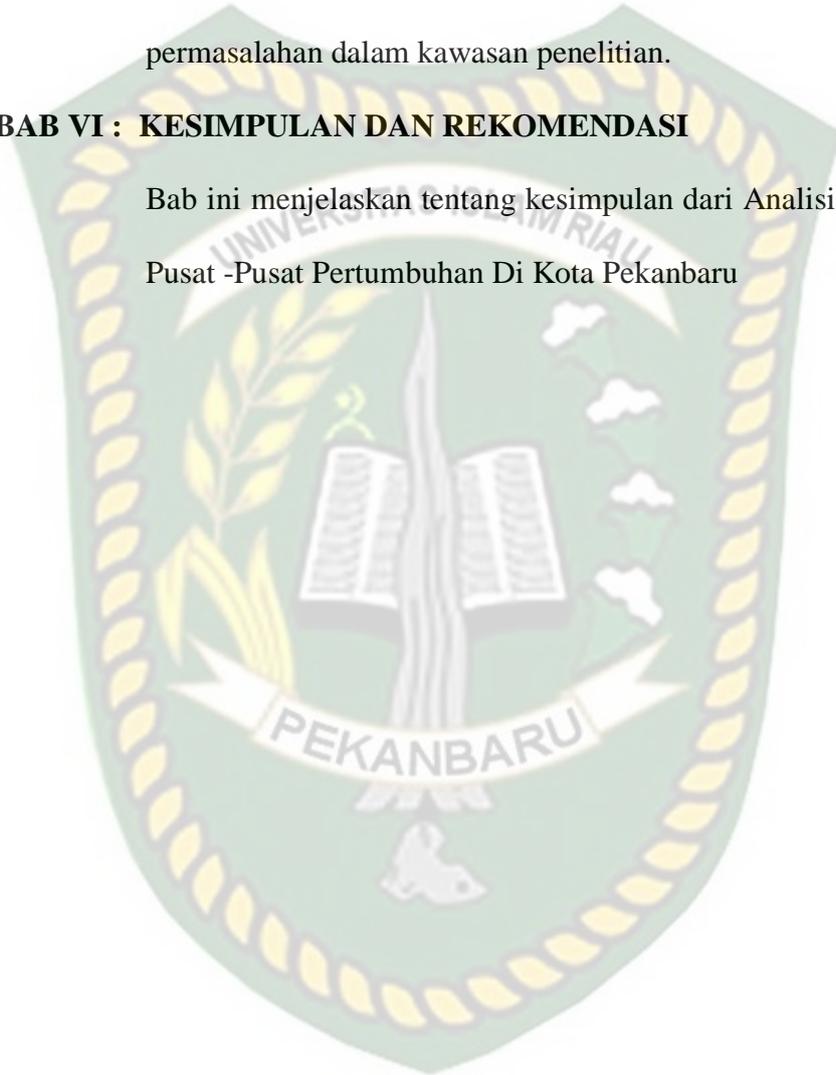
Bab ini menyajikan deskripsi atau gambaran umum wilayah penelitian yaitu Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan Analisis Penentuan Pusat - Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru

## **BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan Analisis Penentuan Pusat - Pusat Pertumbuhan Kota Pekanbaru berdasarkan potensi dan permasalahan dalam kawasan penelitian.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari Analisis Penentuan Pusat -Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Wilayah

Pengertian wilayah secara umum adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan perwatakan fisik - geografis. Wilayah juga dapat diartikan secara umum sebagai “daerah” yang mempunyai batas, yaitu berupa satu negara, satu atau beberapa provinsi, satu atau beberapa kabupaten dan satu atau beberapa kota. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan. Wilayah memiliki defenisi secara konseptual sebagai berikut (Pontoh,& Kustiwan, 2008) :

1. Wilayah Homogen
2. Wilayah Nodal
3. Wilayah Administratif
4. Wilayah Perencanaan

### **2.1.1 Wilayah Homogen**

Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek atau kriteria mempunyai sifat - sifat atau ciri - ciri yang relatif sama. Sifat - sifat dan ciri - ciri homogenitas itu misalnya dalam hal ekonomi (seperti wilayah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen, tingkat pendapatan rendah atau miskin, dan lainnya), geografi (seperti wilayah yang mempunyai topografi atau iklim yang sama), agama, suku dan sebagainya. Wilayah homogen dibatasi berdasarkan keseragamannya secara internal (*internal uniformity*).

### **2.1.2 Wilayah Nodal**

Wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan wilayah belakangnya (*hinterland*). Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi.

### **2.1.3 Wilayah Administratif**

Wilayah administratif adalah wilayah yang batas – batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan. Khusus untuk wilayah administratif provinsi dan kabupaten atau kota, dalam peraturan perundang - undangan di negara kita sebagai daerah otonom. Wilayah administrasi mempunyai mempunyai defenisi yang didasarkan berdasarakan dua faktor, yaitu (Pontoh, & Kustiawan, 2008) :

1. Pemerintah mempunyai peran penting terhadap kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah sehingga diharapkan pembangunan wilayah didasarkan kepada pedoman wilayah yang sudah ditetapkan.
2. Wilayah harus ditentukan batas administrasi dengan tujuan pengumpulan data di bagian wilayah sudah berlandaskan satuan administrasi wilayah.

#### **2.1.4 Wilayah Perencanaan**

Wilayah perencanaan adalah wilayah yang batasannya didasarkan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan. Wilayah ini memperlihatkan kesatuan keputusan - keputusan ekonomi.

#### **2.1.5 Tingkatan Wilayah**

Tingkatan wilayah terdiri dari 3 (tiga) yaitu wilayah makro, wilayah meso dan wilayah mikro.

1. Wilayah Makro : Wilayah Sumatera, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, dan lain – lain.
2. Wilayah Meso : Provinsi
3. Wilayah Mikro : Kota/Kabupaten, Kecamatan, Desa

## 2.2 Wilayah Perkotaan

Kota “kota” (*city*) menunjukkan kata benda, sedangkan kata “perkotaan” (*urban*) mencerminkan sifat. Meskipun dua kata tersebut berbeda, kadang dipakai sebagai sinonim, misalnya dalam pengertian *city planning* dan *urban planning*. Dalam praktek, kata kota dalam arti *municipality* dipakai untuk tempat dengan batas yurisdiksi administratif (pemerintah kota), sedangkan kata perkotaan (*urban*) menunjukkan tempat kumpulan permukiman yang terkonsentrasi, relatif padat dan memerlukan infrastruktur yang lebih intensif daripada di pedesaan (Djunaedi, 2012).

Kawasan perkotaan menurut Undang - Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang adalah Kota memiliki kegiatan perekonomian yang bukan dari sektor pertanian dan kota mempunyai fungsi sebagai kawasan yang menjadi tempat bermukimnya penduduk di wilayah tersebut dan menjadi pusat kegiatan ekonomi, pelayanan sosial, kantor pemerintahan dan distribusi barang dan jasa. Kota ditinjau berdasarkan 7 (tujuh) aspek, yaitu (Pontoh, & Kustiawan, 2008):

1. Fisik

Suatu wilayah dengan wilayah terbangun (*build up area*) lebih padat dibandingkan dengan area sekitarnya.

2. Demografis

Wilayah dengan konsentrasi dari jumlah penduduk yang relatif tinggi dan padat dibandingkan wilayah yang berada diluar dari kawasan perkotaan.

3. Sosial

Wilayah dengan sifat masyarakat yang heterogen, seperti tradisional dan modern, formal dan informal, maju dan terbelakang.

4. Geografis

Wilayah dengan konsentrasi penduduk terpadat terhadap wilayah dengan insensitas bangunan yang cukup padat.

5. Statistik

Wilayah dinilai dari jumlah penduduk dan dari ukuran untuk kriteria kota.

6. Ekonomi

Pekerjaan wilayah perkotaan bukan dari sektor pertanian. Pekerjaan didominasi dari perdagangan, perindustrian, pelayanan jasa dan lainnya.

7. Administrasi

Wilayah perkotaan pasti dibatasi atas kewenangan pemerintah daerah yang sudah ditetapkan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa dari 7 (tujuh) aspek tersebut., Kota mempunyai defenisi sebagai wilayah yang memiliki sifat masyarakat yang heterogen, jumlah penduduk yang tinggi dan penduduk tinggal di wilayah yang memiliki fasilitas pelayanan yang lengkap, seperti fasilitas ekonomi, fasilitas perdagangan, fasilitas peribadatan, fasilitas perkantoran dan lainnya. Kawasan perkotaan mempunyai wilayah yang dipengaruhi dari wilayah diluar batas kawasan administrasi. Wilayah yang menjadi wilayah diluar batas administrasi adalah wilayah yang menjadi kawasan pinggiran kota tersebut atau sering disebut sebagai wilayah sub – urban.

Kawasan perkotaan juga mempunyai defenisi yang dilihat dari status kawasan perkotaan. Berikut defenisi kawasan perkotaan berdasarkan statusnya (Pontoh, & Kustiawan, 2008) :

1. Kawasan perkotaan mempunyai status sebagai wilayah yang menjadi administrasi dari daerah kota tersebut.
2. Kawasan perkotaan merupakan wilayah yang menjadi bagian dari daerah kabupaten
3. Kawasan pedesaan yang melakukan pembangunan mengikuti konsep kawasan perkotaan. Kawasan pedesaan akan mengubah statusnya menjadi kawasan perkotaan baru.
4. Kawasan perkotaan bisa dikategorikan sebagai wilayah perkotaan karena mempunyai dua wilayah atau lebih dengan syarat daerah tersebut saling berbatasan.

### 2.3 Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah mempunyai tujuan untuk melihat kekuatan dan kelemahan terhadap peluang dan tantangan terhadap potensi yang ada pada suatu wilayah. Sehingga wilayah tersebut bisa meningkatkan kebutuhan pada wilayah baik secara internal maupun eksternal dengan melihat sumber potensi yang tersedia seiring dengan perkembangan waktu. Pendekatan pengembangan wilayah yang diterapkan di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model pengembangan wilayah serta tatanan sosial - ekonomi, sistem pemerintah dan administrasi pembangunan (Direktorat Jendral Penataan Ruang, 2013).

Pada umumnya pengembangan wilayah mengacu kepada perubahan produktifitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Selain itu defenisi ekonomi, pengembangan wilayah mengacu pada pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Pengembangan wilayah lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang. Dalam hal ini pengembangan wilayah tidak berkaian dengan eksploitasi wilayah.

Menurut Adisasmita dalam Rahayu (2014) perkembangan wilayah merupakan upaya untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan cara memanfaatkan potensi yang tersedia pada wilayah tersebut. Potensi tersebut dapat dilihat dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, kelembagaan dan prasarana fisik. Pengembangan wilayah yang baik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Adisasmita dalam Rahayu, 2014) :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah disekitarnya dengan tujuan mampu meningkatkan pemerataan pada wilayah inti.
2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi terjadinya permasalahan seperti kemiskinan, dan pengangguran.
3. Memperkuat struktur ekonomi dengan melihat potensi ekonomi seperti dari hasil sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dari wilayah tersebut.

Untuk mengurangi permasalahan yang terus menerus pada suatu wilayah, diperlukan mengikuti prinsip – prinsip dasar dalam pengembangan wilayah. Prinsip dasar terhadap pengembangan wilayah terdiri dari 2 (dua) prinsip. Prinsip pengembangan wilayah sebagai berikut (Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang dalam Rahayu, 2014) :

1. Pengembangan wilayah harus memperhatikan sebaran atau pengaruh (*spread effect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.

2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.
3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah - daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesejahteraan.
4. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

Pada dasarnya komponen utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah adalah kemajuan ekonomi wilayah bersangkutan. Didalam islam pengembangan wilayah juga dibahas didalam alquran Surah Al – Furqan. Adapun landasan – landasan dari ayat al-qur'an tentang pengembangan wilayah terdapat pada Surah Al-Furqan ayat 48 dan 49.

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنْ  
مَاءٍ طَهُورًا

Artinya :

Dan dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan), dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih (QS.Al-Furqan:48)

لُنْحِي بِهِ لُدَّةً مَيِّتًا وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسِي كَثِيرًا

Artinya :

Agar (dengan air itu) kami menghidupkan negeri yang mati (tandus), dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, (berupa) hewan – hewan ternak dan manusia yang banyak. (QS.Al-Furqan:49)

Penjelasan dari Surah Al - Furqan ayat 48 – 49 adalah bahwa manusia haruslah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga kita rawat dan kita lestarikan agar kelak nanti anak, cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikan-Nya. Serta dalam merencanakan pembangunan tata ruang harus memperhatikan seluruh lapisan masyarakat tanpa merugikan masyarakat lainnya, berharap pembangunan dan pengembangan wilayah menuju *Bottom up Top down* yaitu perkembangan wilayah mengarah kepada masyarakat lapisan bawah.

### 2.3.1 Pengembangan Wilayah Sistem *Top - Down*

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sistem *Top - Down* menganut kepada tiga konsep pengembangan kawasan. Konsep pertama yaitu konsep kutub pertumbuhan atau sering disebut sebagai Growth pole. Konsep pengembangan pada suatu kawasan yang kedua yaitu konsep integrasi atau keterpaduan antara

sistem fungsional ataupun sistem secara fungsional. Sistem *top down* yang ketiga dari konsep ini yaitu konsep yang melihat pendekatan secara *desentralized territorial*.

Indonesia konsep yang digunakan didalam sistem top down diatas yaitu konsep kutub pertumbuhan. Konsep kutub pertumbuhan lebih menekankan terhadap investasi masif terhadap industri yang memiliki modal yang padat dengan wilayah yang berada di pusat – pusat urban. Contoh Wilayah di Indonesia yaitu di daerah jawa. Jawa merupakan wilayah dengan insensitas tenaga kerja yang cukup banyak. Banyaknya jumlah tenaga kerjaini diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan dengan harapan dapat memberikan efek sebar dari atas ke bawah (*trickle down effect*).

Faktanya teori ini ternyata gagal menjadi pendorong utama (*prime over*) pertumbuhan ekonomi wilayah. Gagalnya teori ini menyebabkan kecenderungan terhadap wilayah yang mempunyai potensi daerah seperti bahan mentah, modal dan bakat – bakat *entrepreneur* menyebabkanterjadinya kesenjangan antar wilayah. Sistem *top - down* terhadap pembangunan dan perencanaan tidak memberikan efek perubahan terhadap perkembangan pada suatu wilayah. Sistem *top – down* disempurnakan dengan sistem *bottom - up* dengan tujuan mampu memberikan perubahan terhadap paradigma sentralistik pasca otonomi daerah.

### 2.3.2 Pengembangan Wilayah Sistem *Bottom-Up*

Sistem *Bottom up* merupakan konsep yang dirancang pertama kali oleh Friedman, Mc Douglas (1978). Sistem *bottom - up* merupakan sistem yang membuat suatu rancangan pembangunan dari bawah atau disebut sebagai (*development from below*). Sistem *bottom - up* ini merupakan sistem yang menganut reaksi dari sistem pembangunan *top down* atau (*development from above*) dengan tujuan memberikan perubahan terhadap paradigma pembangunan pada suatu wilayah. Agropolitan yang dianut didalam konsep sistem *bottom up* merupakan suatu distrik ataupun region selektif yang dirancang untuk pembangunan dengan tujuan pembangunan mampu memberikan jaringan yang sangat kuat, baru dan terbuka baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah (Sugiono, 2002).

Dimensi ruang sistem *bottom up* memiliki arti yang sangat penting didalam konsep pengembangan wilayah, karena ruang dapat menciptakan konflik ataupun pemicu kemajuan bagi masyarakat didalam memperhatikan perkembangan wilayah. Secara kuantitas dimensi ruang memiliki pengertian sebagai ruang yang terbatas. Secara kualitas dimensi ruang mempunyai arti sebagai wilayah yang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda – beda. Investasi mempunyai kekuatan penting terhadap perkembangan suatu wilayah yang berpedoman terhadap dimensi ruang dengan harapan dapat memberikan formulasi kebijakan perkembangan wilayah dengan tujuan meningkatkan kegiatan pembangunan sektor dengan memanfaatkan potensi yang ada untuk mengurangi terjadinya ketimpangan wilayah disekitarnya. (Sugiono, 2002)

Kegiatan pembangunan sektor dengan memperhatikan faktor agropolitan diharapkan mampu mencegah terjadinya proses filterasi yang dapat mengurangi terjadinya permasalahan yang saling bertolak belakang dikemudian hari.

#### 2.4 Teori Pusat Pertumbuhan ( *Growth Pole Theory* )

Teori pusat pertumbuhan atau *Growth Pole Theory* diperkenalkan oleh ekonom asal Perancis, Francis Perroux pada tahun 1955. Sjafrizal (2008) menjelaskan Teori Perroux tentang *pole croisanse* atau *pole development* yang artinya pusat pertumbuhan sebagai perangkat industri – industri yang sedang mengalami perkembangan dan berlokasi di suatu tempat daerah perkotaan dan mendorong perkembangan lanjut dari kegiatan ekonomi melalui daerah pengaruhnya.

Secara konseptual, pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur - unsur yang bersifat dinamis sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar (wilayah belakangnya).

Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan penduduk datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinannya tidak ada interaksi antara usaha – usaha tersebut. Tidak semua

kota dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan, karena pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu adanya hubungan internal antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya *multiplier effect* (unsur pengganda), adanya konsentrasi geografis, dan bersifat mendorong pertumbuhan wilayah belakangnya (Tarigan, 2005).

*Growth poles theory* adalah salah satu teori yang dapat menggabungkan antara prinsip - prinsip konsentrasi dengan desentralisasi secara sekaligus. Dengan demikian teori pusat pengembangan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah. Selain itu teori ini juga dapat menggabungkan antara kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan terpadu.

Pusat – Pusat pertumbuhan mempunyai 3 tiga orde terhadap skala regional. Berikut orde skala regional terhadap penentuan pusat pertumbuhan menurut (Friedman dalam Harahap, 2009) :

1. Pusat pertumbuhan primer atau sering disebut sebagai pusat pertama dari suatu wilayah. Pusat pertumbuhan primer merupakan pusat yang mempunyai potensi yang besar dari wilayah disekitarnya.
2. Pusat pertumbuhan sekunder atau pusat yang menjadi wilayah pendukung dari pusat pertumbuhan primer. Pusat pertumbuhan sekunder diharapkan memberikan dampak yang lebih baik terhadap wilayah yang jauh dari pusat utamanya.

3. Pusat pertumbuhan tersier merupakan pusat yang memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan wilayah belakangnya (wilayah hinterland).

Pusat pertumbuhan mempunyai karakteristik yang berbeda – beda. Karakteristik menurut Richardson terbagi menjadi 4 (empat). Berikut penjelasan 4 karakteristik utama pusat pertumbuhan (Sjafrizal, 2012) :

1. Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi. Wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan berlokasi pada wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi.
2. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mempunyai dampak terhadap perekonomian yang dinamis.
3. Keuntungan aglomerasi diharapkan mampu memperkuat hasil dari input dan output terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Adanya faktor pendorong yang mampu meningkatkan pengembangan kegiatan ekonomi.

Secara umum keuntungan aglomerasi memiliki 3 (tiga) unsur yang penting didalamnya. Unsur tersebut meliputi keuntungan skala besar, keuntungan lokasi dan keuntungan urbanisasi. Berikut 3 unsur keuntungan aglomerasi (Rahayu, 2014) :

1. Keuntungan skala besar didefinisikan sebagai keuntungan yang dilihat dari hasil produksi dengan jumlah yang besar.

2. Keuntungan lokasi merupakan keuntungan dengan melihat jarak yang ditimbulkan dari hasil potensi wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan.
3. Keuntungan urbanisasi adalah keuntungan dengan melihat jumlah fasilitas pada wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan.

Pusat pertumbuhan dapat dilihat berdasarkan kawasan ekonomi terpadu, segitiga pertumbuhan dan lainnya. Untuk melihat pusat pertumbuhan pada skala nasional berikut penjelasannya (Sjafrizal, 2012) :

1. Untuk menentukan pusat pertumbuhan, indikator yang harus diperhatikan yaitu kriteria keuntungan lokasi dan melihat ketersediaan sarana yang ada pada wilayah tersebut.
2. Melihat potensi ekonomi yang ada pada suatu wilayah. Potensi ekonomi diharapkan mampu menggerakkan komoditas unggulan pada wilayah tersebut.
3. Melihat hubungan input dan output dengan melihat tingkat keterkaitan kegiatan industri dengan kegiatan ekonomi.
4. Membuat suatu lembaga untuk membantu proses pertumbuhan pada suatu wilayah.

Konsep pusat - pusat pertumbuhan merupakan salah satu konsep pengembangan wilayah. Usaha pengembangan melalui strategi pusat - pusat pertumbuhan itu sendiri bukan berarti hanya mengembangkan satu pusat pertumbuhan tunggal, tetapi mengembangkan beberapa pusat pertumbuhan sesuai

dengan tingkatannya (hirarki) yang mempunyai fungsi dan peranan tersendiri. Dalam teori pusat pertumbuhan terdapat berbagai macam indikator pusat pertumbuhan yang digunakan. pusat pertumbuhan dapat dilihat dari indikator terhadap keuntungan lokasi, potensi ekonomi, potensi lingkungan dan fasilitas pelayanan. Berikut sub indikator dari penentuan pusat pertumbuhan (Syafrizal, 2012) :

1. Indikator yang pertama yaitu keuntungan lokasi. Keuntungan lokasi menjadi kriteria utama dalam penentuan pusat pertumbuhan. Sub kriteria dari keuntungan lokasi yaitu melihat ukuran jarak disetiap kecamatan sebagai interpretasi pengurangan ongkos angkut, Porter memaparkan bahwa lokasi menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis. Keunggulan kompetitif dari suatu kota sering kali berupa lokasi strategis, permintaan pasar lokal, integrasi dengan klaster regional, dan sumber daya manusia (Widodo dan Ratna 2019). Jumlah penduduk dengan tujuan melihat jumlah besaran penduduk tinggal dan melihat jumlah kepadatan penduduk di suatu wilayah (Gustian, dkk, 2016).
2. Indikator yang kedua ditilik dari kegiatan ekonomi di setiap masing – masing kecamatan. Sektor primer adalah nilai tambah kelompok sektor primer seperti pertanian, pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder adalah nilai tambah kelompok sektor sekunder seperti industri pengolahan, listrik, gas, air bersih dan konstruksi. Sektor tersier adalah nilai tambah kelompok sektor tersier seperti perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, sewa, jasa perusahaan dan jasa lainnya.

3. Potensi lingkungan diukur berdasarkan daya dukung lingkungan sebagai pusat pertumbuhan dan kesesuaian lahan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu hamparan lahan untuk pemanfaatan ruang tertentu.
4. Fasilitas pelayanan berdasarkan ketersediaan fasilitas ekonomi, kesehatan, kelembagaan, peribadatan, pendidikan, fasilitas kebudayaan dan rekreasi dan fasilitas ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga.

Sistem pusat pertumbuhan yang terbentuk akan mempengaruhi penyediaan fasilitas perkotaan yang merupakan konsekuensi dari fungsi dan peran yang akan disandang oleh tiap pusat pertumbuhan. Dalam pelaksanaannya, penerapan fungsi dan peran dari setiap pusat juga harus disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan dan daerah yang dipengaruhi daerah belakangnya.

## **2.5 Hirarki Wilayah**

Hirarki wilayah adalah peringkat atau orde kota berdasarkan ukuran jumlah penduduk atau hirarki fungsionalnya. Penentuan Hirarki (tingkatan) kota – kota biasanya didasarkan pada jumlah penduduk dan fasilitas pelayanan. Sistem hirarki wilayah mencerminkan adanya hirarki (tingkatan) kota, spesialisasi fungsi, dan sistem keterkaitan (pelayanan, produksi, distribusi, orientasi pergerakan (Muta'ali, 2015).

### 2.5.1 Hirarki Wilayah dan Pusat – Pusat Pelayanan

Hirarki wilayah dan pusat – pusat pelayanan pada umumnya selalu mengacu pada teori pusat pelayanan (*centre place theory*) yang dikembangkan oleh Christaller Losch dan para pengikutnya. Dua konsep pokok yang mendasari teori pusat pelayanan, yaitu (Muta'ali, 2015) :

1. *The range of good*, yaitu jarak tempuh yang masih dapat ditolerir untuk suatu jenis barang atau pelayanan tertentu. Disamping unsur jarak, penentuan pilihan oleh pengguna dipengaruhi juga oleh jenis, kualitas, dan harga barang atau pelayanan yang ditawarkan.
2. *The threshold value*, yaitu jumlah penduduk atau sumber daya minimum yang dibutuhkan untuk dapat menciptakan permintaan yang cukup atas barang dan pelayanan yang ditawarkan.
3. *The threshold value* juga menentukan jenis, jumlah, dan harga barang atau pelayanan yang ditawarkan di daerah pusat.

Penentuan tingkat hirarki wilayah dan pusat - pusat pelayanan disusun berdasarkan indikator yang menentukan pemusatan dan menjadi objek pergerakan penduduk, yang meliputi jumlah penduduk dan fasilitas pelayanan. Pusat – pusat pelayanan menurut jangkauan pelayanan dapat dibedakan menjadi empat bagian, yaitu (Muta'ali, 2015) :

1. Hirarki I, merupakan pusat regional yang mempunyai fasilitas pelayanan terlengkap dan menjadi radius utama pelayanan utama dengan jumlah penduduk yang dilayani cukup besar.

2. Hirarki II adalah wilayah yang menjadi pusat distrik pada suatu wilayah. Hirarki ini dianggap mampu memberikan dampak terhadap wilayah disekitar pusat regional.
3. Hirarki III adalah hirarki yang disebut sebagai hirarki dengan tingkatan sub distrik. Hirarki terhadap wilayah ini mempunyai peranan untuk meningkatkan wilayah pendukungnya terutama wilayah yang berada di pinggiran kota.
4. Hirarki IV atau disebut hirarki pusat local. Hirarki ini merupakan hirarki yang menunjukkan tipe pusat pelayanan yang periodik. Dengan pengaruh pelayanan yang rendah.

Menurut *National Urban Development Strategy* (2000) dalam Muta'ali (2015) menentukan bentuk lain dari hirarki wilayah ialah dalam bentuk hirarki kota berdasarkan jumlah penduduk yaitu kota kecil (<100.000), kota menengah (100.000 – 500.000), kota besar (500.000 – 1.000.000) dan metropolitan (>1.000.000). Semakin tinggi hirarki wilayah, semakin luas pengaruh dan menjadi pusat orientasi pergerakan dengan tingkat keterkaitan dan konektivitas tinggi. Tingkat perkembangan wilayah tinggi dan potensial menjadi pusat wilayah (*growth center*).

## 2.6 Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral dikemukakan oleh seorang ahli geografi Jerman yaitu Walter Christaller pada tahun 1933. Hartono (2007) menjelaskan Teori Christaller tentang kota sentral yang merupakan pusat bagi daerah disekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lainnya. Apabila sebuah tempat mempunyai berbagai fungsi sentral untuk daerah -daerah disekitarnya yang kurang begitu penting, daerah tersebut dinamakan tempat sentral tingkat tinggi.

Teori Tempat sentral mempunyai penilaian terhadap karakteristik pada wilayah tersendiri. Wilayah yang mempunyai karakteristik terhadap teori tempat sentral terdiri dari 5 (lima). Lima karakteristik pada teori tempat sentral (Soepono, 2000) :

1. Kepadatan penduduk.
2. Tidak adanya eksternalitas berbelanja.
3. Input terdapat di semua lokasi pada harga yang sama.
4. Permintaan sama untuk tiap produk, permintaan per kapita sama untuk semua wilayah.
5. Jumlah toko. Produk ini mempunyai permintaan dengan skala ekonomi yang berbeda.

Adapun sebuah tempat yang hanya merupakan pusat bagi kegiatan setempat dinamakan tempat sentral rendah. Konsep dasar teori tempat sentral menurut Christaller dalam Hartono (2007) sebagai berikut :

1. *Population threshold* yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk melancarkan dan kesinambungan unit.
2. *Range* (jangkauan) yaitu jarak maksimum yang diperlukan untuk ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dari tempat pusat.

Menurut Christaller dalam Muta'ali (2015) setiap orde memiliki wilayah heksagonal sendiri - sendiri. Bentuk pola pelayanan heksagonal ini secara teoritis mampu memperoleh optimasi dalam hal efisiensi transportasi, pemasaran dan administrasi. Kota sebagai pusat pelayanan diharapkan memiliki fasilitas pelayanan seperti :

1. Pusat dan pertokoan sebagai fokus point dari suatu kota.
2. Sarana dan prasarana transportasi.
3. Tempat rekreasi dan olahraga.
4. Sarana pendidikan, kesehatan, obyek wisata.

Menurut teori tempat sentral ini, fungsi – fungsi pokok suatu pusat kota adalah bertindak sebagai pusat pelayanan bagi daerah belakangnya (*hinterland*), penyuplai barang - barang dan jasa - jasa sentral seperti jasa eceran, jasa – jasa perdagangan, perbankan dan professional, fasilitas - fasilitas pendidikan, hiburan dan kebudayaan dan jasa – jasa pemerintahan kota.

## 2.7 Interaksi Antar Wilayah

Interaksi antar wilayah atau interaksi keruangan menggambarkan interaksi yang mempunyai pengaruh terhadap dua wilayah atau lebih dengan memberikan dampak terhadap suatu wilayah. Besarnya suatu interaksi akan menimbulkan pengaruh terhadap wilayah yang sama – sama memenuhi kebutuhan, adanya kemungkinan untuk berinvestasi, dan dapat memberikan keringanan pada saat melakukan tahap evaluasi (Respati dalam Farida 2017).

Interaksi antar wilayah mempunyai sifat yang saling berkaitan diantara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Wilayah yang mempunyai interaksi tertinggi dibandingkan wilayah lain mempunyai jumlah fasilitas yang sanggup melayani kebutuhan penduduk pada radius yang lebih luas. Penduduk yang tinggal pada wilayah dengan radius terbatas akan menempuh wilayah tertentu untuk mendapatkan kebutuhan yang di inginkan.

Morlok (2005) berpendapat bahwa terjadinya perbedaan kualitas sumber daya dan keterbatasan kapasitas pada suatu wilayah untuk menanggung kebutuhan penduduk pada suatu wilayah mengakibatkan terjadinya proses pergeseran barang, orang dan jasa pada suatu wilayah. Pergeseran ini muncul dari proses penawaran dan permintaan. Untuk pergeseran proses penawaran dan permintaan pada suatu wilayah dibutuhkan sarana transportasi.

Sarana transportasi akan mengakomodasi mobilitas angkutan umum. Untuk menyelenggarakan kehidupan manusia memanfaatkan ruang sebagai tempat tinggal dengan menganut unsur *working, opportunities, circulation, housing, recreation and other living facilities*.

Unsur yang sering digunakan adalah unsur circulation dengan unsur antara jaringan transportasi dan komunikasi pada suatu wilayah permukiman. Sistem transportasi dan komunikasi mencakup sistem internal dan eksternal. Sistem ini mengkaji sistem jaringan yang tersedia pada suatu wilayah. Sistem yang kedua mengkaji kondisi kualitas dan kuantitas jaringan yang menghubungkan permukiman satu dengan permukiman lainnya. Pergeseran manusia dan barang mempunyai suatu koneksi jaringan didalam suatu wilayah.

Jaringan tersebut berupa jaringan jalan yang merupakan bagian dari sistem transportasi. Transportasi menjadi point utama pada suatu sistem, karena tanpa transportasi pada suatu jaringan dapat memberikan dampak jalur penghubung yang baik. Interaksi terhadap suatu wilayah tergambar dari fasilitas transportasi beserta aliran orang, barang maupun jasa.

Transportasi menggambarkan tolak ukur pada proses perkembangan wilayah. Wilayah dengan kondisi geohgrafis yang berbeda – beda mengutamakan keterpaduan antar jenis transportasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Transportasi yang baik akan melancarkan pergerakan penduduk lokal dengan dunia luar. Transportasi berfungsi sebagai jembatan penghubung antara produsen dengan konsumen. Jarak pada suatu wilayah dapat ditentukan berdasarkan waktu ataupun berdasarkan kondisi geografis.

Pembangunan suatu jalur transportasi akan menyokong tumbuhnya fasilitas – fasilitas lain yang tentunya bernilai ekonomis. Perbedaan sumber daya yang tersedia pada suatu daerah dengan daerah lainnya, akan memotivasi masyarakat untuk menjalankan mobilitas, sehingga memperoleh kebutuhan yang diinginkan.

Didalam proses mobilitas, transportasi mempunyai peranan yang relevan demi mempermudah dan memperlancar proses mobilisasi. Proses mobilisasi tidak hanya erfokus terhadap manusia saja, akan tetapi terhadap barang dan jasa. Melalui interaksi antar daerah diharapkan proses lebih mudah dan bisa mengurangi terjadinya permasalahan kesenjangan antar daerah. Kebutuhan akan pergerakan mempunyai sifat kebutuhan turunan.

Transportasi menggambarkan jaringan penghubung utama antara dua daerah yang saling berinteraksi di dalam pembangunan. Jika tidak tersediannya jaringan transportasi, pembangunan tidak dapat diperkenalkan ke luar daerah. Jalan merupakan jalur transportasi yang digunakan untuk menuju ke suatu wilayah. Aktifitas penduduk yang memuncak perlu dijadikan rumusan didalam kebijakan pada bidang transportasi, karena manusia akan selalu membutuhkan transportasi. Keadaan ini menimbulkan proses interaksi antar wilayah tercermin terhadap fasilitas transportasi. Transportasi menjadi tolak ukur interaksi antar wilayah didalam proses perkembangan wilayah dengan indikator yang mendasarkan kepada aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan kemampuan suatu wilayah, region ataupun ruang untuk bisa melakukan perjalanan baik yang dilakukan pihak luar secara langsung maupun tidak langsung.

Pembangunan terhadap kawasan pedesaan menjadi lambat di sebabkan oleh minimnya sarana transportasi yang ada. Transportasi diharapkan dapat membuka jalan komunikasi di setiap daerah sehingga timbul aliran barang, jasa, manusia dan terciptanya gagasan terhadap suatu daerah untuk maju dan berkembang. Transportasi dapat menjadi fasilitator bagi suatu daerah untuk memajukan dan

mengembangkan suatu daerah, karena transportasi mampu meningkatkan aksesibilitas yang sangat baik dalam suatu daerah. Menurut Santosa (2005) agar perencanaan aksesibilitas berjalan dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal maka dapat dipakai pedoman antara lain:

1. Perencanaan tersebut diintegrasikan dengan mempertimbangkan semua aspek kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan hidup sehari-hari, ekonomi, maupun kebutuhan sosial.
2. Perencanaan tersebut berdasarkan pada sistem pengumpulan data yang cermat.
3. Menggunakan rumah tangga sebagai fokus dalam proses perencanaan.
4. Mengembangkan seperangkat set informasi yang komprehensif pada semua aspek infrastruktur perdesaan.
5. Mengidentifikasi intervensi-intervensi antara perbaikan sistem transportasi lokal (jalan dan pelayanan transportasi lokal) dan untuk lokasi pelayanan yang paling cocok.
6. Perencanaan tersebut mudah diaplikasikan.
7. Perencanaan tersebut murni menggunakan perencanaan pendekatan sistem *bottom-up*.

## **2.8 Fasilitas Pelayanan Publik**

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Defenisi pelayanan publik adalah kegiatan atau reangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan Peraturan Perundang - Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penduduk yang tinggal di suatu wilayah dalam menjalankan kehidupan dan aktivitasnya membutuhkan dukungan fasilitas pelayanan.

Ketersediaan fasilitas pelayanan merupakan fungsi dari penduduk sebagai objek pelayanan. Perkembangan fasilitas berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan dinamika perkembangan sosial ekonominya. Penambahan jumlah penduduk yang tinggi dan terus meningkat, membawa implikasi bagi meningkatnya tuntutan dan kebutuhan akan fasilitas yang dapat mendukung kehidupannya. Asumsi dasarnya adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan fasilitas juga meningkat. Secara umum fasilitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fasilitas umum, sosial dan ekonomi.

Dua fasilitas pertama sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah dan umumnya tersedia di semua tempat, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan. Sedangkan fasilitas ketiga umumnya menganut kebutuhan pasar dan tidak disetiap tempat tersedia. Prinsip lain yang menjadi dasar perencanaan pelayanan adalah pemahaman tentang dua tipe atau jenis pelayanan, yaitu:

1. *Height order goods services*, yaitu barang atau jasa pelayanan yang memiliki ambang *threshold* dan jangkauan (*range*) besar. Jenis pelayanan ini umumnya tersedia dalam jumlah kecil dan terbatas. Sebagai contoh pada pelayanan pendidikan dan kesehatan adalah fasilitas perguruan tinggi dan rumah sakit, dan secara lokasioanal berada di pusat kota.

2. *Low order good services*, barang atau jasa pelayanan memiliki *threshold* dan *range* kecil. Jenis pelayanan tersedia dalam jumlah besar dan terdapat di semua tempat (merata) serta berada di desa atau daerah dengan hirarki rendah. Jenis pelayanan ini umumnya tersedia dalam jumlah kecil dan terbatas. Sehingga contoh pada pelayanan pendidikan adalah fasilitas pendidikan dasar TK dan SD.

Mengetahui ketersediaan dan daya lahan suatu fasilitas pelayanan penting dilaksanakan demi merepresentasikan realitas pencapaian pelayanan publik dan mengevaluasi ketersediaan fasilitas pelayanan dengan harapan memperoleh pembentukan prioritas di dalam penyediaan fasilitas pelayanan.

Tingkat ketersediaaan pelayanan dapat diukur dengan jumlah unit pelayanan yang tersedia. Jumlah pelayanan merupakan informasi penting dalam kaitannya dengan penyediaan pelayanan dan alokasi ruang atau wilayah yang membutuhkan. Jumlah fasilitas pelayanan mengikuti keberadaan penduduk yang dilayani, sehingga semakin tinggi jumlah penduduk maka jumlah pelayanan semakin banyak.

Standar pelayanan minimum masing – masing pelayanana fasilitas permukiman di Indonesia tertuang dalam SNI 01-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan yang ditampilkan pada tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1 Kriteria Penentuan Fasilitas Pelayanan Publik  
Lingkungan Permukiman**

No	Kelompok Fasilitas dan Jenis Fasilitas	Penduduk Pendukung (Threshold)	Luas Lahan	Radius Jangkauan (Range)
		Jiwa	(m <sup>2</sup> )	m
1	<b>Pendidikan</b>			
	a. TK	1.250	1.200	500
	b. SD	1.600	1.500	1.000
	c. SMP	4.800	10.000	1.000
	d. SMA	4.800	20.000	3.000
2	<b>Kesehatan</b>			
	a. Balai Pengobatan	2.500	300	1.000
	b. Posyandu	1.250	-	500
	c. Apotik	30.000	350	1.500
	d. Puskesmas	120.000	650	3.000
	e. Puskesmas Pembantu	30.000	500	1.500
	f. Klinik Bersalin	30.000	1.600	4.000
	g. Praktek Dokter	5.000	-	1.500
	h. Rumah Sakit	240.000	86.400	-
3	<b>Ekonomi (Perdagangan Dan Jasa)</b>			
	a. Toko/Warung	250	300	-
	b. Pertokoan	6.000	2.000	2.000
	c. Pusat Pertokoan/ Pasar Kecil Lingkungan	30.000	10.000	-
	d. Pusat Niaga (Toko, Pasar, Bank, Kantor, Industri)	120.000	36.000	-
	e. <i>Shopping Center</i>	340.000	96.000	-
4	<b>Kebudayaan dan Rekreasi</b>			
	a. Gedung Serbaguna	120.000	3.000	100
	b. Gedung Bioskop	120.000	2.000	100
	c. Balai Warga / Balai Pertemuan	2.500	300	100
5	<b>Peribadatan</b>			
	a. Masjid Lokal	2.500	600	-
	b. Masjid Kelurahan	30.000	3.600	-
	c. Masjid Kecamatan	120.000	5.400	-
	d. Gereja	Tergantung sistem kekerabatan/ hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	-
	e. Vihara	Tergantung sistem kekerabatan/	Tergantung kebiasaan setempat	-

No	Kelompok Fasilitas dan Jenis Fasilitas	Penduduk Pendukung (Threshold)	Luas Lahan	Radius Jangkauan (Range)
		Jiwa	(m <sup>2</sup> )	m
		hirarki lembaga		
	f. Pura	Tergantung sistem kekerabatan/ hirarki lembaga	Tergantung kebiasaan setempat	-
6	<b>Pemerintah dan Pelayanan Umum</b>			
	a. Kantor Kelurahan	30.000	1.000	-
	b. Kantor Kecamatan	120.000	250.00	-
	c. Kantor Polisi/Koramil	120.000	1.000	-
	d. Kantor Pos Pembantu	120.000	500	-
	e. Kantor Pemadam Kebakaran	120.000	1.000	-
7	<b>Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga</b>			
	a. Taman dan Lapangan Olahraga	120.000	24.000	-
	b. Kuburan	120.000	-	-
	c. Taman / Tempat main	2.500	1.250	1.000

Sumber : Muta'ali, 2015

## 2.9 Metode Scalogram

*Metode scalogram* merupakan teknik penjabaran yang dipakai untuk menganalisis persebaran gungsi fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi dan menentukan hirarki terhadap jumlah fasilitas yang tersedia. Analisis scalogram bertujuan untuk memberikan hirarki ataupun urutan peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit prasarana pembangunan dari yang paling banyak sampai paling sedikit, sehingga dapat ditentukan wilayah pusat pengembangannya. Semakin tinggi persentase kelengkapan fasilitas yang dimiliki suatu wilayah maka semakin tinggi kemampuan pelayanan wilayah tersebut. (Muta'ali, 2015).

Prasarana wilayah menunjukkan fungsi wilayah. Penggunaan fungsi prasarana wilayah dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Fasilitas ekonomi (pusat perdagangan, bank, toko, pasar, dan lain – lain)
2. Fasilitas yang berkaitan dengan aktivitas sosial (pendidikan, kesehatan, gedung pertemuan, dan lain- lain)
3. Fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi - politik atau pemerintahan, seperti kantor pemerintahan dan pelayanan publik lainnya.

Fasilitas – fasilitas tersebut menunjukkan adanya *differentiation* dan *centrality* wilayah, sehingga semakin banyak dan beragam jenis fasilitas yang dimiliki wilayah, semakin tinggi kecenderungan pemusatan sehingga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan. Hasil analisis scalogram yang dihasilkan adalah kelompok wilayah dengan disusun berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas yang dimiliki. Jumlah fasilitas dengan hasil penilaian tertinggi, maka hasil penilaian terhadap kelompok fasilitas tersebut diletakkan pada hirarki I. (Muta'ali, 2015).

Wilayah dengan jumlah fasilitas tertinggi memiliki kemampuan pelayanan wilayah yang tinggi. Begitupun sebaliknya jika jumlah fasilitas pada suatu wilayah rendah maka wilayah akan menjadi peringkat terakhir dari jumlah total fasilitas pelayanan. Untuk pengelompokan jumlah fasilitas dihitung jumlah jenis fasilitas yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Kemudian menghitung jumlah keseluruhan fasilitas. Semakin tinggi persentase kelengkapan fasilitas terhadap suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan pelayanan wilayah tersebut. (Muta'ali, 2015)

Analisis *scalogram* bisa memberikan gambaran hubungan antara distribusi penduduk dengan jumlah kelengkapan fasilitas sosial ekonomi dan mampu menjadikan tingkatan wilayah terhadap perkembangan wilayah dengan tujuan dapat memberikan manfaat terhadap perencanaan organisasi di dalam struktur ruang (Muta'ali, 2015).

Penyusunan Analisis *Scalogram* adalah dengan menyusun kecamatan dengan jumlah fasilitas yang tersedia. Fasilitas yang teredia diberikan nilai (1) jika fasilitas tidak tersedia maka diberikan nilai (0) (Muta'ali,2015). Setelah menyusun peringkat kecamatan dengan memberikan penilaian maka dihitung nilai *error* dari hasil *analisis scalogram*. Setelah di dapatkan nilai *error* maka diuji nilai kelayakan dari hasil *coefisien of reproducibility* (COR) dengan rumus (Bruce,2018) :

$$\frac{1 - e}{JF \times JD}$$

Keterangan = e : jumlah kesalahan atau nilai *error*

JF : jumlah fasilitas yang diteliti

JD : jumlah wilayah yang diteliti

Kelemahan di dalam metode ini adalah tidak memperhatikan aspek distribusi penduduk dan jumlah luas pada daerah yang menjadi pusat pelayanan. Hasil akhir dari analisis *scalogram* tidak memperhitungkan nilai pembobotan dari jumlah fasilitas. Sehingga hasil akhir analisis *scalogram* tidak memiliki perbedaan rentang nilai yang menyebabkan pengelompokkan ataupun mengklasifikasikan tata urutan hirarki wilayah menjadi sulit (Muta'ali, 2015).

Kelemahan *metode scalogram* di tutupi dan disempurnakan pada analisis *indeks sentralitas* yang memberikan bobot setiap fasilitas, sehingga rentang nilai hirarki lebih tepat dan masing – masing wilayah mempunyai pusat pertumbuhan (hirarki I) maupun wilayah yang berada pada hirarki di bawahnya (Muta’ali, 2015).

### 2.10 Metode *Indeks Sentralitas Marsall*

*Metode indeks sentralitas marsall* merupakan langkah lanjutan dari *analisis scalogram*. *Analisis indeks sentralitas* juga dimaksudkan untuk mengetahui struktur atau hirarki pusat – pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak jumlah fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman. (Muta’ali, 2015).

Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu. *Indeks sentralitas* menunjukkan nilai strategis wilayah berdasarkan aspek lokasi geografis, dimana wilayah tersebut dicirikan dengan kemudahan akses dan banyaknya *link* dan simpul transportasi yang mengumpul pada wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki nilai sentralitas tinggi pusat orientasi kegiatan dan menjadi wilayah tujuan (*destination*). *Indeks sentralitas* dan *analisis scalogram* memiliki perbedaan yang dilihat dari alat yang digunakan di dalam penilaian pembobotan dari setiap fungsi yang tersedia. Sehingga analisis ini disebut sebagai analisis indeks terbobot (Muta’ali, 2015).

Indeks terbobot juga sering disebut dengan *indeks sentralitas marsall* sebagai penemu awal. Perhitungan *analisis indeks sentralitas* berdasarkan pembobotan terhadap jenis fasilitas pada suatu wilayah. Pembobotan didasarkan frekuensi terhadap jenis fasilitas permukiman yang terikat. (tingkat frekuensi dilihat berdasarkan bobot yang ada) (Muta'ali, 2015). Metoda ini melakukan dua jenis pembobotan yaitu (Muta'ali, 2015) :

1. Pembobotan terhadap jenis fasilitas yang disebut dengan nilai *sentralitas* gabungan. Pembobotan ini digunakan asumsi bahwa nilai *sentralitas* gabungan seluruh fasilitas dianggap sama. Nilai dapat dipilih secara sembarangan dan disesuaikan dengan jumlah unit fasilitas terbesar. Biasanya nilai unit bisa diberikan nilai 100 maupun 1000.
2. Pembobotan terhadap jenis fasilitas unit fasilitas yang disebut juga sebagai *sentralitas* fasilitas, dengan rumus sebagai berikut (Muta'ali, 2015) :

$$C = \frac{x}{X}$$

Keterangan : C : bobot atribut fungsi x

x : nilai sentralitas gabungan = 100 contoh

X : jumlah total atribut dalam system

Setelah hasil pembobotan fungsi fasilitas pelayanan dilakukan maka selanjutnya di cari terlebih dahulu nilai orde dan nilai interval. Untuk memperoleh nilai orde dan nilai interval maka digunakan *rumus sturgess*. *Rumus strurges* yaitu (Farizal, dkk, 2011) :

$$1 + 3.3 \log (n)$$

Keterangan : n : banyaknya kecamatan

Untuk rumus mencari nilai interval sebagai berikut (Farizal, dkk, 2011) :

$$\frac{\max - \min}{k}$$

Keterangan : Max : nilai tertinggi pembobotan

Min : nilai terendah pembobotan

k : nilai fungsi

Hasil perhitungan nilai orde dan nilai interval akan mengetahui hirarki wilayah berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan. Untuk itu *analisis indeks sentralitas marsall* akan mengetahui tingkatan wilayah dengan perhitungan pembobotan.

### 2.11 AHP (*Analytical Hierarchy Proses*)

*Metode Analytical Hierarchy Proses* (AHP) dikembangkan oleh Prof. Thomas Lorie Saaty dari *Wharton Business School* di awal tahun 1970, yang digunakan untuk mencari rangking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif untuk memecahkan suatu permasalahan. Berdasarkan kondisi di kehidupan sehari – hari, seseorang senantiasa dihadapkan terhadap pilihan dari sudut pandang berbagai alternatif. Penentuan prioritas dan uji konsistensi kepada pilihan – pilihan yang sudah dilaksanakan (Tumada, 2012). Di dalam kondisi yang kompleks, pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan multifaktor dan mencakup berbagai jenjang maupun kepentingan.

Metode ini didesain untuk mengambil persepsi seseorang yang mempunyai keahlian dibidangnya dengan melihat permasalahan tertentu berdasarkan prosedur yang di rancang untuk sampai ke tahap preferensi di antara pilihan set alternatif., sehingga metode ini dianggap sebagai medel objectif – multikriteria (Tumada, 2012)

Pada dasarnya AHP adalah metode yang memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok - kelompoknya, mengatur kelompok -kelompok tersebut ke dalam suatu hirarki, memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesa ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi.

Prinsip AHP adalah memberikan bobot tiap faktor, variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu sama lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam menentukan penentuan pusat – pusat pertumbuhan.

Analisis AHP mampu menyederhanakan suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, strategik dan dinamik menjadi bagiannya, serta menjadikan variabel di dalam suatu hirarki. Masalah yang kompleks bisa diartikan sebagai kriteria dari suatu masalah yang begitu banyak (multikriteria), struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian pendapat dari pengambil keputusan, pengambil keputusan lebih dari satu orang, serta ketidak akuratan data yang tersedia (Tumada, 2012).

Metode ini membantu memecahkan persoalan yang kompleks dan terstruktur terhadap suatu hirarki kriteria, pihak yang bersangkutan, hasil dan dengan menarik di dalam mempertimbangkan dengan maksud mengembangkan bobot atau prioritas.

Metode ini juga memadukan kekuatan terhadap perasaan dan logika seseorang terhadap suatu persoalan. Mensintesis bermacam pertimbangan yang beragam menjadikan hasil yang diperoleh sangat layak atas dugaan kita menurut intuitif seperti halnya yang diperenstasikan atas pertimbangan yang sudah dibuat. (Tumada, 2012).

AHP terus mengang perhatian yang eksklusif terkait kekeliruan di dalam konsentrasi, pengukuran dan ketergantungan di dalam dan di luar kelomok elemen strukturnya. AHP mentoleransi tingkat konsentrasi  $>10\%$ . Jika hasil AHP lebih dari 10% maka wajib melakukan perbaikan penilaian karena seorang responden dianggap tidak konsisten dalam memberikan penilaian (Tumada, 2012).

Konsistensi diartikan sebagai intensitas hubungan terhadap suatu elemen yang dilandaskan terhadap kriteria tertentu, sama – sama membenarkan menurut pandangan yang logis, pengujian konsistensi dilakukan sebagai cara untuk melihat konsistensi jawaban penilaian pasangan terhadap perbandingan maupun struktur hirarki permasalahan. Keadaan tersebut dikarenakan atas bukti menyatakan bahwa terlalu tidak mungkin untuk mendapatkan jawaban responden yang mutlak konsisten.

Pengolahan data dilakukan dengan cara mentabulasikan hasil wawancara penelitian yang disajikan di dalam tabel untuk menghitung hasil nilai geomeannya. Niali yang dianggap relevan dikalikan dengan jumlah responden (Tumada, 2012)

### **2.11.1 Karakteristik Umum Model AHP**

Analisis hirarki proses merupakan proses pengambilan keputusan dengan maksud menutupi semua kelemahan dari model sebelumnya. Perangkat yang digunakan adalah pandangan manusia. Untuk mengatasi permasalahan yang kompleks dipecah menjadi suatu kelompok yang di susun menjadi sebuah hirarki (Tumada, 2012).

Perbedaan yang terlihat jelas dari model AHP dengan keputusan lainnya terletak kepada inputnya. Input yang digunakan adalah input kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Model AHP memerlukan pendapat seseorang yang ahli di dalam bidang yang menjadi input utamanya (Tumada, 2012).

Seseorang yang menjadi responden terhadap metode AHP haruslah orang yang sangat mengerti permasalahan yang di teliti. Pengukuran kualitatif menjadi hal yang sangat penting melihat permasalahan yang makin besar. Contohnya pengukuran kerugian akibat polusi udara yang sepenuhnya tidak dapat dhitng dengan cara kuantitatif. Apabila tidak dierhatikan di dalam pengukuran dampak polusi udara, maka hasil kesalahan tidak terlalu besar. Pengukuran menggunakan model AHP akan memberikan seseorang untuk memperhitungkan suatu hal yang tidak bisa di ukur dari permasalahan pengurangan dampak polusi. (Tumada, 2012)

Model AHP adalah model pengambilan keputusan yang komprehensif dengan memerhitungkan hasil dari penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Kelebihan model AHP dibandingkan model lain yaitu memecahkan suatu permasalahan secara *multiobjective* dan *multicriteria*. Model AHP sudah menggunakan satu tujuan dengan jumlah kriteria yang banyak (Tumada, 2012).

Keunggulan model AHP dianggap lebih fleksibel karena bisa memasukkan tujuan dan kriteria sekaligus terhadap permodelan sebuah hirarki meskipun mempunyai sifat yang berlawanan di dalam sebuah model. Keputusan dari hasil AHP sudah mempertimbangkan tujuan dan kriteria yang saling bertentangan satu sama lain (Tumada, 2012).

Permasalahan yang sangat kompleks seperti permasalahan konflik, perencanaan, proyeksi, alokasi sumber daya bisa terselesaikan dengan baik dengan perhitungan *analisis hierarchy process*. Model AHP juga tidak luput dari kelemahan yang bisa mengakibatkan hasil keputusan yang fatal. (Tumada, 2012).

Kelemahan yang berakibat fatal ini disebabkan oleh persepsi seseorang dianggap ekspert membuat hasil penilaian yang keliru. Kondisi ini ditambahkan belum adanya kriteria yang jelas untuk seseorang yang ahli. Hasil yang didapatkan membuat seseorang ragu di dalam menyimpulkan sebuah solusi. Kebanyakan orang akan berpendapat apakah presepsi dari seseorang yang ekspert dapat mewakili kepentingan orang banyak dan apakah responden benar – benar dianggap ahli atau tidak. Keraguan presepsi ini diakibatkan oleh fakta yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai presepsi keputusan yang berbeda dengan orang lain. Untuk membuat model AHP dapat diterima oleh masyarakat

perlu diberikan kriteria taupun batasan tegas dari seseorang yang ekspert serta meyakinkan masyarakat bisa menerima bahwa presepsi orang yang ahli bisa mewakilkan pendapat masyarakat, paling tidak sebagian besar dari masyarakat (Tumada, 2012).

Bagi peneliti yang terbiasa mengambil keputusan dengan permodelan kuantitatif yang rumit akan berpendapat jika penilaian keputusan model AHP bukanlah metode yang dapat digunakan di dalam pengambilan keputusan. Semakin sulit suatu model dan perkiraan hasil keakuratan model tersebut, tanpa disadari perhitungan belum menyinggung pendekatan yang kualitatif. Pada dasarnya kekurangan dari model AHP terus menunjukkan kelebihanannya.

Responden yang memiliki keputusan yang tinggi umumnya dari golongan orang yang memiliki peran penting. Simulasi pergantian terhadap satu elemen dapat dimengerti dan mudah dilakukan apabila seseorang ingin melakukan analisa secara sensitivitas. Keunggulan yang biasannnya dimasukkan dari permodelan AHP terutama terhadap keperluan politik terhadap suatu negara biasannya bersifat ke arah yang lebih demokratis. Proses perencanaan pembangunan dianggap tidak memberikan peluang kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi. Seluruh rencana pembangunan yang sudah dirancang oleh pemerintah tidak mampu menyentuh sasaran di dalam perencanaan pembangunan secara maksimum.

Permodelan AHP memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendompleng bersama proses perencanaan pembangunan melalui proses pembentukan hirarki dengancara memberikan peluang untuk mengisi kuesioner bergandengan dengan aparat pemerintah, dengan harapan presepsi masyarakat bisa dimengerti oleh pemerintah. Sehingga pemerintah bisa memperhitungkan apa saja yang menjadi prioritas perencanaan pembangunan. Pembangunan diharapkan bukan semata – mata mengikuti sistem perencanaan *top down* tetapi juga memperhatikan sistem perencanaan secara *bottom –up* (Tumada, 2012).

#### **2.11.2 Prinsip – Prinsip Dasar Analytical Hierarchy Process (AHP)**

Prinsip dasar yang harus dipahami di dalam menyelesaikan persoalan metode *analytic hierarchy process* (AHP) yaitu secara (Tumada,2012) :

1. *Decomposition*

*Decomposition* merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi elemen susunan hirarkri proses pengambilan keputusan, dimana setiap elemen saling bersinggungan. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, penyelesaian tingakatam dari permasalahan yang terjadi dilakukan terhadap seluruh elemen sehingga tidak terjadinya penyelesaian terus menerus. Tingkatan hirarki keputusan dikategorikan secara *complete* dan *incomplete*. Hubungan semua elemen mempunyai hubungan terhadap elemen yang ada terhadap kedudukan selanjutnya yang hubungan tersebut disebut sebagai suatu hirarki keputusan yang *complet*. Sedangkan keputusan *incomplete* terhadaphirarki keputusan merupakan

elemen yang tidak memiliki tingkatan yang saling berhubungan. Pada dasarnya permasalahan yang nyata memiliki karakteristik struktur lebih kepada *incomplete*. Tingkatan struktur *decomposition* yang pertama yaitu tujuan keutusan (*Goal*), yang kedua berdasarkan kriteria – kriteria dan yang menjadi struktur terakhir adalah berdasarkan penilaian alternatif. Hirarki permasalahan sulit untuk diselesaikan pemecahannya jika di dalam proses tidak memperhatikan semua elemen keputusan yang termasuk didalam sistem.

2. *Comparative Judgement*

*Comparative judgement* merupakan penilaian kepentingan dua elemen terhadap tingkat tertentu terkait dengan tingkatan selanjutnya. Penilaian ini merupakan inti dari analisis AHP karena memberikan akibat terhadap susunan prioritas terhadap elemen – elemennya. Hasil penilaian disajikan kedalam bentuk matriks pair wise comparisons dengan melihat perbandingan berpasangan terhadap beberapa alternatif untuk setiap kriteria. Skala yang digunakan di dalam penilaian tingkatan yaitu nilai 1 (satu) sampai ddengan 9 (sembilan). Nilai ini menunjukkan perbandingan nilai dari yang terendah hingga memberikan penilaian yang lebih tinggi.

3. *Syntesis Of Priority*

Unsur pengambilan keputusan *synthesis of phiority* untuk mendapatkan bobot relatif di dalam penilaian di gunakan *eigen vektor method*.

4. *Logical consistency*

Urutan pengambilan keputusan *logical consistency* yang digunakan untuk memperoleh suatu *vektor composite* tertimbang dengan mengagresikan seluruh nilai eigen yang di peroleh dari berbagai tingkatan hirarki. *Logical consistency* menjadi katrakteristik yang terpenting didalam metode pengambilan keputusan AHP.

*Pair wise comparison matriks* merupakan elemen *judgement* di dalam *decision maker*. *Decision maker* diharapkan mmemberikan penilaian, mempresepsikan dan memperkirakan kemungkinan dari suatu peristiwa yang dihadapi. Landasan aksiomatik merupakan landasan yang digunakan di dalam proses *analytic hierarchy process (AHP)*. Landasan aksiomatik terdiri dari 4 (empat) landasan. Berikut penjelasn landasan aksiomatik (Tumada, 2012) :

1. *Resiprocal comparison*, yang memuat batasan terhadap tabel perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersifat berkebalikan. Misalnya, jika A adalah  $k$  kali lebih penting dari pada B maka B adalah  $1/k$  kali lebih penting dari A.
2. *Homegenity* memuat batasan kesesuaian terhadap perbandingan. Misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan jeruk dengan bola tenis dalam hal rasa, akan tetapi lebih relevan jika membandingkan dalam hal berat.
3. *Depedenc* merupakan hubungan yang tidak sempurna terhadap keputusan *incomplete hierarchy* tetapi memperhatikan tingkatan keterkaitan *complete hierarchy*.

4. *Expectation* merupakan penilaian yang didasarkan terhadap data kuantitatif dan kualitatif dengan memperlihatkan penilaian keputusan lebih kearah ekspetasi dan preferensi.

Langakah – langkah yang dilakukan secara umum di dalam pengambilan keputusan dengan metode AHP yaitu (Tumada, 2012) :

1. Merumuskan masalah dengan memutuskan solusi yang ingin dicapai
2. Memberntuk struktur hirarki dengan proses yang diawali menentukan tujuan umum kemudian selanjutnya menentukan hirarki aspek dan yang terakhir menyeleksi kriteria yang akan dilakukan perangkaian.
3. Menentukan tabel pertimbangan secara berganda terhadap (pair-wise) dengan cara menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap hirarki terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat diatasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu hirarki dibandingkan dengan hirarki lainnya.
4. Kolom yang berisikan nilai total didalam matriks berganda dibagi menjadi nilai terhadap setiap elemen tersedia pada data.
5. Perhitungan nilai eigen vector dilakukan dengan cara matlab ataupun dengan cara manual. Tujuan perhitungan nilai eigen untuk mengurangi terjadinya pengulangan pengambilan data.
6. Tahap terhadap point 3(tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) perlu dilakukan pengecekan ulang untuk seluruh tingkat kriteria.

7. Tahapan selanjutnya adalah menghitung nilai eigen terhadap tabel matrik perbandingan berganda dengan cara mensintesis pilihan terhadap penentuan prioritas elemen peringkat hirarki terendah dengan harapan mampu mencapai tujuan yang diinginkan.
8. Mengecek nilai konsistensi hirarki. Apabila perhitungan hasil penilaian tidak lebih dari  $CR < 0,100$ . Penilaian tersebut dianggap tidak valid dan perlu dilakukan penilaian kembali.

### 2.12 Teori Gravitasi

Teori gravitasi dikenalkan oleh seorang ilmuwan fisika yaitu Sir Issac Newton. Teori gravitasi memberikan gambaran tentang dua buah benda yang mempunyai massa tertentu akan mempunyai gaya tarik menarik diantara keduanya yang sering disebut gaya gravitasi, teori gravitasi merupakan kekuatan gaya tarik menarik dengan dua benda yang berbanding lurus dengan hasil kedua massa benda. Dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak di antara kedua benda. Gravitasi ditetapkan oleh pakar ahli geografis dengan melakukan perhitungan kekuatan interaksi keruangan diantara dua wilayah atau lebih (Hartono,2007)

Relly berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Teori gravitasi ini dapat digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh interaksi antar wilayah yang berdekatan secara kuantitatif, dengan asumsi bahwa suatu wilayah sebagai benda dan jumlah

penduduk dari wilayah yang bersangkutan sebagai massannya. Untuk rumus mencari interaksi wilayah dengan analisis gravitasi dengan rumus (Nainggolan, 2013) :

$$I = \frac{P_1 \times P_2}{J^2_{12}}$$

Keterangan : I : interaksi

P1 : penduduk wilayah 1

P2 : penduduk wilayah 2

J<sup>2</sup><sub>12</sub> : Jarak wilayah 1 dan jarak wilayah 2

Besarnya kekuatan interaksi dapat diwujudkan dalam bentuk besarnya perpindahan atau transportasi dan komunikasi antara dua wilayah. Wujud dari perpindahan tersebut dapat berbentuk orang, barang, jasa, ataupun berupa informasi (Hartono, 2007). Relly melakukan perhitungan interaksi antar wilayah dengan mencari formula berdasarkan kondisi eksisting wilayah. Berikut untuk melakukan perbandingan interaksi wilayah kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut (Habib, 2016) :

1. Melakukan penilaian secara bersamaan dengan melihatseluruh aspek yang menjadi perkembangan pada suatu wilayah.
2. Memiliki kondisi topografi yang relatif sama .
3. Wilayah harus memiliki hubungan sarana dan prasarana transportasi yang relatif sama untuk mendukung persyaratan formula perbandingan interaksi antar wilayah.

### 2.13 Teori Titik Henti

Teori titik henti adalah teori lanjutan dari teori analisis gravitasi. Teori titik henti memberikan gambaran terkait penilaian garis batas posisi yang memisahkan wilayah dengan jumlah dan komposisi penduduk. penempatan lokasi pusat pelayanan masyarakat ataupun lokasi industri bisa menggunakan analisis titik henti dengan tujuan memperkirakan garis batas penempatan terhadap lokasi tersebut. (Habib, 2016).

Penentuan garis batas pada suatu wilayah diharapkan menguntungkan masyarakat. Berdasarkan teori titik henti berbanding lurus terhadap lokasi yang memiliki pusat peredaran ataupun pelayanan sosial. Sedangkan teori titik henti berbanding terbalik dengan wilayah satu ditambah akar kaudrat jumlah penduduk dari kota ataupun wilayah yang penduduknya lebih besar dibagi jumlah penduduk kota yang lebih sedikit penduduknya (Habib, 2016).

Model titik henti merupakan model yang diperlukan di dalam proses perencanaan pembangunan wilayah, karena model gravitasi dan model titik henti dimanfaatkan sebagai pertimbangan terhadap penentuan faktor lokasi di dalam proses perencanaan pusat – pusat pelayanan , pusat perdagangan, perkantoran pemerintah, fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan pelayanan suatu wilayah (Habib,2016). Berikut rumus dalam analisis titik henti (Muta'ali,2015) :

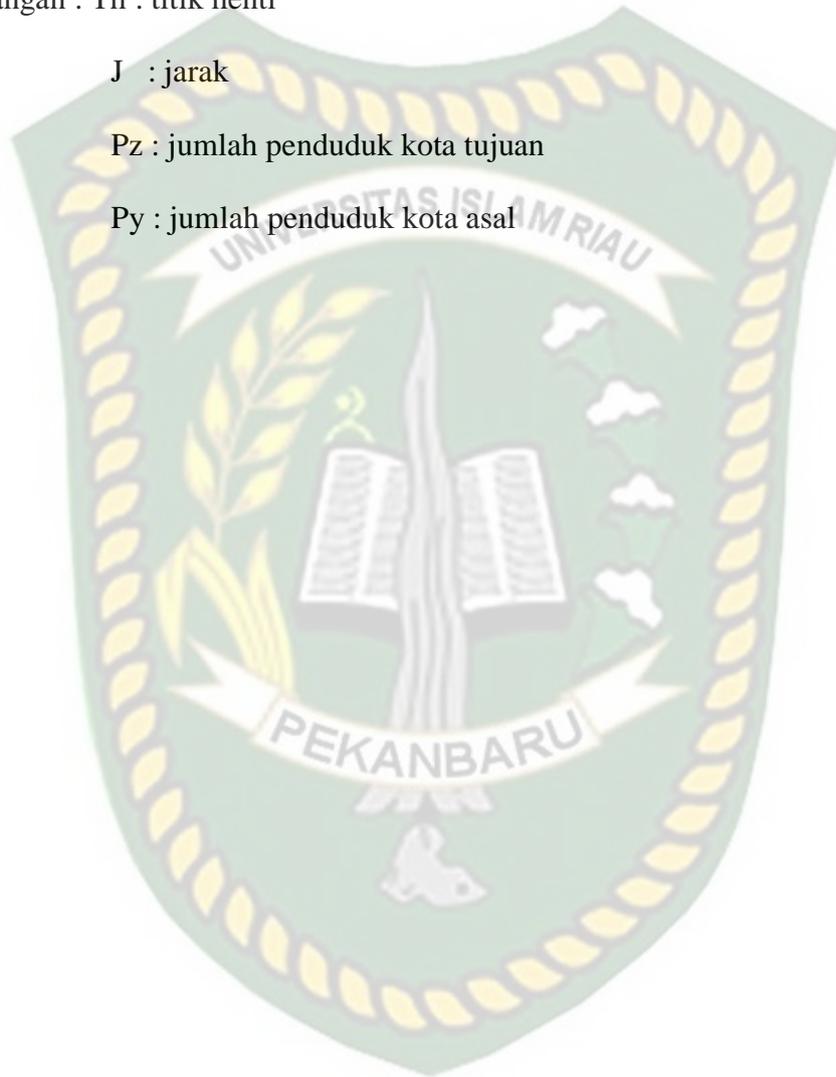
$$Th = \frac{J}{1 + \sqrt{\frac{Pz}{Py}}}$$

Keterangan : Th : titik henti

J : jarak

Pz : jumlah penduduk kota tujuan

Py : jumlah penduduk kota asal



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## 2.14 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variable	Hasil
1	Sasya Danastri (2011) Skripsi	Analisis Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru Di Kecamatan Harjamukti, Cirebon Selatan	Analisis Basis Ekonomi Dengan Metode Langsung, Analisis Gravitasi, Analisis Skalogram, Metode Overlay	Kekuatan Interaksi, Ketersediaan Fasilitas, Potensi Ekonomi	Hasil yang didapatkan didalam penentuan pusat pertumbuhan di Kecamatan Harjamukti adalah Kelurahan Kecapi. Kelurahan Kecapi memiliki potensi yang sangat besar menjadi pusat pertumbuhan dilihat dari kelengkapan fasilitasnya. Kelurahan kalijaga mempunyai potensi sebagai pusat pertumbuhan terhadap pelayanan pemerintahan. Kecamatan Harjamukti berpotensi sebagai sebagai pusat pertumbuhan pusat pelayanan perdagangan dan memiliki wilayah dengan lahan yang mampu dimanfaatkan sebagai lahan peternakan. Kelurahan larangan merupakan kelurahan yang mempunyai potensi sebagai pusat pertumbuhan dengan pusat pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan permukiman. Dan kelurahan yang berpotensi sebagai pusat pelayanan yaitu kelurahan argasurya dengan potensi lahan yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan untuk perkebunan dan peternakan
2	Luthfi Muta'ali (2003) Jurnal	Studi Penentuan Desa – Desa Pusat Pertumbuhan Di Provinsi Yogyakarta	Analisis Gutman, Scalogram, Indeks Sentralitas, LQ (Location Quotient) dan Analisis Statistik Korelasi Tata Jenjang Spearman	Jarak, Fasilitas Jalan, Fasilitas Sosial, Fasilitas Ekonomi, Tenaga Kerja Menurut Sembilan Sektor	Hasil penelitian menunjukkan aksesibilitas di desa Yogyakarta memiliki lokasi yang cukup baik, system hierarki pelayanan menunjukkan gejala primasi atau kesenjangan. Basis perekonomian berada di sektor pertanian dengan dukungan sektor jasa, perdagangan dan industri. Desa pusat pertumbuhan merupakan ibukota kabupaten.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variable	Hasil
3.	Ade Wahyudi (2013) Skripsi	Analisis Hirarki Kota dan Alternatif Pengembangan Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru	Analisis Skalogram, Analisis Indeks Sentralitas, Uji Reproduksibilitas, Uji Skalabilitas dan AHP ( <i>Analitycal Hierarchy Process</i> )	Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Sarana Perekonomian, Sarana Peribadatan, Fasilitas Ekonomi, Fasilitas Sosial	Skala Pelayanan Regional Berada Di Kecamatan Kota Pekanbaru, Skala Pelayanan Kota Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Limahpuluh, Kecamatan Rumbai, Skala Pelayanan Lingkungan Kecamatan Maroyan Damai, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Sail Dan Kecamatan Rumbai Pesisir. AHP aksesibilitas dengan bobot 0,341%, sumber daya dengan bobot 0,239 %, prasarana dan sarana dengan bobot 0,183%, investasi dengan bobot 0,168%, visi dan misi dengan bobot 0,165%, kebijakan dan peraturan intensitas pola ruang dengan bobot 0,156%, sumber pembiayaan dengan bobot 0,083%, kerjasama antar stakeholder dengan bobot 0,071%.
4	Yarman Gulo (2015) Jurnal	Identifikasi Pusat – Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias	Analisis Yang Digunakan Analisis Skalogram dan Analisis Gravitasi	Variabel Fasilitas Ekonomi, Fasilitas Sosial, Fasilitas Pemerintahan, Jarak Antar Wilayah dan Jumlah Penduduk	Menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan utama di Kabupaten Nias adalah Kecamatan Gido, pusat pertumbuhan kedua,yaitu Kecamatan Idanogawo, dan pusat pertumbuhan ketiga adalah Kecamatan Botomuzoi. Kecamatan Somolo - molo dan Kecamatan Ma'u merupakan daerah hinterland dari Kecamatan Gido.
5	Ermawati (2010) Skripsi	Analisis Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Karang Anyar	Analisis Scalogram, Indeks Sentralitas, Analsis Gravitasi, Tipologi Klassen dan Location Qoutient (LQ)	Fasilitas, Jarak Antar Wilayah, Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita	Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Karang Anyar yaitu Kecamatan Karang Anyar, Kecamatan Jaten, Kecamatan Tasikmadu, Kecamatan Colomadu, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Gondang Rejo.

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variable	Hasil
6	Puji Astuti (2004) Thesis	Studi Pola Pergerakan Mengkonsumsi Fasilitas Sosial Di Kawasan Pinggiran Kota Pekanbaru	Analisis Deskriptif	Fasilitas Sosial	Kawasan Pinggiran Kota Pekanbaru Tipe I: Kawasan Pinggiran yang terletak di Bagian Barat Daya dan Selatan Kota Pekanbaru, yaitu Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Sidomulyo Timur. Kawasan Pinggiran Kota Pekanbaru Tipe II: Kawasan Pinggiran yang terletak di Bagian Tenggara Kota Pekanbaru, yaitu Kelurahan Kulim dan Kelurahan Sail. Kawasan Pinggiran Kota Pekanbaru Tipe III: Kawasan Pinggiran Yang Terletak Di Bagian Utara Kota Pekanbaru, yaitu Kelurahan Muara Fajar dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura.
8.	Febby Asteriani (2011) Jurnal	Preferensi Penghuni Perumahan Di Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Lokasi Perumahan	Pendekatan Deduktif Dengan Metode Analisis Kuantitatif	Perumahan di Kota Pekanbaru	Lima kecamatan dengan diambil responden 182 penghuni perumahan. Semua faktor pemilihan lokasi perumahan yang terdapat dalam tinjauan pustaka tersebut memang merupakan faktor yang dianggap menentukan oleh para penghuni perumahan penelitian dalam melakukan pemilihan terhadap lokasi perumahan, tetapi tidak semua variabel atau sub faktor dari faktor tersebut dianggap menentukan
9	Gustian, Sugeng Wiyono, Febby Asteriani (2016) Jurnal	Preferensi Pengguna Ruko Dalam Melakukan Pemilihan Terhadap Lokasi Ruko Di Kota Pekanbaru	Pendekatan Deduktif Dengan Metode Analisis Kuantitatif	Kelengkapan Prasarana, Kondisi Fisik Wilayah, Kependudukan, Kelengkapan Fasilitas Perdagangan, Faktor Lingkungan,	198 Responden, hanya 184 responden yang berhasil dalam penelitian lokasi ruko di 7 kecamatan di Kota Pekanbaru. Faktor yang terkandung dalam teori, memang merupakan faktor-faktor yang dianggap menentukan oleh pengguna dalam melakukan pemilihan terhadap lokasi ruko. namun tidak semua sub faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang dianggap menentukan oleh pengguna ruko. Dalam menilai faktor-faktor pemilihan lokasi ruko tersebut, secara garis besar terjadi persamaan

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variable	Hasil
				Keterkaitan Spasial, Aksesibilitas, Kondisi Jalan, Transportasi, Kesehatan, Kondisi Sosial Ekonomi Dan Produk.	preferensi diantara pengguna ruko. Faktor yang sangat menentukan yaitu tersediannya jaringan listrik, sangatlah penting karena merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan hidup yang dimanfaatkan untuk sumber energi dalam menunjang berbagai macam aktivitas manusia.
10.	Yoghi Kurniawan, Febby Asteriani, Puji Astuti (2016) Jurnal	Faktor Analisis untuk menentukan lokasi toko modern di kota pekanbaru	Pendekatan Deduktif Dengan Metode Analisis Kuantitatif	Aksesibilitas, Populasi, Harga Tanah, Sewa Gedung, Jumlah Dan Ukuran Pesaing, Kondisi Lahan, Infrastruktur, Kondisi Ruang	11 Kecamatan Di Kota Pekanbaru yang menjadi sampel diketahui bahwa dari 8 (delapan) variabel untuk menentukan pemilihan lokasi toko modern, hanya 4 variabel yang menjadi penentuan lokasi toko modern. Faktor dari variabel tersebut adalah faktor jumlah dan kepadatan penduduk, faktor ketersediaan jalur pejalan kaki, jenis tanah dan ketersediaan jaringan transportasi. Faktor utama yang menjadi variabel dalam pemilihan lokasi toko modern adalah faktor (jumlah dan kepadatan penduduk).
11.	Makesure Chinyamakobu (2018) Jurnal	The Challenges And Prospects Of Murewa Growth Point, Zimbabwe	Kuesioner, Wawancara, Observasi Lapangan, dan Dokumen	Sektor Potensi Ekonomi	Penelitian ini adalah penelitian tentang tantangan dan prospek Murewa, Zimbabwe Murewa memiliki sejumlah industri, banyak toko, sekolah, pusat pelatihan dan lebih banyak pusat layanan kesehatan telah dibangun. Namun perkembangan industri gagal memicu pembangunan ekonomi. Tidak ada tautan antara kemajuan di Murewa dan sumber daya di pedalaman desa – kota, migrasi besar-besaran juga ditemukan di Murewa dan ada kesenjangan yang meningkat antara inti dan pinggiran. Para peneliti juga menemukan bahwa walaupun memiliki banyak

No	Nama Peneliti	Judul	Metode	Variable	Hasil
					prospek pengembangan, Murewa menghadapi sejumlah tantangan. Di antara yang lainnya, ini termasuk kurangnya modal, infrastruktur yang buruk, transportasi yang buruk, listrik, kurangnya informasi dan pengetahuan tentang penggunaan teknologi

Sumber: Hasil Analisis, 2020



## 2.15 Sintesa Teori

**Tabel 2.3 Sintesa Teori**

No	Teori	Sumber	Keterangan
1.	Teori Pusat Pertumbuhan	Sjafrizal (2008)	Pusat pertumbuhan sebagai perangkat industri – industri yang sedang mengalami perkembangan dan berlokasi di suatu tempat daerah perkotaan dan mendorong perkembangan lanjut dari kegiatan ekonomi melalui daerah pengaruhnya.
		Robinson Tarigan (2005)	Secara konseptual, pusat pertumbuhan ( <i>growth pole</i> ) dapat diartikan dengan dua cara. 1. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur – unsur yang bersifat dinamis sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar (wilayah belakangnya). 2. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik ( <i>pole of attraction</i> ) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan penduduk datang memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinannya tidak ada interaksi antara usaha – usaha tersebut.
		Friedman dalam Harahap (2009)	Pada skala regional dikenal tiga orde pusat pertumbuhan, yaitu 1. Pusat pertumbuhan primer (utama) Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama orde satu ialah pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang pusat pertumbuhan lain yang lebih bawah tingkatannya. 2. Pusat pertumbuhan sekunder (kedua) Pusat pertumbuhan yang menjadi sub daerah. Pusat pertumbuhan sekunder diciptakan dengan tujuan demi memajukan sub daerah yang jauh dari lokasi pusat pertumbuhan. 3. Pusat pertumbuhan tersier (ketiga) Pusat pertumbuhan yang mempunyai wilayah dengan pengaruh terhadap kawasan dibelakangnya.
2.	Wilayah	Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007	Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Secara konseptual wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu :

No	Teori	Sumber	Keterangan
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah homogen Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek atau kriteria mempunyai sifat – sifat atau ciri - ciri yang relatif sama.</li> <li>2. Wilayah Nodal Wilayah Nodal merupakan wilayah yang mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan wilayah belakangnya (<i>hinterland</i>).</li> <li>3. Wilayah administratif Wilayah administratif adalah wilayah yang batas - batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti: provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan.</li> <li>4. Wilayah perencanaan Wilayah perencanaan adalah wilayah yang batasannya didasarkan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan.</li> </ol>
3.	Wilayah Perkotaan	Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007	Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan dan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
4.	Pengembangan Wilayah	Adisasmita (2013)	Pengembangan wilayah merupakan kekuatan pembangunan terhadap suatu wilayah dengan tujuan mengesjahterakan masyarakat dan memanfaatkan berbagai sumber daya, prasarana fisik secara efektif, optimal dan berkelanjutan.
		Rustiadi (2006)	Pengembangan wilayah sistem top down memiliki tiga konsep pengembangan kawasan. (1) konsep kutub pertumbuhan ( <i>growth poles</i> ). (2) integrasi atau keterpaduan fungsional – spasial. (3) pendekatan berdasarkan <i>desentralized territorial</i> .
		Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman (2002)	Prinsip – prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai <i>growth center</i>, pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus memperhatikan sebaran atau pengaruh (<i>spread effect</i>) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.</li> <li>2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.</li> <li>3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah - daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesejahteraan.</li> </ol>

No	Teori	Sumber	Keterangan
			4. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.
		Friedman dan Alonso (2008)	Komponen – komponen yang harus diperhatikan di dalam pengembangan wilayah adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya lokal.</li> <li>2. Pasar</li> <li>3. Tenaga kerja</li> <li>4. Investasi</li> <li>5. Kemampuan pemerintah</li> <li>6. Transportasi dan Komunikasi</li> <li>7. Teknologi.</li> </ol>
5.	Hirarki wilayah	Christaller Losch	Dua konsep pokok yang mendasari teori pusat pelayanan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The range of good</i>, yaitu jarak tempuh yang masih dapat ditolerir untuk suatu jenis barang atau pelayanan tertentu.            Disamping unsur jarak, penentuan pilihan oleh pengguna dipengaruhi juga oleh jenis, kualitas, dan harga barang atau pelayanan yang ditawarkan.</li> <li>2. <i>The threshold value</i>, yaitu jumlah penduduk atau sumber daya minimum yang dibutuhkan untuk dapat menciptakan permintaan yang cukup atas barang dan pelayanan yang ditawarkan.</li> </ol> <p>Pusat – pusat pelayanan menurut jangkauan pelayanan dapat dibedakan menjadi empat bagian, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hirarki I, Pusat Regional, merupakan simpul yang menunjukkan sarana dan prasarana yang terlengkap, pusat perekonomian berdasarkan primata dan memiliki radius pelayanan terluas dengan jumlah penduduk yang terlayani cukup besar.</li> <li>2. Hirarki II, Pusat Distrik, mempunyai hirarki yang lebih rendah dibandingkan pusat regional. Pusat distrik menjadi pusat yang menghubungkan daerah di sekitarnya dengan pusat kota regional.</li> <li>3. Hirarki III, Pusat Sub Distrik yang menghubungkan pusat lokal dengan daerah yang memiliki tingkatan hirarki lebih tinggi dibandingkan dari dua hirarki di atasnya.</li> <li>4. Hirarki IV, Pusat Lokal dengan radius jangkauan pelayanan terendah. Bentuk pusat pelayanan di cirikan dengan tipe yang periodik.</li> </ol>

No	Teori	Sumber	Keterangan
6.	Interaksi Antar Wilayah	Respati dalam Farida 2017	Interaksi antar wilayah merupakan hubungan timbal balik yang mempunyai pengaruh terhadap suatu wilayah sehingga memberikan gejala atau dampak permasalahan baru. Interaksi sangat dipengaruhi terhadap faktor wilayah yang saling melengkapi, adanya kesempatan untuk melakukan investasi dan memiliki kemudahan didalam pemindahan barang pada suatu ruang.
7.	Teori Tempat Sentral	Hartono (2007)	Konsep dasar teori tempat sentral menurut Christaller sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Population threshold</i> yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk melancarkan dan kesinambungan unit.</li> <li>2. <i>Range</i> (jangkauan) yaitu jarak maksimum yang diperlukan untuk ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dari tempat pusat.</li> </ol> Kota sebagai pusat pelayanan diharapkan memiliki fasilitas pelayanan seperti : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat dan pertokoan sebagai fokus point dari suatu kota.</li> <li>2. Sarana dan prasarana transportasi.</li> <li>3. Tempat rekreasi dan olahraga.</li> <li>4. Sarana pendidikan, kesehatan, obyek wisata.</li> </ol>
8.	Fasilitas Pelayanan Publik	Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009	Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik
		SNI 03-1733-2004	Kriteria Penentuan Fasilitas Pelayanan Publik Lingkungan Permukiman: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan</li> <li>2. Kesehatan</li> <li>3. Peribadatan</li> <li>4. Perdagangan dan Jasa</li> <li>5. Pemerintah dan Pelayanan Umum</li> <li>6. Rekreasi dan Kebudayaan</li> <li>7. Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga</li> </ol>
9.	<i>Metode Scalogram</i>	Muta'ali 2015	Teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fungsi fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi serta hirarki pusat pengembangan dan prasarana pembangunan

No	Teori	Sumber	Keterangan
10.	<i>Metode Indeks Sentralitas Marsall</i>	Muta'ali 2015	<i>Analisis indeks sentralitas</i> juga dimaksudkan untuk mengetahui struktur atau hirarki pusat – pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak jumlah fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman. Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu. <i>Indeks sentralitas</i> menunjukkan nilai strategis wilayah berdasarkan aspek lokasi geografis, dimana wilayah tersebut dicirikan dengan kemudahan akses dan banyaknya <i>link</i> dan simpul transportasi yang mengumpul pada wilayah tersebut.
11.	<i>Metode Analytical Hierarchy Proses (AHP)</i>	Azis dalam Tumada, 2012	<i>Metode Analytical Hierarchy Proses (AHP)</i> dirancang untuk memberikan kesempatan kepada seseorang yang mempunyai peranan penting di bidangnya untuk memberikan keputusan terhadap hasil persepsi keputusan penilaian terhadap suatu permasalahan sesuai dengan prosedur yang didesain dengan model objective – multikriteria. Prinsip dasar yang digunakan di dalam <i>Analytical Hierarchy Proses (AHP)</i> yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Decomposition</i></li> <li>2. <i>Comparative Judgement</i></li> <li>3. <i>Synthesis of Priority</i></li> <li>4. <i>Logical Consistency</i></li> </ol>
12.	Teori Gravitasi	W.J Reily	Teori gravitasi ini dapat digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh interaksi antar wilayah yang berdekatan secara kuantitatif, dengan asumsi bahwa suatu wilayah sebagai benda dan jumlah penduduk dari wilayah yang bersangkutan sebagai massanya.
13.	Teori Titik Henti	W.J Reily dalam Habib, 2016	Teori ini memberikan garis batas pada suatu wilayah dari dua kota atau wilayah dengan jumlah dan komposisi penduduk yang berbeda. Teori titik henti digunakan di dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah dengan tujuan memperkirakan penempatan lokasi terhadap fasilitas pelayanan , industri dan lainnya.

Sumber : Hasil Analisis, 2020

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018) mengatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu dengan cara rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal yang dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Empiris merupakan cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. (bedakan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang melarikan diri melalui paranormal) Sedangkan sistematis merupakan proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

#### 3.1 Pendekatan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu, metode kuantitatif, metode kualitatif dan metode kombinasi (Sugiyono, 2018) :

1. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai *metode positivistik* karena berlandaskan pada *filsafat positivism*. Metode ini sebagai mode alamiah atau *scientific* karena telah memenuhi kaidah - kaidah ilmiah yaitu konkrit atau empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka – angka dan analisis menggunakan statistik.
2. Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan *metode postpositivisme* karena berlandaskan pada *filsafat postpositivisme*. Metode ini disebut sebagai *metode artistic*, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukam di lapangan.
3. Metode kombinasi adalah penelitian yang berlandaskan *pragmatism* atau gabungan *positivism* dan *postpositivisme*. *Filsafat pragmatisme* memandang dunia atau realitas itu tidak merupakan satu kesatuan yang obsolut atau mutlak, tidak hanya menggunakan satu system filsafat dalam memandang relitas. Peneliti kombinasi dapat melakukan penelitian dengan metode kualitatif dan kuantitatif secara bersama - sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif.

Dalam metode penelitian terdapat dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan deduktif dan induktif (Sugiyono, 2018) :

1. Pendekatan deduktif

Pendekatan deduktif adalah pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan hipotesis dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Suatu hipotesis lahir dari sebuah teori, lalu hipotesis ini diuji dengan melakukan beberapa observasi. Hasil dari observasi ini akan dapat memberikan konfirmasi tentang sebuah teori yang semula dipakai untuk menghasilkan hipotesis. Langkah penelitian seperti ini biasa juga disebut pendekatan 'dari atas ke bawah'.

2. Pendekatan induktif

Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi. Suatu observasi yang dilakukan berkali-kali akan membentuk sebuah pola tertentu. Dari pola tersebut akan lahir hipotesis sementara atau hipotesis tentatif. Hipotesis yang terbentuk berasal dari pola pengamatan yang dilakukan. Setelah dilakukan berulang-ulang, barulah diperoleh sebuah teori. Langkah penelitian seperti ini disebut sebagai pendekatan 'dari bawah ke atas'.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deduktif, yang mana prosedurnya dimulai dari pembentukan dasar - dasar teori dan kemudian menentukan variabel-variabel yang akan diteliti dalam menganalisis penentuan pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru. Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi yaitu metode yang menggabungkan 2 (dua) metode yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dalam metode penelitian kombinasi maka metode penelitian kuantitatif dapat melengkapi metode kualitatif dan begitu pula sebaliknya.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau dengan luas wilayah  $\pm 632,26 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk sebanyak 1.117.359 jiwa. Dalam Penelitian ini yang menjadi wilayah penelitian adalah 12 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru

#### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan april 2020.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat. Jenis – jenis data menurut cara memperolehnya, antara lain data primer dan data sekunder (Sugiyono. 2018) :

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi dan lainnya.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi – studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip – arsip resmi.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data terbagi 2 (dua) yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari narasumber atau *stakeholder*. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen seperti dari sejumlah instansi dan literatur terkait (Sugiyono, 2018). Pengumpulan data primer dimaksudkan untuk mendukung data apa saja yang dibutuhkan terhadap sumber data primer. Berikut jenis dan sumber data primer (Sugiyono, 2018) :

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan di dalam penelitian ini berupa wawancara dengan sistem terstruktur. Proses wawancara yang dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada stakeholder ahli. Wawancara yang diberikan dalam bentuk kuesioner merupakan hasil dari analysis hierarchy

process (AHP). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini. Berikut tabel 3.2 sumber data primer untuk mendukung proses wawancara terstruktur.

**Tabel 3.2 Data Primer**

No	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Penentuan pembobotan kriteria penentuan pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru	Stakholder ahli	Wawancara terstruktur

*Sumber : Hasil Analisi, 2020*

Pengumpulan data sekunder dilaksanakan untuk mendukung hasil penelitian. Berikut jenis dan sumber data sekunder :

1. Instansi

Pada penelitian ini survei instansi dilakukan pada instansional yang memiliki relevansi dengan pembahasan seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lainnya.

2. Literatur

Studi literatur atau kepustakaan dilakukan dengan meninjau isi dari literatur yang bersangkutan dengan penelitian ini, di antaranya berupa buku, hasil penelitian, serta artikel di internet. Studi literatur dilakukan dengan membaca, merangkum dan kemudian menyimpulkan semua referensi tentang pusat - pusat pertumbuhan dalam suatu wilayah.

Adapun perolehan jenis dan sumber data sekunder secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini

**Tabel 3.3 Data Perolehan Data Sekunder**

No	Jenis Data	Sumber Data	Instansi Penyedia Data
1	RTRW Kota Pekanbaru	PERDA	Dinas PUPR Provinsi Riau
2	RTRW Provinsi Riau	PERDA	
3	Jumlah Fasilitas Ekonomi	Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Badan Pusat Statistik
4	Jumlah Fasilitas Pendidikan	Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Badan Pusat Statistik
5	Jumlah Fasilitas Peribadatan	Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Badan Pusat Statistik
6	Jumlah Fasilitas Kelembagaan	Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Badan Pusat Statistik
7	Jumlah Fasilitas Kesehatan	Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Badan Pusat Statistik
8	Jumlah Fasilitas Rekreasi Dan Kebudayaan	Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Badan Pusat Statistik
9	Jumlah Fasilitas Ruang Terbuka, Taman, dan Lapangan Olahraga	Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Badan Pusat Statistik
10	Jumlah Industri Besar, Industri Sedang dan Industri Kecil	Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Badan Pusat Statistik
11	Jalan	Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Badan Pusat Statistik
12	Listrik	Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Badan Pusat Statistik
13	Jaringan Telekomunikasi	Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Badan Pusat Statistik
14	Jumlah Penduduk	Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Badan Pusat Statistik
15	Jarak	Kecamatan Dalam Angka Tahun 2019	Badan Pusat Statistik

Sumber: Hasil Analisis, 2020

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya (triangulasi) (Sugiyono, 2018).

1. Observasi

Suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan ialah dengan melihat kondisi eksisting Kota Pekanbaru

2. Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Dalam penelitian ini kuesioner yang tertuang di dalam analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dengan responden yakni, pemerintah yang menjadi ahli dan mengetahui permasalahan di Kota Pekanbaru

3. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari

responden yang lebih mendalam. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan saat analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) sehingga wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara dalam bentuk kuesioner.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat peristiwa-peristiwa seperti, berbentuk tulisan , gambar , atau karya-karya dari seseorang.

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat peristiwa dengan tulisan dan pengambilan gambar. Dokumentasi dengan tulisan dengan cara pengumpulan data dengan menggunakan sumber – sumber dokumenter berupa literatur/referensi, laporan penelitian serupa, bahan seminar atau jurnal. Dokumen yang berbentuk gambar dengan cara pengambilan gambar atau foto dengan melihat kondisi eksisting Kota Pekanbaru.

### 3.5 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan dan alat dalam penelitian yang akan digunakan pada proses pengambilan data antara lain:

1. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan data dan hasil pengamatan (observasi lapangan)
2. Alat tulis, digunakan untuk mencatat dan menulis data.
3. Petunjuk waktu, digunakan untuk mengetahui waktu pengambilan data,

4. Laptop, digunakan untuk mengolah data.

### 3.6 Populasi dan sampel

Dalam penelitian kuantitatif, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudianditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai dan sebagainya. (Sugiyono, 2018)

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ketempat lain atau pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi pada kasus yang dipelajari (Sugiyono, 2018).

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipasi, informan, temandan guru dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang – orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena, pengambilan sampel tidak diambil (Sugiono, 2018).

Dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi, karena penentuan sumber data kepada orang yang mengetahui tentang situasi dalam wilayah penelitian.

### 3.7 Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan, yaitu *Probability sampling* dan *Non probability sampling* (Sugiono, 2018) :

1. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, *sampling area (cluster) sampling* (sampling menurut daerah).
2. *Non – probability sampling* adalah teknik pengumpulan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sisteamtis*, *kuota*, *aksidental*, *purposive*, *jenuh* dan *snowball*

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial

yang diteliti (Sugiono, 2018). Sebelum proses wawancara terlebih dahulu ditentukan *stakeholder* yang ingin dituju. Menurut Michael, dkk (2010) *stakeholder* adalah siapa saja yang merasa memiliki kepentingan dalam keputusan/ kebijakan karena mereka akan terpengaruh oleh keputusan/ kebijakan tersebut atau karena mereka peduli dengan output keputusan/ kebijakan tersebut. Berikut adalah tabel 3.4 *stakeholders* yang didapat untuk melakukan wawancara berupa kuesioner pada teknik analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

**Tabel 3.4 Stakeholders dalam Analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP)**

No	Komponen	Stakeholder	Jumlah Stakeholder	
1.	Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru	Kasi Penataan Ruang	1
			Kasi Pemanfaatan Ruang	1
		Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana	1
			Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1
			Kepala Sub Bidang Ekonomi	1
		Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	1
			Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar Tematik	1
<b>Total</b>			<b>7</b>	

Sumber : Hasil Analisis, 2020

### **3.8 Teknik Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kombinasi yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis kombinasi diperlukan untuk mengidentifikasi calon lokasi yang layak menjadi pusat pertumbuhan dan hinterland-nya. Teknik analisis yang akan digunakan haruslah suatu teknik yang dapat mengorganisasikan data yang telah terkumpul menjadi suatu rumusan informasi yang dapat menyelesaikan permasalahan. Berikut ini alat analisis yang akan digunakan untuk menjawab seluruh sasaran dalam penelitian ini.

#### **3.8.1 Mengidentifikasi Lokasi Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan dan Prioritas Keputusan *Stakeholder***

Dalam mengidentifikasi lokasi pusat- pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan dan prioritas keputusan *stakeholder* menggunakan *Analisis Scalogram*, *Analisis Index Sentralitas Marsal* dan *Analytical Hierarchy Process*(AHP).

##### **3.8.1.1 Analisis Scalogram**

*Analisis scalogram* adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fungsi fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta hirarki pusat pengembangan dan prsarana pembangunan. *Analisis scalogram* bertujuan untuk memberikan hirarki atau urutan peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit prasarana pembangunan dari yang paling

banyak sampai paling sedikit, sehingga dapat ditentukan wilayah pusat pengembangannya. Semakin tinggi persentase kelengkapan fasilitas yang dimiliki suatu wilayah maka semakin tinggi kemampuan pelayanan wilayah tersebut (Muta'ali, 2015).

Tahapan – tahapan *metode scalogram* disusun hirarkinya berdasarkan tingkat kecamatan – kecamatan dalam suatu kota dari urutan yang tertinggi hingga urutan terendah yaitu sebagai berikut (Budiharsono dalam Wahyudi, 2013) :

1. Menyusun kecamatan – kecamatan berdasarkan urutan peringkat jumlah penduduk
2. Kecamatan tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah fasilitas yang ada di wilayah tersebut
3. Fasilitas – fasilitas disusun berdasarkan jumlah yang memiliki fasilitas tersebut
4. Memberikan peringkat terhadap jenis fasilitas yang disusun urutannya berdasarkan jumlah total unit fasilitas.
5. Menyusun peringkat kecamatan kemudian di urutkan berdasarkan jumlah total fasilitas yang dimiliki masing – masing wilayah.

Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah dengan mengukur tingkat kelengkapan fasilitas sosial ekonomi dengan menggunakan ukuran nominal (0) untuk menyatakan fasilitas tidak ada, dan (1) untuk menyatakan

fasilitas yang ada. Berikut tabel 3.5 tata urutan pembuatan skalogram berdasarkan fungsi fasilitas pelayanan (Muta'ali, 2015).

**Tabel 3.5 Tata Urutan Pembuatan Skalogram Berdasarkan Fungsi Fasilitas Pelayanan**

No	Wilayah	Jumlah penduduk	Fungsi (Fasilitas Pelayanan)										Jumlah fasilitas	Kelengkapan fungsi (%)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	A	53.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100
2.	B	47.000	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8	80	
3.	C	44.000	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	7	70	
4.	D	32.000	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	60	
5.	E	21.000	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	50	
6.	F	18.000	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	40	
7.	G	11.000	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	30	
8.	H	9.000	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	30	
TF			8	8	8	6	5	4	2	2	2	1	46	-	

Sumber : Muta'ali, 2015

Setelah didapatkan hasil perhitungan ketersediaan fasilitas maka dihitunglah nilai error dari hasil *analisis scalogram*. Setelah didapatkan nilai error maka diuji nilai kelayakan dari hasil *analisis scalogram*. Untuk menghitung nilai kelayakan dari hasil *analisis scalogram* maka dicari nilai *coefisien of reproducibility (COR)* dengan rumus (Bruce, 2018):

$$\frac{1 - e}{JF \times JD}$$

Keterangan = e = jumlah kesalahan atau error

JF = jumlah fasilitas yang diteliti

JD = jumlah wilayah yang diteliti

Dalam hal ini koefisien dianggap layak apabila bernilai 0,9 – 1. Jika nilai kurang dari 0,9 maka perlu perhitungan ulang karena data disebut tidak valid.

### 3.8.1.2 Analisis Index Sentralitas Marsall

Analisis *Index Sentralitas Marsall* merupakan lanjutan dari analisis scalogram. Analisis index sentralitas marsall dimaksudkan untuk mengetahui struktur atau hirarki pusat – pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak jumlah fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang terkalani serta berapa frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman. Metoda ini melakukan dua jenis pembobotan yaitu :

1. Pembobotan terhadap jenis fasilitas yang disebut sebagai nilai senralitas gabungan. Dalam pembobotan ini digunakan asumsi bahwa nilai sentralitas gabungan setiap jenis fasilitas dianggap sama. Nilai dapat dipilih sembarang dan disesuaikan dengan jumlah unit fasilitas terbesar, bisa 100 atau jika unitnya dapat 1000. Dalam contoh berikut, nilai senralitas gabungan dipilih 100
2. Pembobotan terhadap jumlah fasilitas (C) yang disebut sebagai nilai sentralias fasilitas, dengan rumus sebagai berikut: (Muta'ali 2015)

$$C = \frac{x}{X}$$

Keterangan :

C = bobot atribut fungsi x

x = Nilai Sentralitas gabungan =100 (contoh)

X = jumlah total atribut dalam sistem

Untuk lebih jelasnya tabel perhitungan pembobotan dalam penentuan pusat – pusat pertumbuhan dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini. berikut tabel 3.6 penentuan bobot fungsi fasilitas pelayanan.

**Tabel 3.6 Penentuan Bobot Fungsi Fasilitas Pelayanan**

No	Wilayah	Jumlah penduduk	Fungsi (Fasilitas Pelayanan)										Jumlah fasilitas	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	A	53.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2	B	47.000	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	8	
3	C	44.000	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	7	
4	D	32.000	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	6	
5	E	21.000	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	5	
6	F	18.000	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	
7	G	11.000	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
8	H	9.000	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	
<b>TF</b>			8	8	8	6	5	4	2	2	2	1	46	
<b>TS</b>			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	
<b>BF</b>			2,5	2,5	2,5	6,67	20	25	50	50	50	100	-	

Sumber: Muta'ali, 2015

Keterangan : TF = Total Fungsi  
 TS = Jumlah Sentralitas  
 BF = Bobot Fungsi

Berdasarkan tabel 3.6 hasil pembobotan fungsi fasilitas pelayanan diatas, maka selanjutnya dicari terlebih dahulu nilai orde dan nilai interval. Untuk memperoleh nilai orde maka digunakan rumus sturgess, yaitu (Farizal, dkk, 2011)

$$1 + 3.3 \log (n)$$

Keterangan : n = Banyaknya kecamatan

Setelah didapatkan nilai orde, dihitung nilai interval untuk menentukan hirarki wilayah. Berikut rumus untuk mencari nilai interval (Farizal, dkk, 2011) :

$$\frac{Max - Min}{k}$$

Keterangan : Max = nilai tertinggi pembobotan

Min = nilai terendah pembobotan

k = nilai orde

Hasil dari perhitungan analisis nilai orde dan nilai interval didapatkan hasil penentuana indeks sentralitas marsall dan hirarki wilayah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini. Berikut tabel 3.7 penentuan *indeks sentralitas marsall* dan hirarki wilayah.

**Tabel 3.7 Penentuan Indeks Sentralitas Marsal dan Hirarki Wilayah**

No	Wilayah	Jumlah penduduk	Fungsi (Fasilitas Pelayanan) Terbobot = perkalian jumlah fungsi dan bobot tinggi										IS	H
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	A	53.000	2,5	2,5	2,5	6,67	20	25	50	50	50	100	349	I
2	B	47.000	2,5	2,5	2,5	6,67	20	25	50	0	50	0	199	II
3	C	44.000	2,5	2,5	2,5	6,67	20	25	0	50	0	0	149	II
4	D	32.000	2,5	2,5	2,5	6,67	20	25	0	0	0	0	99	III
5	E	21.000	2,5	2,5	2,5	6,67	20	0	0	0	0	0	74	III
6	F	18.000	2,5	2,5	2,5	6,67	20	0	0	0	0	0	54	III
7	G	11.000	2,5	2,5	2,5	0	0	0	0	0	0	0	38	III
8	H	9.000	2,5	2,5	2,5	0	0	0	0	0	0	0	38	III
<b>TFT</b>			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

Sumber: Muta'ali, 2015

Keterangan : TFT = Total Fungsi Terbobot

IS = Index Sentralitas

H = Hirarki

### 3.8.1.3 Analytical Hierarchy Process (AHP)

Untuk menganalisis prioritas penentuan pusat- pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru dalam pengembangan wilayah, dirumuskan berdasarkan persepsi pelaku yang ahli dibidangnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode

*Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Responden yang dimaksud dalam penelitian AHP ini meliputi para stakeholder antara lain :

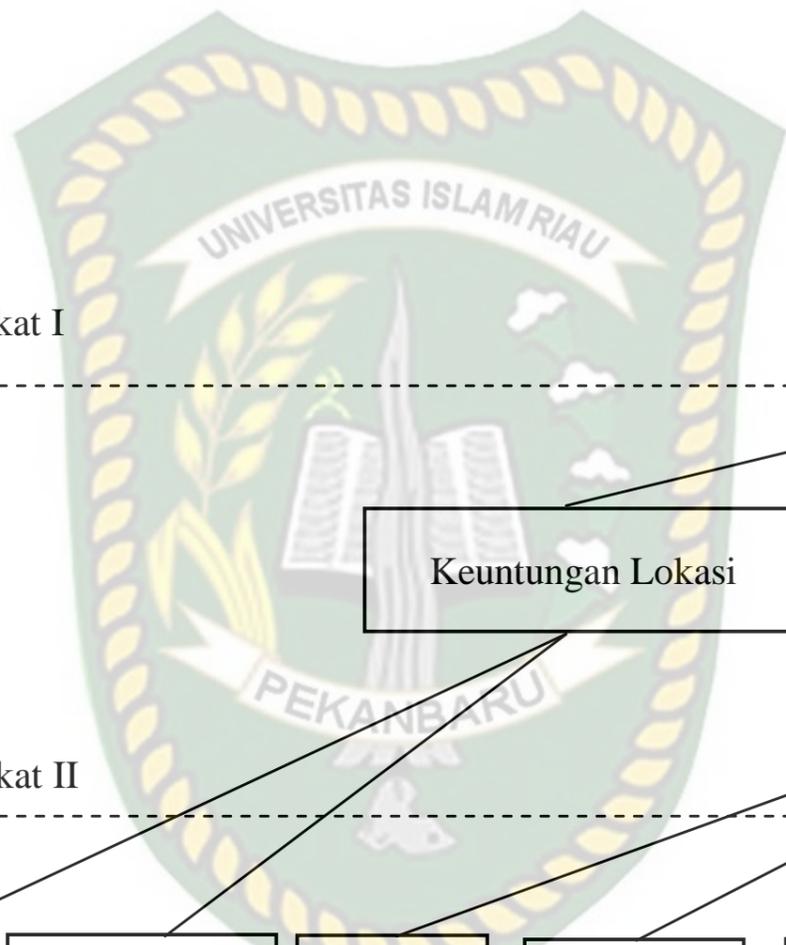
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru  
Pemerintah dalam hal ini yaitu Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, dan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Ruang. Responden ini dipilih dengan pertimbangan pengalaman beliau sebagai instansi yang memegang peranan penting dalam penataan ruang dalam pengembangan wilayah.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru  
Pemerintah dalam hal ini Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kepala Sub Bidang Ekonomi. Responden ini dipilih dengan pertimbangan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan mengetahui bagaimana potensi dalam pengembangan wilayah di Kota Pekanbaru
3. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru  
Pemerintah dalam hal ini yaitu Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, dan Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar Tematik. Dalam hal ini mitra pemerintah BPN sebagai pertimbangan bahwa responden ini dianggap banyak mengetahui tentang berbagai macam karakteristik wilayah di Kota Pekanbaru sehingga dianggap relevan untuk memberikan berbagai masukan dan menjawab penelitian tentang penentuan pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru

*Analytical Hierarchy Process* atau yang lebih sering disebut dengan AHP ini merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok - kelompok dan mengaturnya ke dalam suatu hirarki. Berikut ini adalah penyusunan hirarki penelitian dalam AHP, dimana Aspek dan kriteria dalam hirarki ini dilakukan dengan merumuskan berbagai macam strategi yang terkait dengan penentuan pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru. Berikut gambar 3.1 pohon *Analytical Hierarchy Process* dalam penentuan pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Penentuan Pusat –Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru

Kriteria Tingkat I

Keuntungan Lokasi

Potensi Ekonomi

Potensi Lingkungan

Fasilitas

Kriteria Tingkat II

Jarak

Jumlah Penduduk

Sektor Primer

Sektor Sekunder

Sektor Tersier

Daya Dukung Lingkungan

Kesesuaian Lahan

Fasilitas Ekonomi

Fasilitas Pendidikan

Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Peribadatan

Alternatif

Kecamatan A

Kecamatan B

Cara menentukan susunan prioritas elemen pada AHP dilakukan dengan menyusun perbandingan berpasangan yaitu membandingkan dalam bentuk berpasangan seluruh elemen untuk setiap sub hirarki, seperti pada tabel 3.1. Perbandingan tersebut ditransformasikan dalam bentuk matriks. Contoh, terdapat  $n$  objek yang dinotasikan dengan  $(A_1, A_2, A_n)$  yang akan dinilai berdasarkan pada nilai tingkat kepentingannya antara lain  $A_i$  dan  $A_j$  yang dipresentasikan dalam matriks *Pair-wise Comparison*.

**Tabel 3.8 Contoh Formula Matriks *Pair-wise Comparison*.**

	A1	A2	...	A <sub>n</sub>
A1	$a_{11}$	$a_{12}$	...	$a_{1n}$
A2	$a_{21}$	$a_{22}$	...	$a_{2n}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
A <sub>n</sub>	$a_{n1}$	$a_{n2}$	...	$a_{nn}$

Sumber : Tumada, 2012

Nilai  $a_{11}$  adalah nilai perbandingan elemenn  $A_1$  (baris) terhadap  $A_1$  (kolom) yang menyatakan hubungan:

1. Seberapa jauh tingkat kepentingan  $A_1$  (baris) terhadap kriteria dibandingkan dengan  $A_1$  (kolom)
2. Seberapa jauh dominasi  $A_1$  (baris) terhadap  $A_1$  (kolom) atau
3. Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada  $A_1$  (baris) dibandingkan dengan  $A_1$  (kolom).

Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh perbandingan prioritas faktor/kriteria pembandingberpasangan dalam AHP tersebut diperoleh pada tabel 3.9 berikut ini:

**Tabel 3.9 Nilai Numerik Prioritas Faktor/Kriteria Pembanding Berpasangan Dalam AHP**

<b>Intensitas Pentingnya</b>	<b>Definisi</b>	<b>Penjelasan</b>
1	<i>Equal Importance</i> (Sama penting)	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	<i>Weak Importance of one over another</i> (Sedikit lebih penting)	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	<i>Essential or strong importance</i> (lebih penting)	Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata, dibandingkan dengan elemen pasangannya
7	<i>Demonstrated importance</i> (sangat penting)	Satu elemen terbukti sangat disukai dan secara praktis dominasinya, sangat dibandingkan dengan elemen pasangannya
9	<i>Extreme importance</i> (mutlak lebih penting)	Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya, pada tingkat keyakinan tertinggi
2,4,6,8	<i>Intermediate values between the two adjacent judgments</i>	Nilai diantara dua pilihan yang berdekatan
Resiprokal	Jika $A/B=9$ maka $B/A=1/9$	Jika elemen $i$ memiliki salah satu angka diatas ketika dibandingkan elemen $j$ , maka $j$ memiliki kebalikannya ketika dibanding elemen $i$

Sumber : Muta'ali, 2015

1. Uji Konsistensi Indeks dan Rasio

Salah satu yang membedakannya model AHP dengan model-model pengambilan keputusan yang lainnya adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Pengumpulan pendapat antara satu faktor dengan yang lain adalah bebas satu sama lain dan hal ini dapat mengarah pada ketidakkonsistenan jawaban yang diberikan responden. Namun, terlalu banyak ketidakkonsistenan juga tidak diinginkan. Pengulangan wawancara pada sejumlah responden yang sama kadang diperlukan apabila derajat tidak konsistensinya besar.

AHP mentoleransi tingkat konsistensi sebesar kurang dari 10%, apabila lebih dari 10% maka responden dianggap tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan dan diperbolehkan melakukan perbaikan atas penilaian yang diberikan. Konsistensi dalam hal ini diartikan sebagai intensitas hubungan antar elemen yang didasarkan pada kriteria tertentu, saling membenarkan secara logis. Pengujian konsistensi dilakukan sebagai cara untuk melihat konsistensi jawaban penilaian pasangan terhadap perbandingan maupun struktur hierarki permasalahan. Hal tersebut dikarenakan pada kenyataannya menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin untuk memperoleh jawaban responden yang absolut konsisten. Adapun formulasi untuk menghitung indeks konsistensi adalah sebagai berikut (Muta'ali, 2015) :

*Consistency Index (CI)*

$$CI = \frac{(\lambda - n)}{(n-1)}$$

Dimana: n : Jumlah kriteria, bukan responden

$\lambda$ : Rata-rata dari konsistensi vector.

Apabila CI bernilai nol, maka *pair wise comparison matrix* tersebut konsisten. Batas ketidakkonsistenan (inconsistency) yang telah ditetapkan oleh ThomasL. Saaty ditentukan dengan menggunakan Rasio Konsistensi (CR), yaitu perbandingan indeks konsistensi dengan nilai random indeks (RI) yang didapatkan dari suatu eksperimen oleh *Oak Ridge National Laboratory* kemudiandikembangkan oleh *Wharton School*, seperti pada tabel 3.10 Nilai ini bergantung pada ordo matriks n. Dengan demikian, Rasio Konsistensi dapat dirumuskan sebagai berikut (Muta'ali, 2015) :

*Consistency Ratio (CR)*:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

dimana: *RI* = Random Indeks

**Tabel. 3.10 Nilai Random Indeks (RI)**

<b>N</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RI</b>	0,000	0,000	0,580	0,900	0,120	1,240	1,320	1,410	1,450

<b>N</b>	10	11	12	13	14	15
<b>RI</b>	1,490	1,510	1,480	1,560	1,570	1,590

Sumber : Tumada, 2012

Bila matriks *pair-wise comparison* dengan nilai CR lebih kecil dari 0,100 maka ketidakkonsistenan pendapat dari *decesion maker* masih dapat diterima dan jika tidak maka penilaian perlu diulang.Langkah selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan mentabulasikan hasil wawancara

penelitian dalam bentuk tabel untuk kemudian dihitung *nilai geomeannya*, yaitu nilai sentral yang dianggap mewakili nilai seluruh data yang diperoleh dari nilai kualifikasi persepsi dikalikan satu dengan lainnya dan dicari pangkat dari jumlah responden. Rumus geomean tersebut adalah

$$\sqrt[n]{X_1, X_2, X_3, \dots, X_n}$$

Dari hasil tersebut selanjutnya membentuk *matrix pair-wise comparasion* yang membandingkan antara berbagai faktor dalam menentukan strategi dan kebijakan wilayah dengan menggunakan prinsip kebalikan dan kemudian diisidengan angka geomean yang diperoleh dari tabulasi. Selanjutnya, menghitung rasio tiap elemen terhadap nilai total elemen pada matrix pair-wise dan dipindahkan untuk diubah menjadi *matrix priority vector*.

Bobot nilai masing-masing faktor akan diperoleh dengan mencari nilai rata-rata baris dari matrix priority vector. Langkah terakhir adalah menghitung rasio konsistensi, dengan terlebih dahulu menghitung *weighted sum vector* yang diperoleh dari penjumlahan antara perkalian nilai rata-rata pada *matrix priority vector* dengan nilai elemen dalam *matrix priority vector* sehingga akan diperoleh konsistensivektor.

Selanjutnya mencari lamda (  $\lambda$  ) yang diperoleh dari nilai rata-rata konsistensi vector. Setelah mendapatkan nilai lamda (  $\lambda$  ) dilanjutkan dengan menghitung nilai indeks konsistensi dengan menggunakan persamaan (3) dan menghitung konsistensi rasio dengan persamaan (4). Tahapan menghitung bobot yang telah dijelaskan berlaku untuk perhitungan bobot faktor (level pertama) maupun bobot variabel (level kedua) dari struktur

hierarki. Setelah bobot masing- masing faktor (level pertama) dan bobot masing-masing variabel (level kedua) didapat maka untuk mendapatkan bobot final dilakukan dengan mengkalikan nilai masing - masing bobot variabel level kedua dengan masing-masing bobot faktor level pertama.

### 3.8.2 Menganalisis Interaksi (Tingkat Keterkaitan) Pusat Pertumbuhan (*Growth Centre*) Dengan Kecamatan Disekitarnya.

Dalam menganalisis interaksi (tingkat keterkaitan) pusat pertumbuhan (*growth centre*) menggunakan analisis gravitasi dan analisis titik henti.

#### 3.8.2.1 Analisis Gravitasi

Konsep dasar model gravitasi adalah mengenai ukuran dan jarak antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dalam kaitanya dengan sistem perkotaan model gravitasi sering digunakan untuk mengukur kekuatan keterkaitan antara pusat dan *hinterland* dan menemukan kekuatan tempat kedudukan dari setiap pusat kegiatan ekonomi terhadap wilayah disekitarnya.

Model analisis metode gravitasi ini dapat digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi keterkaitan antar wilayah dan menentukan kekuatan tempat kedudukan dari setiap pusat kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi dalam sistem jaringan dan jasa, distribusi dan transportasi serta membantu menentukan sistem pusat dan *hinterland*. Rumus pada analisis gravitasi adalah (Nainggolan, 2013) :

$$I = \frac{P1 \times P2}{J^212}$$

- Keterangan :
- I = Interaksi
  - P1 = Penduduk Wilayah 1
  - P2 = Penduduk Wilayah 2
  - $J^2_{12}$  = Jarak Wilayah 1 Dan Jarak Wilayah 2

### 1.3.8.2 Analisis Titik Henti

Teori titik henti merupakan hasil modifikasi dari model gravitasi Reilly. Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah – wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Teori titik henti juga dapat digunakan dalam memperkirakan penempatan lokasi industri atau pusat pelayanan masyarakat. Penempatan dilakukan di antara dua wilayah yang berbeda jumlah penduduknya agar terjangkau oleh penduduk setiap wilayah.

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan wilayah, model gravitasi dan model titik henti dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pertimbangan faktor lokasi. Berikut rumus yang digunakan dalam analisis titik henti (Muta'ali, 2015).

$$Th = \frac{J}{1 + \sqrt{\frac{Pz}{Py}}}$$

- Keterangan :
- Th = Titik henti
  - J = Jarak
  - Pz = Jumlah Penduduk Kota Tujuan
  - Py = Jumlah Penduduk Kota Asal

### 3.9 Variabel Penelitian

Variabel merupakan objek yang digunakan untuk menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata. Hubungan nyata tersebut lazim dibaca dan dipaparkan dengan bersandar kepada variabel dan memperhatikan data tentang variabel tersebut. Variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini



**Tabel 3.11 Variabel Penelitian**

No	Tujuan	Sasaran	Variabel	Indikator	Sub indikator
1.	Menganalisis Penentuan Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru	Mengidentifikasi Lokasi Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan dan Prioritas Keputusan <i>Stakeholder</i>	Pusat – Pusat Pertumbuhan	Fasilitas Pendidikan	TK
					SD/MI
					SMP/MTS
					SMA/SMK/MI
					Perguruan Tinggi
				Fasilitas Peribadatan	Mesjid
					Musholla
					Gereja Protestan
					Gereja Katholik
					Vihara
					Pura
				Fasilitas Kesehatan	Rumah Sakit
					Rumah Sakit Bersalin
					Poliklinik
					Puskesmas
					Puskesmas Pembantu
					Posyandu
					Apotek
					Klinik
				Fasilitas Ekonomi	Pasar
					Koperasi
Bank					
Hotel					
Industri Besar					
Industri Sedang					
Industri Kecil					

No	Tujuan	Sasaran	Variabel	Indikator	Sub indikator
				Fasilitas Kelembagaan	Kantor Pemerintahan Kantor Polisi Kantor Pos
				Fasilitas Kebudayaan Dan Rekreasi	Gedung Bioskop Kolam Renang
				Fasilitas Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga	Taman Rekreasi Lapangan Olahraga
				Keuntungan Lokasi	Jarak Jumlah Penduduk
				Potensi Ekonomi	Sektor Primer Sektor Sekunder Sektor Tersier
				Potensi Lingkungan	Daya Dukung Lingkungan Kesesuaian Lahan
				Jalan	-
				Listrik	-
				Jaringan Telekomunikasi	-
2.	Menganalisis Penentuan Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru	Menganalisis Interaksi (Tingkat Keterkaitan) Pusat Pertumbuhan Dengan Kecamatan Disekitarnya	Interaksi Antar Wilayah	Jarak Jumlah Penduduk	- -

Sumber : Hasil Analisis, 2020

### 3.10 Desain Survey

Desain survey adalah gambaran secara detail mengenai kebutuhan data yang akan di perlukan dalam penelitian ini. Berikut tabel 3.12 mengetahui desain survey dalam penelitian.



Tabel 3.12 Desain Survey

No	Sasaran	Variabel	Jenis Data	Sumber	Tahun	Teknik Pengumpulan Data	Analisis	Ouput
1	Mengidentifikasi Lokasi Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Dan Keputusan Stakeholder	Pusat – Pusat Pertumbuhan	1. Fasilitas Pendidikan 2. Fasilitas Peribadatan 3. Fasilitas Kesehatan 4. Fasilitas Ekonomi 5. Fasilitas Kelembagaan 6. Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi 7. Fasilitas Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga 8. Keuntungan Lokasi 9. Potensi Ekonomi 10. Potensi Lingkungan 11. Jalan 12. Jaringan Telekomunikasi 13. Listrik	1. BPS Kota Pekanbaru 2. Stakeholder	2020	1. Wawancara 2. Kuesioner 3. Observasi 4. Dokumentasi	1. Analisis Scalogram 2. Analisis Indeks Sentralitas Marsall 3. Analytical Hierarchy Process (AHP)	Mengetahui Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru
2	Menganalisis Interaksi (Tingkat Keterkaitan) Pusat Pertumbuhan Dengan Kecamatan Disekitarnya	Interaksi Antar Wilayah	1. Jarak 2. Jumlah Penduduk	1. BPS Kota Pekanbaru	2020	1. Observasi	1. Analisis Gravitasi 2. Analisis Titik Henti	Mengetahui Besaran Interaksi Wilayah Pusat Pertumbuhan Dengan Kecamatan Disekitarnya

Sumber: Hasil Analisis, 2020

### 3.11 Tahapan Penelitian

Secara umum tahapan penelitian dilakukan dalam lima tahap, Adapun tahapan penelitian akan dijelaskan seperti di bawah ini:

#### 1. Perumusan Masalah

Kesenjangan wilayah di Kota Pekanbaru terlihat jelas melalui ketimpangan dan ketidakmerataan fasilitas pelayanan. Saat ini pergerakan interaksi hanya berada pada pusat kota sehingga kurang menimbulkan efek menyeluruh dalam pengembangan ekonominya. Kemudian penetapan pusat-pusat pertumbuhan pernah dilakukan tetapi belum ada hasilnya. Maka diperlukan penentuan pusat-pusat pertumbuhan baru

#### 2. Tinjauan Pustaka

Pada tahap ini dilakukan kegiatan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penulisan yang berupa teori dan konsep, studi kasus, dan hal-hal lain yang relevan. Dari studi literatur didapatkan rumusan variabel-variabel penelitian yang menjadi dasar dalam melakukan analisa.

#### 3. Pengumpulan Data

Kebutuhan data disesuaikan dengan analisa dan variabel yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner.

4. Analisa

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah proses analisis data tersebut. Analisis yang dilakukan mengacu pada teori yang dihasilkan dari studi literatur sehingga sesuai dengan desain penelitian yang telah dibuat di awal.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan menentukan jawaban atas rumusan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan hasil dari proses analisa di atas. Dalam proses penarikan kesimpulan ini, diharapkan dapat tercapai tujuan akhir penelitian. Berdasarkan kesimpulan dari seluruh proses penelitian akan dirumuskan rekomendasi dari penelitian ini.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM WILAYAH

#### 4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas.

Berkembangnya Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar.

Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan

Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi. Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di gedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km<sup>2</sup> dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km<sup>2</sup>. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

## 4.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara  $101^{\circ}14'$ –  $101^{\circ}34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ}25'$ –  $0^{\circ}45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara 109 andau dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 – 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari  $\pm 62,96$  Km<sup>2</sup> menjadi  $\pm 446,50$  Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara  $101^{\circ}14'$  –  $101^{\circ}34'$  BT dan  $0^{\circ}25'$  –  $0^{\circ}45'$  LU, dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan luas 632,26 km<sup>2</sup>. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1. Berikut tabel 4.1 luas wilayah kota pekanbaru menurut kecamatan, tabel 4.2 jarak kecamatan menuju ibukota

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Tampan	59,81	9,46
2	Payung Sekaki	43,24	6,84
3	Bukit Raya	22,05	3,49
4	Marpoyan Damai	29,74	4,70
5	Tenayan Raya	171,27	27,09
6	Lima Puluh	4,04	0,64
7	Sail	3,26	0,52
8	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
9	Sukajadi	3,76	0,59
10	Senapelan	6,65	1,05
11	Rumbai	128,85	20,38
12	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
<b>Jumlah</b>		<b>632,26</b>	<b>100,00</b>

, Sumber : RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2013 – 2033

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki luas terbesar di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 171,27 km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan di Kota Pekanbaru dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas sebesar 2,26 km<sup>2</sup>. Berikut tabel 4.2 jarak kecamatan di Kota Pekanbaru menuju ibukota.

**Tabel 4.2 Jarak Kecamatan Menuju Ibukota**

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak Ke Ibukota (Km)
1	Tampan	Simpang Baru	17,00
2	Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	4,60
3	Bukit Raya	Simpang Tiga	5,60
4	Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	0,00
5	Tenayan Raya	Kulim	16,00
6	Lima Puluh	Rintis	3,50
7	Sail	Cinta Raja	1,60
8	Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,90
9	Sukajadi	Pulau Karam	2,00
10	Senapelan	Kampung Bandar	3,50
11	Rumbai	Rumbai Bukit	17,00
12	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak	4,70

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas jarak ibukota dengan 12 (dua belas) kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan Marpoyan Damai memiliki jarak ke ibukota sebesar 0,00 Km. Kecamatan dengan jarak yang sangat jauh menuju ibukota yaitu Kecamatan Tampan dan Kecamatan Rumbai dengan total jarak sebesar 17,00 Km. Berikut gambar 4.1 peta administrasi Kota Pekanbaru

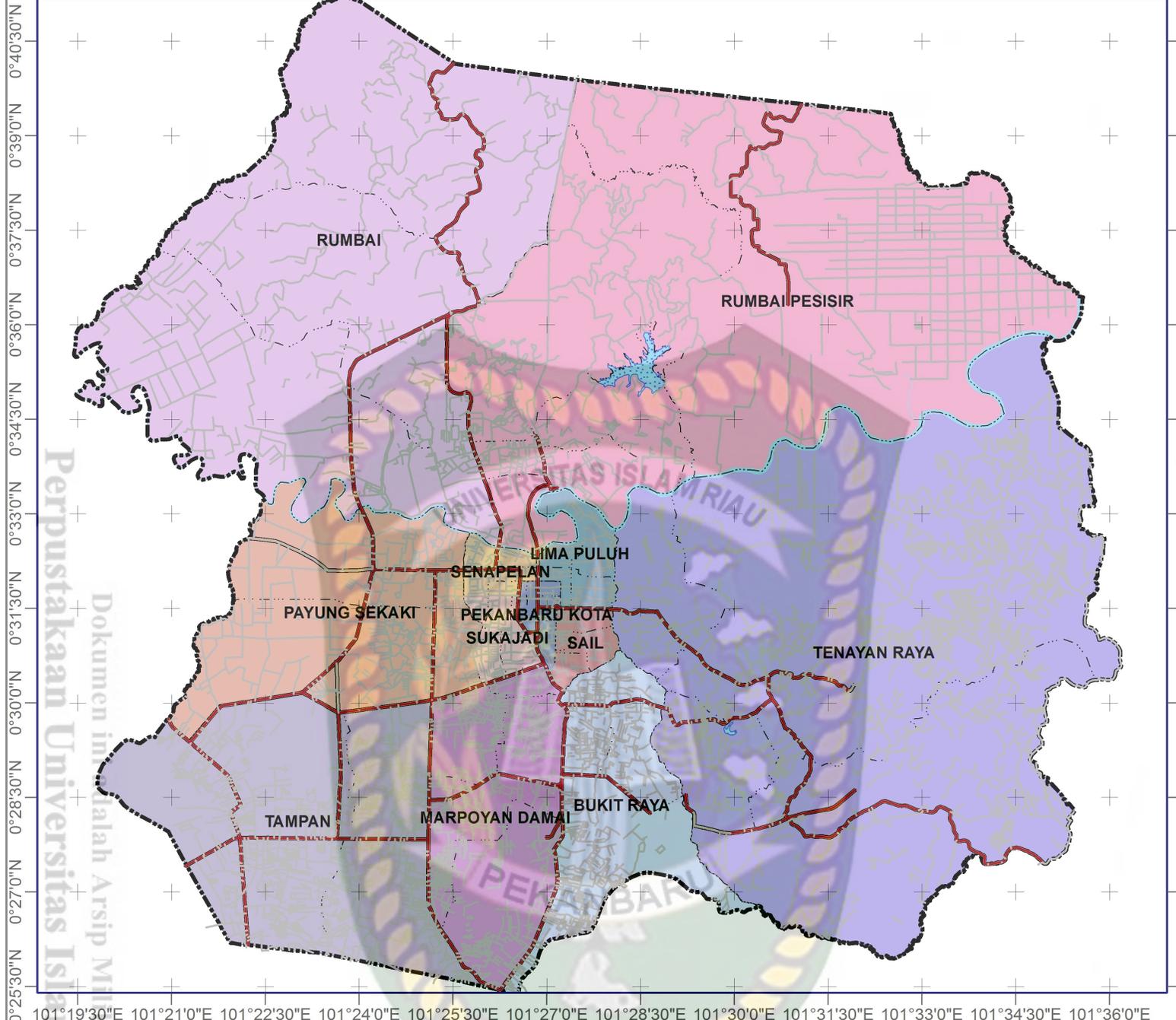
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Pekanbaru



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

101°19'30"E 101°21'0"E 101°22'30"E 101°24'0"E 101°25'30"E 101°27'0"E 101°28'30"E 101°30'0"E 101°31'30"E 101°33'0"E 101°34'30"E 101°36'0"E

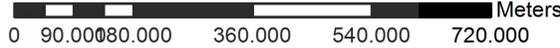




**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS TEKNIK**



**SKALA**  
**1:170.000**



**INSET PETA**



<p><b>LEGENDA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="border-bottom: 2px dashed black; width: 20px; display: inline-block;"></span> Batas Kabupaten Kota</li> <li><span style="border-bottom: 1px dotted black; width: 20px; display: inline-block;"></span> Batas Kecamatan</li> <li><span style="border-bottom: 1px dash-dot black; width: 20px; display: inline-block;"></span> Batas Kelurahan</li> <li><span style="border-bottom: 2px solid orange; width: 20px; display: inline-block;"></span> Jalan Arteri</li> <li><span style="border-bottom: 2px solid red; width: 20px; display: inline-block;"></span> Jalan Kolektor</li> <li><span style="border-bottom: 1px solid grey; width: 20px; display: inline-block;"></span> Jalan Lokal Edit</li> <li><span style="background-color: lightblue; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> Sungai</li> <li><span style="background-color: lightblue; width: 20px; height: 10px; border: 1px dotted black; display: inline-block;"></span> Air Danau</li> </ul>	<p><b>KECAMATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: lightblue; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> BUKIT RAYA</li> <li><span style="background-color: blue; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> LIMA PULUH</li> <li><span style="background-color: purple; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> MARPOYAN DAMAI</li> <li><span style="background-color: orange; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> PAYUNG SEKAKI</li> <li><span style="background-color: blue; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> PEKANBARU KOTA</li> <li><span style="background-color: purple; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> RUMBAI</li> <li><span style="background-color: pink; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> RUMBAI PESISIR</li> <li><span style="background-color: red; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> SAIL</li> <li><span style="background-color: orange; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> SENAPELAN</li> <li><span style="background-color: pink; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> SUKAJADI</li> <li><span style="background-color: purple; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> TAMPAN</li> <li><span style="background-color: blue; width: 20px; height: 10px; display: inline-block;"></span> TENAYAN RAYA</li> </ul>
--	--

**Dosen Pembimbing**  
**PUJI ASTUTI, ST.,MT**

Nama : Hera Yolanda Apriani  
 NPM : 153410209

Sumber :  
 RTRW KOTA PEKANBARU

No. Gambar

4.1

**PETA ADMINISTRASI KOTA PEKANBARU**

Halaman

112

Perustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip MIPA

### **4.3 Topografi Kota Pekanbaru**

#### **4.3.1 Ketinggian**

Kota Pekanbaru terletak pada bagian ketinggian 10 – 50 meter di atas permukaan laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan ketinggian rata-rata antara 10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan Tenayan dan sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 25-50 meter di atas permukaan laut. Kawasan yang relatif tinggi dan berbukit terutama dibagian utara kota, khususnya di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dengan ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut.

#### **4.3.2 Morfologi**

Morfologi Kota Pekanbaru sebagian besar terdiri dari dataran aluvium, selebihnya terdiri dari perbukitan. Bentuk morfologi Kota Pekanbaru dibagi menjadi:

1. Satuan Morfologi Dataran

Sebarannya menempati daerah Kecamatan Kota Pekanbaru, Senapelan, Limapuluh, Sukajadi, Sail, sebagian wilayah Rumbai, sebagian wilayah Rumbai Pesisir, Bukit Raya, sebagian wilayah Tenayan Raya, serta wilayah Tampan, Marpoyan Damai, dan Payung Sekaki, dengan proporsi kurang lebih 65% dari luas keseluruhan Kota Pekanbaru.

Daerah ini merupakan daerah endapan sungai dan rawa. Sebagian merupakan daerah dataran banjir (flood plain), sedangkan daerah rawa meliputi daerah bagian Barat Daya dan Tengah. Kemiringan lerengnya kurang dari 5 %, kecuali pada lembah-lembah, dan makin bergelombang ke arah utara.

## 2. Satuan Morfologi Perbukitan Rendah

Satuan morfologi ini terdapat setempat di bagian Utara, sebagian daerah Selatan, Timur dan Barat memanjang dari Barat Laut – Tenggara, umumnya tersusun oleh batu lumpur, batu pasir, sedikit batu lanau, batuan malihan, dan granit. Ketinggian satuan ini berkisar antara 20 hingga 35 meter di atas permukaan laut (dpl), membentuk perbukitan rendah yang ditumbuhi semak dan alang-alang dengan kemiringan lereng kurang dari 20%. Sungai yang mengalir di daerah ini berpola aliran meranting (*sub dendritik*) dan sub paralel, sebagian besar merupakan sungai-sungai yang airnya dipasok oleh air tanah (*effluent stream*).

## 3. Satuan Morfologi Perbukitan Sedang

Satuan morfologi ini menempati bagian Utara daerah Kota Pekanbaru, merupakan daerah perbukitan dengan arah punggungannya memanjang dengan arah Barat Laut – Tenggara yang ditumbuhi oleh tanaman keras sebagai hutan lindung. Ketinggiannya dari muka air laut adalah sekitar 40 m. Daerah perbukitan ini disusun oleh batuan yang terdiri atas batuan lava, lahar, dan batuan malihan yang umumnya bertonjolan kasar dan agak tajam dengan kemiringan lereng kurang dari 40 %.

Bentuk perbukitan tersebut nampaknya telah dipengaruhi oleh adanya struktur kekar, sesar-sesar lokal dan bidang foliasi pada batuan malihan, sehingga struktur geologi membentuk perbukitan sedang dengan lereng yang agak curam. Adanya pengaruh tersebut juga tercermin dari pola alirannya yang secara umum paralel hingga sub paralel.

#### 4.3.3 Kemiringan Lereng

Secara umum kondisi wilayah Kota Pekanbaru sebagian besar arealnya mempunyai kelas lereng datar dengan luas 38.624 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) kelas kemiringan lereng yaitu kemiringan lerengnya 0 – 2% dengan luas 27.818 Ha dan sekitar 10.806 Ha kemiringan lereng 2 – 8% yang sesuai untuk pengembangan pembangunan kota. Kemiringan 0 – 2% ini terletak di daerah bagian Selatan, sedangkan kemiringan lereng 2 – 8% terletak menyebar di bagian Tenggara Kota Pekanbaru dan sebagian lagi di daerah Utara.

Untuk kemiringan dengan kelas kelerengan 26 – 40% yang merupakan daerah agak curam mempunyai luasan terkecil yaitu 2.917 Ha, yang terletak di daerah Utara dan juga daerah Tenggara Kota Pekanbaru, tepatnya di Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, dan Kecamatan Tenayan Raya. Lahan dengan kondisi morfologi demikian umumnya cenderung memiliki faktor pembatas yang cukup tinggi terutama untuk kegiatan terbangun, oleh karena itu pada lokasi dengan tipikal kemiringan seperti ini pengembangannya lebih diarahkan sebagai kawasan konservasi.

**Tabel 4.3 Luas Kelas Kemiringan Lereng Kota Pekanbaru**

No	Kemiringan Lereng	Luas(Ha)	Persentase(%)
1	Datar 0-2 %	27.818	44,00
2	Agak Landai 2-15 %	10.806	17,09
3	Landai 15-40%	13.405	21,20
4	Sangat Landai	8.280	13,10
5	Agak Curam	2.917	4,61
<b>Total</b>		<b>63.226</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2013 - 2033

#### 4.3.4 Klimatologi

Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,00 °C - 36,40°C dengan suhu udara minimum berkisar antara 21,00°C - 23,10°C. Curah hujan antara 67,7 -521,5 mm/tahun. Kelembaban udara maksimum berkisar antara 99,00% -100% dan kelembaban minimum berkisar antara 43 - 50%. Berikut tabel 4.4 banyaknya curah hujan dan banyaknya hari hujan yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2019 :

**Tabel 4.4 Banyak Curah Hujan Kota Pekanbaru Tahun 2019**

Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
Januari	67.7	14
Februari	141.6	18
Maret	309.2	19
April	161.1	17
Mei	249.1	17
Juni	259.6	12
Juli	125.3	14
Agustus	107.8	10
September	112.7	17
Oktober	297.5	29
November	332.9	24
Desember	521.5	19

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Tahun 2019

#### 4.3.5 Jenis Tanah

Secara umum kondisi tanah di Kota Pekanbaru mempunyai daya pikul (tanah) antara  $0,7 \text{ kg/cm}^2$  -  $1 \text{ kg/cm}^2$ , kecuali di beberapa lokasi yang berdekatan dengan anak sungai (T tanah) antara  $0,4 \text{ kg/cm}^2$  -  $0,6 \text{ kg/cm}^2$ . Kedalaman efektif tanahnya (*top soil*) sebagian besar kurang dari atau sama dengan 50 cm yang terdapat di bagian tengah.

Kedalaman efektif tanah 50 – 75 cm terdapat di bagian Selatan dan kedalaman lebih dari 100 cm terdapat di bagian Utara Kota Pekanbaru. Fisiografi grup aluvial berdasarkan klasifikasi tanah USDA, tanahnya didominasi oleh Dystropepts dengan asosiasi Tropofulvents dan Tropaquents, sedangkan pada fisiografi dataran (plain) jenis tanah yang mendominasi adalah Topaquents pada areal datar.

Humitropepts pada areal datar berombak, dan Kandiodults pada areal berombak sampai perbukitan. Tanah – tanah tersebut terbentuk dari bahan induk sedimen halus masam sehingga walaupun tanah sama tetapi mempunyai perbedaan kepekaan terhadap erosi atau berdasarkan klasifikasi tanah PPT (1983) termasuk dalam jenis tanah podsolik dan sebagian aluvial. Untuk lebih jelasnya, grup fisiografi tanah dan satuan lahan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini :

**Tabel 4.5 Grup Fisiografi Tanah Dan Satuan Lahan kota Pekanbaru**

No	Grup Fisiografi/ Satuan Lahan	Uraian	Lokasi	Komposisi Tanah	Luas	
			(Kecamatan)	(Gol./PPT/USDA)	Ha	%
1	Aluvial	Dataran banjir dari sungai yang bermeander	Tampan	Spodosol/Podzolik Gleik/Tropaquepts	3.919	6,20
		Sedimen tidak dibedakan	Payung Sekaki	Inceptisol/Kambisol Distrik/Dyspropepts		
			Bukit Raya	Entisol/Litosol/Tropofluvents		
		Lereng < 3%	Marpoyan Damai	Tropohemists		
			Tenayan Raya			
			Lima Puluh			
			Rumbai			
	Rumbai Pesisir					
2	Aneka Bentuk	Daerah permukiman	Rumbai		6.024	9,53
		Kota besar dan daerah pembangunan	Rumbai Pesisir			
3	Dataran	Dataran banjir dari sungai yang bermeander	Semua Kecamatan	Ultisol/Podzolik Kandik/Kandiudults	49.461	78,23
		Sedimen tidak dibedakan	Semua Kecamatan	Inceptisol/Kambisol Distrik/Dyspropepts		
		Batuan sedimen halus dan kasar		Hapludox		
		Masam		Hapluduts		
		Lereng < 3%		Humittropepts		
		Datar sampai bergelombang (< 8%)		Ultisol/Podzolik Merah/Paleudults		
		Berombak		Spodosol/Podzolik Gleik/Tropaquepts		
		Berombak sampai bergelombang		Entisol/Litosol/Tropofluvents		
		Berbukit kecil		Tropohemists		
		Perbukitan kecil (lereng > 16%)				
4	Kubah Gambut	Kubah gambut oligotrofik air tawar	Payung Sekaki	Troposaprits	3.822	6,04
		Kedalaman gambut 0.5 - 2 meter	Rumbai	Tropohemists		
		Datar sampai sedikit cembung		Sulfihemits		
<b>Jumlah</b>					<b>63.226</b>	<b>100,00</b>

Sumber : RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2013 – 2033

#### 4.4 Kependudukan Kota Pekanbaru

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2010 berjumlah 897.768 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Tampan sebesar 169.655 jiwa dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Sail yaitu 21.438 jiwa. Pada tahun 2018 semakin meningkat. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Tampan yaitu 307.947, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Sail (21.492 jiwa), jumlah penduduk mengalami peningkatan yang sangat drastis dari tahun 2010 – 2018 dengan peningkatan jumlah penduduk sebanyak 219.591 jiwa. Berikut tabel 4.6 jumlah, penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin penduduk di Kota Pekanbaru.

**Tabel 4.6 Jumlah, Penduduk, Laju Pertumbuhan, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Di Kota Pekanbaru.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan	Kepadatan Penduduk		Rasio Jenis Kelamin	
		2010	2018	2010 – 2018 (%)	2010	2018	2010	2018
1	Tampan	169.655	307.947	7,57	2.873	5.149	106,29	105,64
2	Payung Sekaki	86.584	91.255	0,61	2.011	2.110	105,15	104,50
3	Bukit Raya	91.914	105.177	1,63	4.192	4.770	108,14	107,48
4	Marpoyan Damai	125.697	131.550	0,52	4.244	4.423	108,20	107,55
5	Tenayan Raya	123.155	167.929	3,84	725	980	107,08	106,43
6	Lima Puluh	41.333	41.466	0,04	10.231	10.264	99,59	98,97
7	Sail	21.438	21.492	0,03	6.576	6.593	100,27	99,65
8	Pekanbaru Kota	25.062	25.103	0,02	11.090	11.108	103,24	102,59
9	Sukajadi	47.174	47.420	0,06	12.547	12.612	99,21	98,58
10	Senapelan	36.434	36.581	0,05	5.479	5.501	99,02	98,41
11	Rumbai	64.624	67.654	0,52	504	525	110,40	109,74
12	Rumbai Pesisir	64.698	73.784	1,59	414	469	106,84	106,19
<b>Jumlah</b>		<b>897.768</b>	<b>1.117.359</b>	<b>2,70</b>	<b>1.428</b>	<b>1.767</b>	<b>105,83</b>	<b>105,34</b>

Sumber : BPS Kota Pekanbaru dalam angka 2019

#### 4.5 Fasilitas Pendidikan

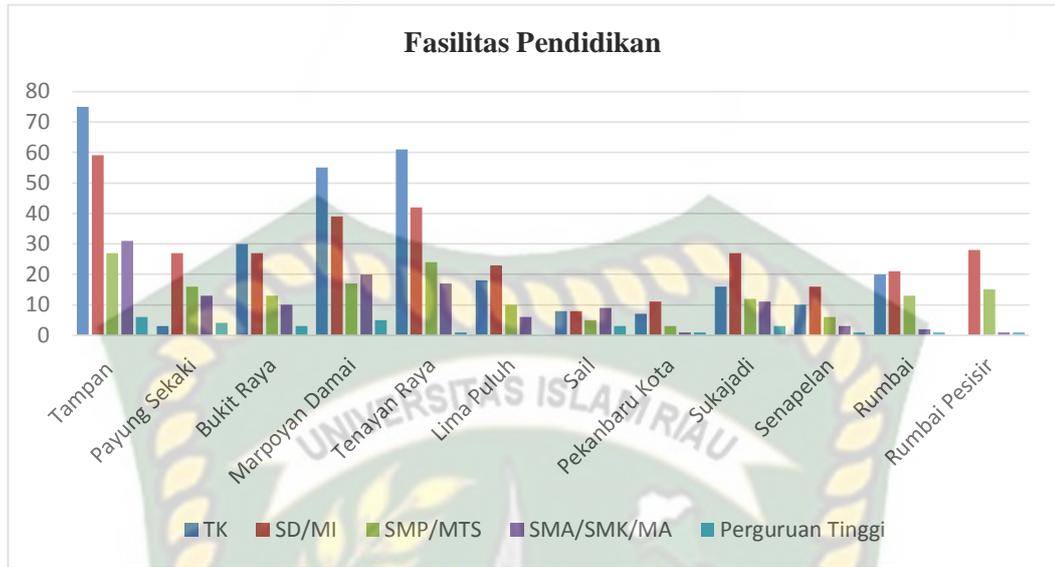
Fasilitas pendidikan di Kota Pekanbaru terdiri dari TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan Perguruan tinggi. Fasilitas pendidikan tersebar di 12 (dua belas) kecamatan dengan jumlah fasilitas pendidikan berbeda – beda. Berikut tabel 4.7 jumlah fasilitas pendidikan menurut kecamatan di Kota Pekanbaru.

**Tabel 4.7 Jumlah Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru**

No .	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pendidikan					Total
		TK	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Perguruan Tinggi	
1	Tampan	75	59	27	31	6	198
2	Payung Sekaki	3	27	16	13	4	63
3	Bukit Raya	30	27	13	10	3	83
4	Marpoyan Damai	55	39	17	20	5	136
5	Tenayan Raya	61	42	24	17	1	145
6	Lima Puluh	18	23	10	6	0	57
7	Sail	8	8	5	9	3	33
8	Pekanbaru Kota	7	11	3	1	1	23
9	Sukajadi	16	27	12	11	3	69
10	Senapelan	10	16	6	3	1	36
11	Rumbai	20	21	13	2	1	57
12	Rumbai Pesisir	0	28	15	1	1	45

Sumber : BPS, Kecamatan Dalam Angka, 2019

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah fasilitas pendidikan terbanyak berada di Kecamatan Tampan dengan jumlah fasilitas pendidikan sebanyak 198 unit. Sedangkan jumlah fasilitas paling sedikit berada di Kecamatan Pekanbaru Kota dengan jumlah fasilitas pendidikan sebanyak 23 unit. Berikut gambar 4.2 grafik fasilitas pendidikan dan gambar 4.3 fasilitas pendidikan



**Gambar 4.2**  
**Grafik Fasilitas Pendidikan**

Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019



**Gambar 4.3**  
**Fasilitas Pendidikan**

Sumber : Hasil Survey, 2020

#### 4.6 Fasilitas Kesehatan

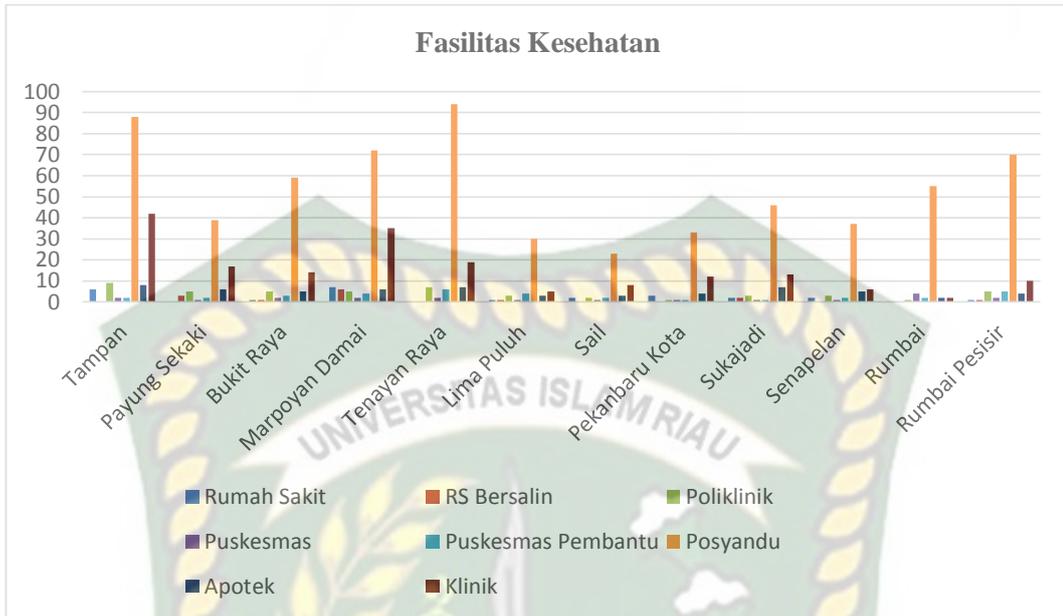
Fasilitas kesehatan di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru terdiri dari Rumah sakit, RS Bersalin, Poliklinik, Puskesmas hingga Klinik. Berikut tabel 4.8 Jumlah Fasilitas kesehatan menurut kecamatan di Kota Pekanbaru.

**Tabel 4.8 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan								Total
		Rumah Sakit	RS Bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu	Apotek	Klinik	
1	Tampan	6	0	9	2	2	88	8	42	157
2	Payung Sekaki	0	3	5	1	2	39	6	17	73
3	Bukit Raya	1	1	5	2	3	59	5	14	90
4	Marpoyan Damai	7	6	5	2	4	72	6	35	137
5	Tenayan Raya	0	0	7	2	6	94	7	19	135
6	Lima Puluh	1	1	3	1	4	30	3	5	48
7	Sail	2	0	2	1	2	23	3	8	41
8	Pekanbaru Kota	3	0	1	1	1	33	4	12	55
9	Sukajadi	2	2	3	1	1	46	7	13	75
10	Senapelan	2	0	3	1	2	37	5	6	56
11	Rumbai	0	0	1	4	2	55	2	2	66
12	Rumbai Pesisir	1	1	5	2	5	70	4	10	98

Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019

Dari tabel diatas diketahui jumlah fasilitas kesehatan tertinggi berada di Kecamatan Tampan dengan jumlah 15 fasilitas kesehatan. Sedangkan jumlah fasilitas kesehatan terendah berada di Kecamatan Sail. Berikut gambar 4.4 grafik fasilitas kesehatan dan gambar 4.5 fasilitas kesehatan



**Gambar 4.4**  
**Grafik Fasilitas Kesehatan**  
 Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019



**Gambar 4.5**  
**Fasilitas Kesehatan**  
 Sumber : Hasil Survey, 2020

#### 4.7 Fasilitas Peribadatan

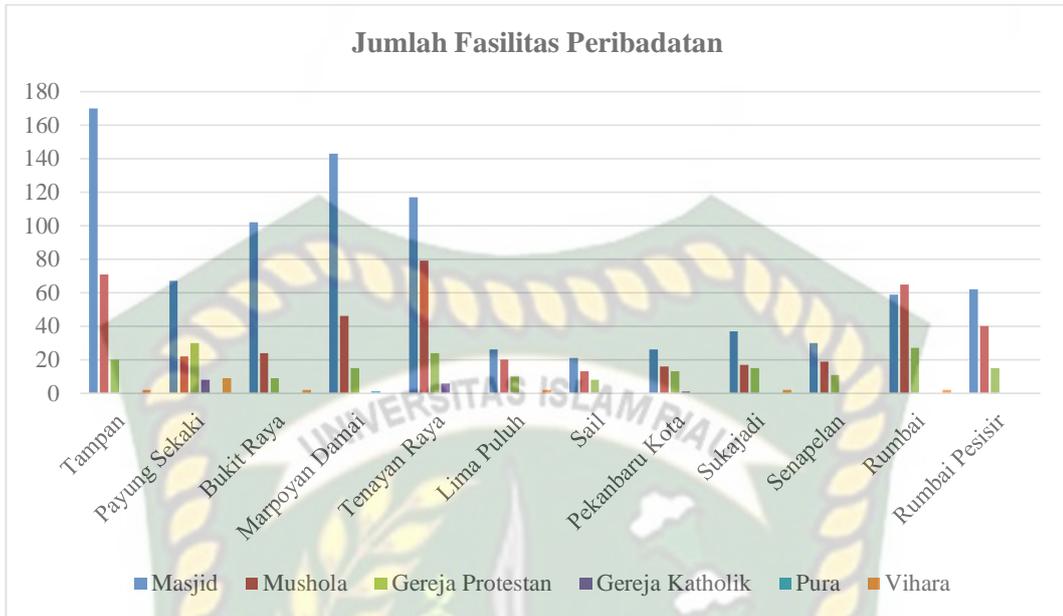
Fasilitas Peribadatan di Kota Pekanbaru terdiri dari Masjid, Musholla, Gereja Protestan, Gereja Katholik, Pura dan Vihara. Masyarakat di Kota Pekanbaru mayoritas beragama islam dengan jumlah masjid yang cukup banyak. Berikut tabel 4.9 jumlah fasilitas peribadatan.

**Tabel 4.9 Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Peribadatan						Total
		Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara	
1	Tampian	170	71	20	0	0	2	263
2	Payung Sekaki	67	22	30	8	0	9	136
3	Bukit Raya	102	24	9	0	0	2	137
4	Marpoyan Damai	143	46	15	0	1	0	205
5	Tenayan Raya	117	79	24	6	0	0	226
6	Lima Puluh	26	20	10	0	0	2	42
7	Sail	21	13	8	0	0	0	56
8	Pekanbaru Kota	26	16	13	1	0	0	71
9	Sukajadi	37	17	15	0	0	2	60
10	Senapelan	30	19	11	0	0	0	153
11	Rumbai	59	65	27	0	0	2	117
12	Rumbai Pesisir	62	40	15	0	0	0	42

Sumber: BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019

Dari Tabel diatas diketahui jumlah fasilitas peribadatan tertinggi berada di Kecamatan Tampian dengan jumlah 263 unit. Sedangkan kecamatan dengan jumlah fasilitas peribadatan terendah berada di Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Rumbai Pesisir dengan total 42 unit. Jumlah fasilitas peribadatan dapat dilihat pada gambar 4.6 Grafik fasilitas peribadatan. Berikut gambar 4.6 Grafik fasilitas peribadatan dan gambar 4.7 Fasilitas peribadatan.



**Gambar 4.6**  
**Grafik Fasilitas Peribadatan**  
 Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019



**Gambar 4.7**  
**Fasilitas Peribadatan**  
 Sumber : Hasil Survey, 2020

#### 4.8 Fasilitas Kelembagaan

Fasilitas kelembagaan di Kota Pekanbaru tersebar di beberapa kecamatan. Fasilitas kelembagaan terdiri dari kantor pemerintahan, kantor polisi dan kantor pos. penyebaran fasilitas kelembagaan tertinggi berada di Kecamatan Tenayan Raya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.9 jumlah fasilitas kelembagaan. Berikut tabel 4.10 jumlah fasilitas kelembagaan menurut kecamatan di Kota Pekanbaru.

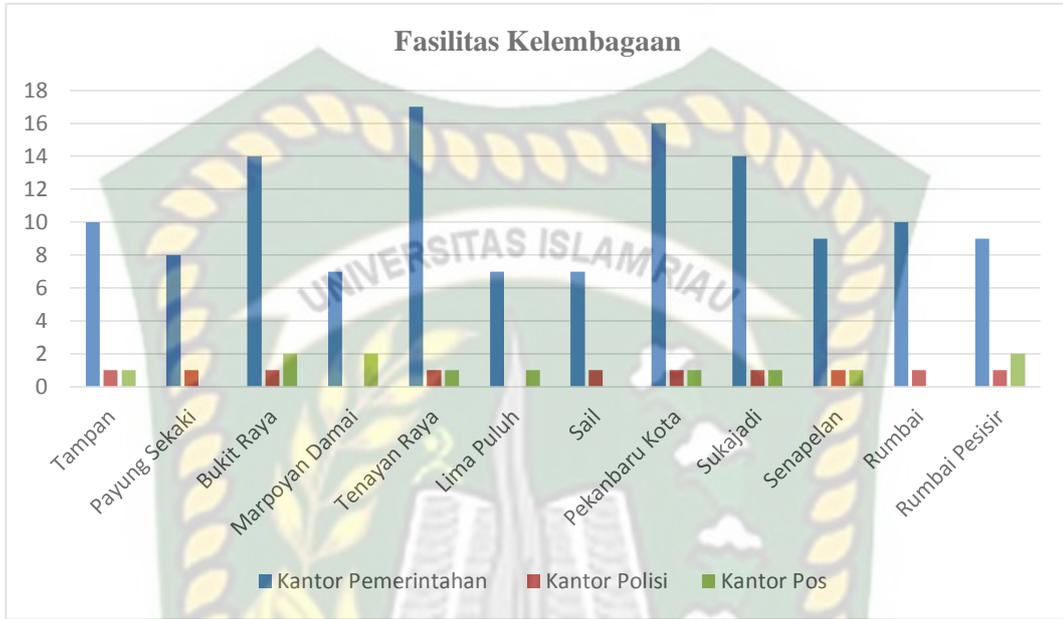
**Tabel 4.10 Jumlah Fasilitas Kelembagaan Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kelembagaan			Total
		Kantor Pemerintahan	Kantor Polisi	Kantor Pos	
1	Tampan	10	1	1	12
2	Payung Sekaki	8	1	0	9
3	Bukit Raya	14	1	2	17
4	Marpoyan Damai	7	0	2	9
5	Tenayan Raya	17	1	1	19
6	Lima Puluh	7	0	1	8
7	Sail	7	1	0	8
8	Pekanbaru Kota	16	1	1	18
9	Sukajadi	14	1	1	16
10	Senapelan	9	1	1	11
11	Rumbai	10	1	0	11
12	Rumbai Pesisir	9	1	2	12

Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019

Dari data tabel diatas jumlah fasilitas kelembagaan terbanyak berada di Kecamatan Tenayan Raya. Sedangkan kecamatan dengan fasilitas kelembagaan dengan jumlah sedikit yakni Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Sail dengan jumlah 8 unit fasilitas kelembagaan.

Berikut gambar 4.8 grafik fasilitas kelembagaan dan gambar 4.9 fasilitas kelembagaan menurut kecamatan di Kota Pekanbaru.



**Gambar 4.8**  
**Grafik Fasilitas Kelembagaan**  
 Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019



**Gambar 4.9**  
**Fasilitas Kelembagaan**  
 Sumber : Hasil Survey, 2020

#### 4.9 Fasilitas Ekonomi

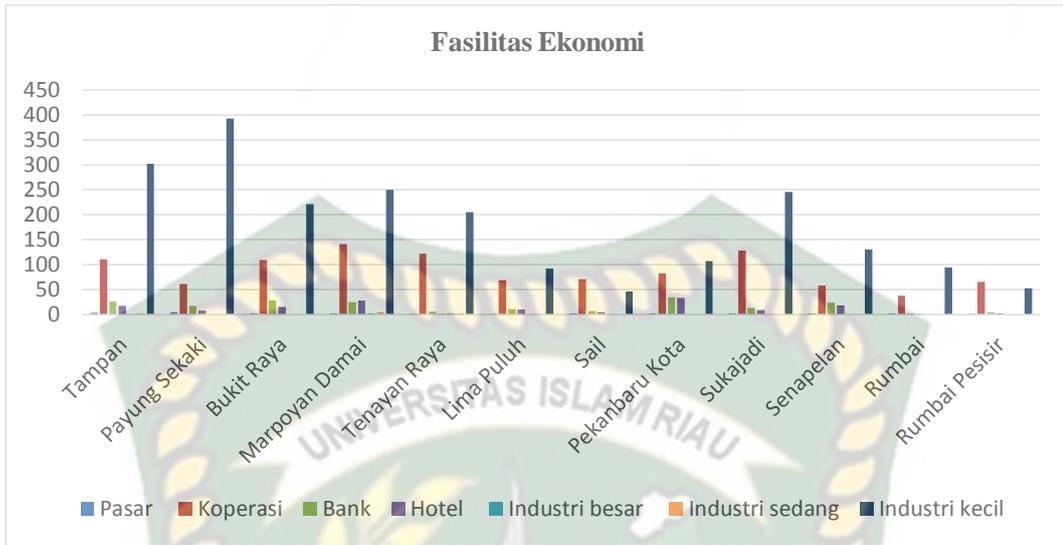
Fasilitas ekonomi di Kota Pekanbaru terdiri dari pasar, koperasi, bank, hotel, industri besar, industri sedang, dan industri kecil. Jumlah fasilitas ekonomi di Kota Pekanbaru yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan terbanyak ialah pada industri kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 4.10 jumlah fasilitas ekonomi. Berikut tabel 4.11 jumlah fasilitas ekonomi menurut kecamatan di Kota Pekanbaru.

**Tabel 4.11 Jumlah Fasilitas Ekonomi Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru**

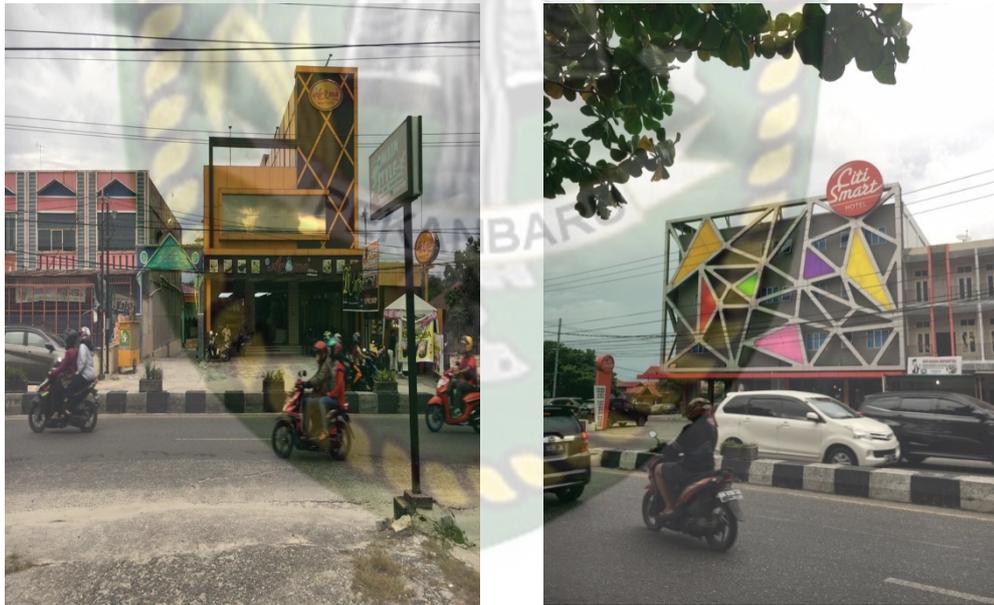
No	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Ekonomi							Total
		Pasar	Koperasi	Bank	Hotel	Industri Besar	Industri Sedang	Industri Kecil	
1	Tampan	4	110	26	17	0	3	302	462
2	Payung Sekaki	5	61	17	8	0	0	393	484
3	Bukit Raya	2	109	28	15	0	0	221	375
4	Marpoyan Damai	2	141	25	28	3	5	250	454
5	Tenayan Raya	1	122	6	1	2	2	205	339
6	Lima Puluh	1	69	11	10	0	0	92	183
7	Sail	2	71	7	5	0	0	46	131
8	Pekanbaru Kota	2	82	35	33	0	0	107	259
9	Sukajadi	2	128	13	9	0	0	246	398
10	Senapelan	2	58	24	18	0	0	130	232
11	Rumbai	2	38	3	1	0	0	94	138
12	Rumbai Pesisir	1	65	5	3	0	0	53	127

Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa fasilitas ekonomi memiliki jumlah yang berbeda – beda. Jumlah fasilitas ekonomi terbanyak berada pada Kecamatan Payung Sekaki dengan jumlah 484 unit. Sedangkan jumlah fasilitas paling sedikit berada di Kecamatan Rumbai Pesisir. Kecamatan dengan jumlah fasilitas ekonomi terlengkap berada di Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Tenayan Raya. Berikut gambar 4.10 grafik fasilitas ekonomi dan gambar 4.11 fasilitas ekonomi.



**Gambar 4.10**  
**Grafik Fasilitas Ekonomi**  
 Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019



**Gambar 4.11**  
**Fasilitas Ekonomi**  
 Sumber : Hasil Survey, 2020

#### 4.10 Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi

Fasilitas Kebudayaan dan rekreasi di Kota Pekanbaru terdiri dari gedung bioskop dan kolam renang. Fasilitas kebudayaan dan rekreasi di Kota Pekanbaru memiliki jumlah yang berbeda – beda. Fasilitas kebudayaan dan rekreasi terlengkap berada di Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Senapelan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.12. Berikut tabel 4.12 fasilitas kebudayaan dan rekreasi menurut kecamatan di Kota Pekanbaru.

**Tabel 4.12 Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Fasilitas Kebudayaan Dan Rekreasi		
		Gedung Bioskop	Kolam Renang	Total
1	Tampan	1	20	21
2	Payung Sekaki	1	4	5
3	Bukit Raya	0	5	5
4	Marpoyan Damai	0	4	4
5	Tenayan Raya	0	10	10
6	Lima Puluh	1	1	2
7	Sail	0	2	2
8	Pekanbaru Kota	0	0	0
9	Sukajadi	0	0	0
10	Senapelan	1	2	3
11	Rumbai	0	0	0
12	Rumbai Pesisir	0	0	0

Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019

Dari tabel diatas diketahui jumlah fasilitas kebudayaan dan rekreasi tertinggi menurut kecamatan di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Tampan dengan jumlah 21 unit. Sedangkan kecamatan dengan jumlah fasilitas terendah berada di Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Sail total 2 unit fasilitas kebudayaan dan

rekreasi. Fasilitas kebudayaan dan rekreasi yang tidak memiliki fasilitas kebudayaan dan rekreasi yaitu kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Berikut gambar 4.12 grafik fasilitas kebudayaan dan rekreasi menurut kecamatan di Kota Pekanbaru dan gambar 4.13 fasilitas kebudayaan dan rekreasi.



**Gambar 4.12**  
**Grafik Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi**  
 Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019



**Gambar 4.13**  
**Fasilitas Kebudayaan dan Rekreasi**  
 Sumber : Hasil Survey, 2020

#### 4.11 Fasilitas Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga

Fasilitas Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga di Kota Pekanbaru Terdiri dari taman rekreasi dan lapangan olahraga. Fasilitas ruang terbuka taman dan lapangan olahraga terlengkap berada di Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, dan Kecamatan Rumbai. Berikut tabel 4.13 fasilitas ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga menurut kecamatan di Kota Pekanbaru

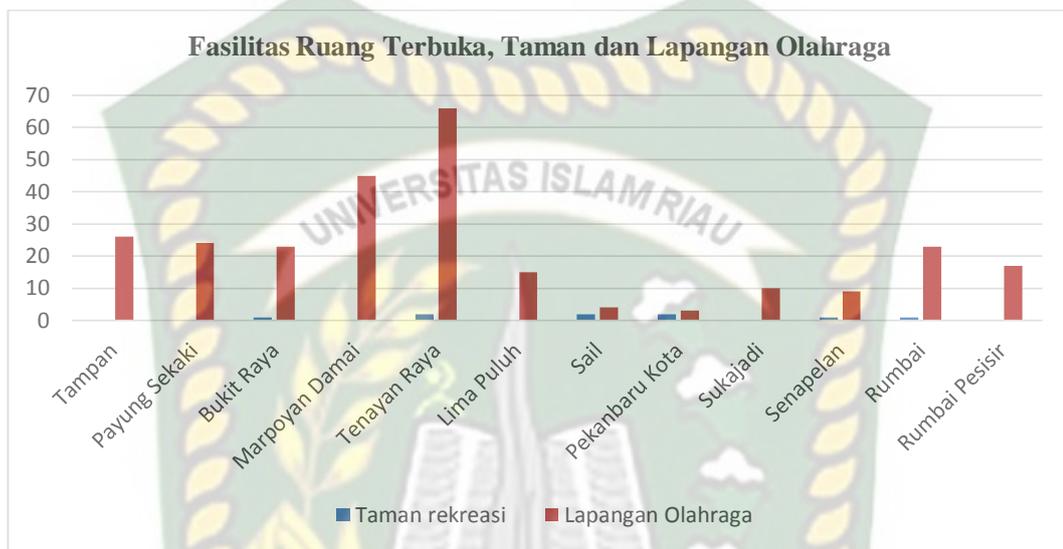
**Tabel 4.13 Fasilitas Ruang Terbuka, Taman Dan Lapangan Olahraga Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga		
		Taman rekreasi	Lapangan Olahraga	Total
1	Tampan	0	26	26
2	Payung Sekaki	0	24	24
3	Bukit Raya	1	23	24
4	Marpoyan Damai	0	45	45
5	Tenayan Raya	2	66	68
6	Lima Puluh	0	15	15
7	Sail	2	4	6
8	Pekanbaru Kota	2	3	5
9	Sukajadi	0	10	10
10	Senapelan	1	9	10
11	Rumbai	1	23	24
12	Rumbai Pesisir	0	17	17

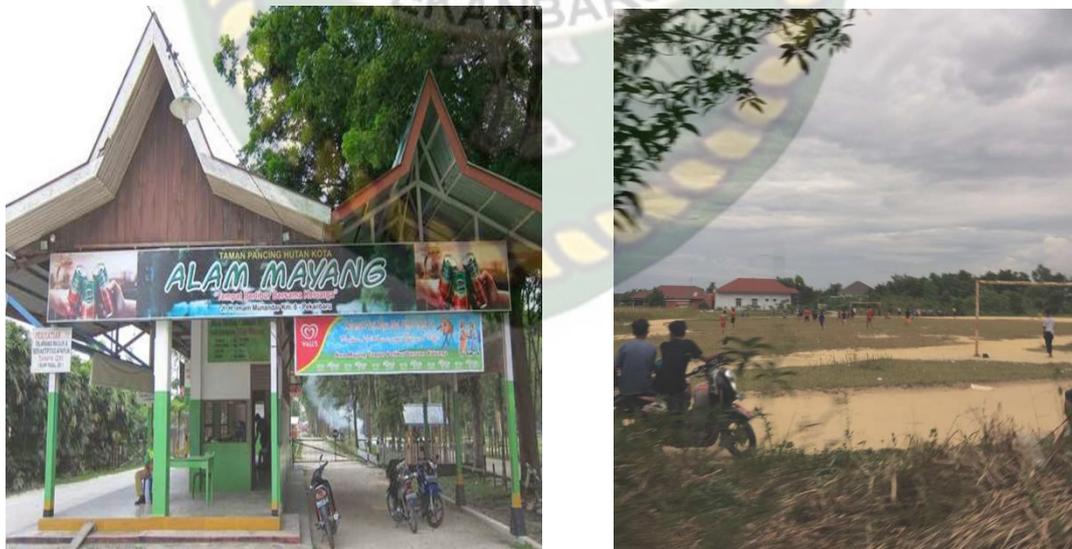
Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki fasilitas ruang terbuka, taman rekreasi dan lapangan olahraga dengan total jumlah terbanyak ialah Kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah total 68 unit. Sedangkan kecamatan dengan total jumlah fasilitas paling sedikit berada di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Berikut gambar 4.14 grafik fasilitas ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga menurut kecamatan di Kota Pekanbaru dan gambar 4.15 fasilitas ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga



**Gambar 4.14**  
**Grafik Fasilitas Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga**  
 Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019



**Gambar 4.15**  
**Grafik Fasilitas Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga**  
 Sumber : Hasil Survey, 2020

#### 4.12 Jaringan Jalan

Jaringan jalan di Kota pekanbaru berdasarkan tingkat pemerintah terbagi 3 yakni, berdasarkan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.14 Berikut tabel 4.14 jalan di Kota Pekanbaru.

**Tabel 4.14 Jalan Di Kota Pekanbaru**

No	Tingkat pemerintahan	Panjang jalan (Km)
1	Nasional	83.45
2	Provinsi	127.51
3	Kota	1277.90
<b>Total</b>		<b>1488.86</b>

Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019

Dari tabel diatas diketahui jalan di Kota Pekanbaru dengan panjang jalan 1277.90 Km. keadaan jalan di kota pekanbaru masih ada yang tanah dan kondisi jalan masih ada yang buruk. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.15. Berikut tabel 4.15 keadaan jalan dan kondisi jalan di Kota Pekanbaru dan gambar 4.16 jalan di Kota Pekanbaru

**Tabel 4.15 Keadaan Jalan dan Kondisi Jalan Di Kota Pekanbaru**

Keadaan jalan	Panjang jalan	
	KM	%
<b>Jenis permukaan</b>		
1. Diaspal	867.365	76.87
2. Kerikil	75.078	5.88
3. Tanah	304.17	23.80
4. Cor beton	31.287	2.45
<b>Total</b>	<b>1277.9</b>	<b>100.00</b>
<b>Kondisi jalan</b>		
1. Baik	597.518	52.05
2. Sedang	187.35	16.32
3. Rusak	363.032	31.63
<b>Total</b>	<b>1147.9</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019

**Gambar 4.16****Jalan***Sumber : Hasil Survey, 2020***4.13 Listrik**

Jaringan listrik di Kota Pekanbaru sudah dialiri di 12 (dua belas) kecamatan. Pengguna listrik di Kota Pekanbaru terbagi menjadi 5 (lima) rayon area yang terdiri dari Kota Timur, Kota Barat, Simpang Tiga, Rumbai, dan Panam. Pengguna listrik terdiri dari rumah tangga, kantor pemerintahan, industri, hotel dan lainnya. Berikut tabel 4.16 jaringan listrik di Kota Pekanbaru dan gambar 4.17 jaringan listrik di Kota Pekanbaru.

**Tabel 4.16 Jaringan listrik di Kota Pekanbaru**

No	Rayon Area	2014	2018
1	Kota Timur	76.450	97.615
2	Kota Barat	74.960	86.263
3	Simpang Tiga	85.693	76.193
4	Rumbai	36.827	49.094
5	Panam	106.128	115.624
<b>Total</b>		<b>380.058</b>	<b>424.789</b>

*Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019*



**Gambar 4.17**  
**Listrik**

*Sumber : Hasil Survey, 2020*

#### **4.14 Jaringan Telekomunikasi**

Jaringan telekomunikasi di Kota Pekanbaru sudah tersebar di 12 (dua belas). Jaringan telekomunikasi terdiri dari BTS. Jumlah BTS di Kota Pekanbaru terbanyak berada di Kecamatan Tenayan Raya dengan total 31 BTS. Sedangkan jumlah BTS terendah berada di Kecamatan Payung sekaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.17. Berikut tabel 4.17 jumlah BTS menurut kecamatan di Kota Pekanbaru dan gambar 4.18 BTS di Kota Pekanbaru.

**Tabel 4.17 Jumlah BTS Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru**

No	Kecamatan	BTS
1	Tampan	16
2	Payung Sekaki	3
3	Bukit Raya	23
4	Marpoyan Damai	4
5	Tenayan Raya	31
6	Lima Puluh	16
7	Sail	10
8	Pekanbaru Kota	6
9	Sukajadi	11
10	Senapelan	12
11	Rumbai	39
12	Rumbai Pesisir	28
<b>Jumlah</b>		<b>199</b>

*Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019*



**Gambar 4.18  
BTS**

*Sumber : Hasil Survey, 2020*

#### 4.15 Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Kota Pekanbaru diidentifikasi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) konstan, dan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana data tersebut dilihat dari tingkat kota Pekanbaru maupun tingkat kecamatan.

#### 4.16 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru menurut lapangan usaha pada tahun 2018 tertinggi berada di perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda dengan total Rp 19.431.654,3. Berikut tabel 4.18 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha.

**Tabel 4.18 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Di Kota Pekanbaru.**

No	Lapangan usaha	Tahun 2018
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.016.779,3
2.	Pertambangan dan Penggalian	10.741,9
3.	Industri Pengolahan	14.924.580,6
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	133.500,9
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	11.744,3
6.	Konstruksi	19.398.468,5
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	19.431.654,3
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.651.775,3
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.136.704,3
10.	Informasi dan Komunikasi	2.024.762,3
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.419.502,1
12.	Real Estate	1.846.055,9
13.	Jasa Perusahaan	13.779,2
14.	Administrasi Pemerintahan	2.298.755,3
15.	Jasa Pendidikan	645.649,7
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	332.923,2
17.	Jasa Lainnya	806.970,5
<b>Total</b>		<b>68.104.347,7</b>

Sumber : BPS Pekanbaru Dalam Angka, 2019

#### 4.17 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2017 namun pada tahun 2018 mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.19 Berikut tabel. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

**Tabel 4.19 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pekanbaru menurut dasar konstan 2010 menurut lapangan usaha pada tahun 2015 – 2018**

No	Lapangan usaha	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,05	3,94	4,14	4,35
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,34	2,43	2,46	-0,39
3.	Industri Pengolahan	7,91	6,87	7,73	3,01
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	8,08	11,87	0,29	1,38
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	2,66	-1,45	1,13	0,08
6.	Konstruksi	6,70	6,20	7,41	6,43
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	2,22	5,87	6,43	7,02
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,79	3,24	4,57	3,25
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,50	4,18	3,60	4,79
10.	Informasi dan Komunikasi	7,86	5,66	5,88	6,83
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,67	7,61	-2,36	5,26
12.	Real Estate	8,51	1,87	2,34	3,43
13.	Jasa Perusahaan	6,76	3,41	8,73	10,11
14.	Administrasi Pemerintahan	3,20	-1,40	0,52	0,77
15.	Jasa Pendidikan	5,82	0,45	0,88	4,52
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,67	3,97	7,56	7,84
17.	Jasa Lainnya	19,65	9,14	8,45	9,74
<b>Total</b>		<b>5,57</b>	<b>5,68</b>	<b>6,12</b>	<b>5,39</b>

Sumber : BPS Pekanbaru Dalam Angka, 2019

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identifikasi Lokasi Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan dan Prioritas Keputusan *Stakeholder*

Identifikasi Lokasi pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan dan prioritas keputusan *stakeholder* menggunakan *analisis scalogram*, *analisis indeks sentralitas marsall* dan *analisis analytical hierarchy process (AHP)*.

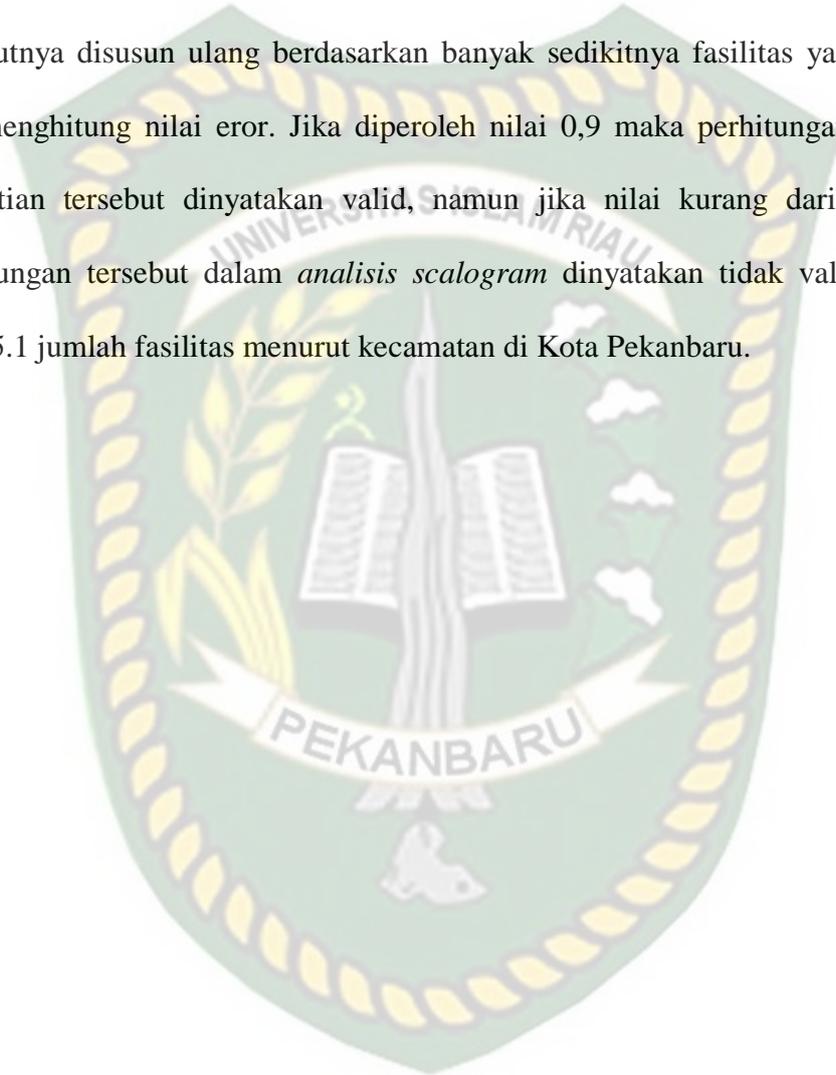
##### 5.1.1 Identifikasi Lokasi Pusat – Pusat Pertumbuhan Berdasarkan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan

Analisis pusat – pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan ini menggunakan teknik *analisis scalogram* dan *analisis indeks sentralitas marsall*. Berikut *analisis scalogram* dan *analisis indeks sentralitas marsall*.

###### 5.1.1.1 Analisis Scalogram

*Analisis scalogram* merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran fungsi fasilitas pelayanan dengan tujuan memberikan hirarki atau peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit yang paling banyak sampai sedikit, sehingga dapat ditentukan wilayah pusat pengembangannya. Variabel yang digunakan dalam analisis ini dengan mengukur

fasilitas pelayanan dengan menggunakan ukuran nominal (0) untuk menyatakan fasilitas tidak ada. Sebaliknya jika kecamatan memiliki fasilitas di dalam variabel maka diberikan nilai nominal (1). Selanjutnya setelah proses scoring selesai selanjutnya disusun ulang berdasarkan banyak sedikitnya fasilitas yang tersedia dan menghitung nilai eror. Jika diperoleh nilai 0,9 maka perhitungan di dalam penelitian tersebut dinyatakan valid, namun jika nilai kurang dari 0,9 maka perhitungan tersebut dalam *analisis scalogram* dinyatakan tidak valid. Berikut tabel 5.1 jumlah fasilitas menurut kecamatan di Kota Pekanbaru.



Tabel 5.1 Jumlah Fasilitas Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Fasilitas Pelayanan																																			Total
			F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	F25	F26	F27	F28	F29	F30	F31	F32	F33	F34	F35	
1	Tampan	307.947	75	59	27	31	6	6	0	9	2	2	88	8	42	170	71	20	0	0	2	10	1	1	4	110	26	17	0	3	302	1	20	0	26	1	16	1146
2	Tenayan Raya	167.929	61	42	24	17	1	0	0	7	2	6	94	7	19	117	79	24	6	0	0	17	1	1	1	122	6	1	2	2	205	0	10	2	66	1	31	974
3	Marpoyan Damai	131.550	55	39	17	20	5	7	6	5	2	4	72	6	35	143	46	15	0	1	0	7	0	2	2	141	25	28	3	5	250	0	4	0	45	1	4	995
4	Bukit Raya	105.177	30	27	13	10	3	1	1	5	2	3	59	5	14	102	24	9	0	0	2	14	1	2	2	109	28	15	0	0	221	0	5	1	23	1	23	755
5	Payung Sekaki	91.255	3	27	16	13	4	0	3	5	1	2	39	6	17	67	22	30	8	0	9	8	1	0	5	61	17	8	0	0	393	1	4	0	24	1	3	798
6	Rumbai Pesisir	73.784	0	28	15	1	1	1	1	5	2	5	70	4	10	62	40	15	0	0	0	9	1	2	1	65	5	3	0	0	53	0	0	0	17	1	28	445
7	Rumbai	67.654	20	21	13	2	1	0	0	1	4	2	55	2	2	59	65	27	0	0	2	10	1	0	2	38	3	1	0	0	94	0	0	1	23	1	39	489
8	Sukajadi	47.420	16	27	12	11	3	2	2	3	1	1	46	7	13	37	17	15	0	0	2	14	1	1	2	128	13	9	0	0	246	0	0	0	10	1	11	651
9	Lima Puluh	41.466	18	23	10	6	0	1	1	3	1	4	30	3	5	26	20	10	0	0	2	7	0	1	1	69	11	10	0	0	92	1	1	0	15	1	16	388
10	Senapelan	36.581	10	16	6	3	1	2	0	3	1	2	37	5	6	30	19	11	0	0	0	9	1	1	2	58	24	18	0	0	130	1	2	1	9	1	12	421
11	Pekanbaru Kota	25.103	7	11	3	1	1	3	0	1	1	1	33	4	12	26	16	13	1	0	0	16	1	1	2	82	35	33	0	0	107	0	0	2	3	1	6	423
12	Sail	21.492	8	8	5	9	3	2	0	2	1	2	23	3	8	21	13	8	0	0	0	7	1	0	2	71	7	5	0	0	46	0	2	2	4	1	10	274

Sumber : BPS Kecamatan Dalam Angka, 2019

Keterangan :

F<sub>1</sub> = TK

F<sub>2</sub> = SD/MI

F<sub>3</sub> = SMP/MTS

F<sub>4</sub> = SMA/SMK/MA

F<sub>5</sub> = Perguruan Tinggi

F<sub>6</sub> = Rumah Sakit

F<sub>7</sub> = Rumah Sakit Bersalin

F<sub>8</sub> = Poliklinik

F<sub>9</sub> = Puskesmas

F<sub>10</sub> = Puskesmas Pembantu

F<sub>11</sub> = Posyandu

F<sub>12</sub> = Apotek

F<sub>13</sub> = Klinik

F<sub>14</sub> = Masjid

F<sub>15</sub> = Musholla

F<sub>16</sub> = Gereja Protestan

F<sub>17</sub> = Gereja Katholik

F<sub>18</sub> = Pura

F<sub>19</sub> = Vihara

F<sub>20</sub> = Kantor Pemerintah

F<sub>21</sub> = Kantor Polisi

F<sub>22</sub> = Kantor Polisi

F<sub>23</sub> = Pasar

F<sub>24</sub> = Koperasi

F<sub>25</sub> = Bank

F<sub>26</sub> = Hotel

F<sub>27</sub> = Industri Besar

F<sub>28</sub> = Industri Sedang

F<sub>29</sub> = Industri Kecil

F<sub>30</sub> = Gedung Bioskop

F<sub>31</sub> = Kolam Renang

F<sub>32</sub> = Taman Rekreasi

F<sub>33</sub> = Lapangan Olahraga

F<sub>34</sub> = Listrik

F<sub>35</sub> = BTS

Berdasarkan *analisis scalogram* terlebih dahulu menyusun jumlah fasilitas pelayanan berdasarkan jumlah penduduk. Setelah menyusun jumlah fasilitas pelayanan diatas sesuai dengan tabel 5.1 maka diketahui bahwa kecamatan dengan total kelengkapan fasilitas pelayanan terbanyak berada di Kecamatan Tampan dengan total fasilitas pelayanan 1.146, Kecamatan Tenayan Raya dengan total fasilitas 974 dan Kecamatan Marpoyan Damai dengan total 995 fasilitas pelayanan. Kecamatan dengan jumlah sedikit berada di Kecamatan Sail dengan total fasilitas pelayanan yaitu 274 unit.

Untuk melanjutkan *analisis scalogram* selanjutnya seluruh fasilitas pelayanan diberikan nilai (1) jika fasilitas tersedia. Jika fasilitas tidak tersedia maka diberikan nilai (0). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini. Berikut tabel 5.2 *analisis scalogram* berdasarkan fasilitas pelayanan menurut kecamatan di Kota Pekanbaru.



Berdasarkan tabel 5.2 diketahui bahwa jumlah fasilitas di Kota Pekanbaru setelah dilakukan pembobotan penilaian. Fasilitas dengan jumlah terlengkap yaitu berada di Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, dan Kecamatan Bukit Raya dengan total fasilitas yang tersedia sebanyak 30 fasilitas pelayanan. Kecamatan dengan jumlah fasilitas paling sedikit yaitu Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Rumbai dengan total fasilitas yang tersedia yaitu 26 fasilitas.

Setelah melakukan pengelompokan ketersediaan fasilitas pelayanan, maka disusun jumlah fasilitas pelayanan dan total fasilitas untuk menentukan hirarki wilayah berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan. Untuk lebih jelasnya lanjutan hasil *analisis scalogram* berdasarkan fasilitas pelayanan menurut kecamatan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berikut tabel 5.3 *analisis scalogram* berdasarkan fasilitas pelayanan menurut kecamatan di Kota Pekanbaru (lanjutan).



Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah error berdasarkan *analisis scalogram* ialah 42. Untuk menguji keabsahan hasil perhitungan *analisis scalogram* digunakan rumus (Bruce, 2018) :

$$\text{COR} = \frac{1-E}{JF \times JD}$$

Keterangan : E = Error

JF = Jumlah Fasilitas

JD = Jumlah Daerah

$$\text{COR} = \frac{1-E}{JF \times JD}$$

$$\text{COR} = \frac{1-42}{35 \times 12}$$

$$\text{COR} = 0,9$$

Dari perhitungan nilai error yakni 0,9. Maka perhitungan *analisis scalogram* dianggap valid karena nilai error tidak kurang dari 0,9. Dari perhitungan *analisis scalogram* dalam mengidentifikasi penyebaran fasilitas pelayanan diketahui bahwa hirarki atau peringkat wilayah berdasarkan jenis dan jumlah unit fasilitas terdapat 5 (lima) hirarki yang terbentuk, yaitu :

1. Hirarki I ialah Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Bukit Raya yang memiliki kelengkapan 30 fasilitas dari 35 fasilitas yang menjadi variabel dalam penelitian.
2. Hirarki II ialah Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Senapelan dengan jumlah kelengkapan 29 fasilitas dari 35 fasilitas yang menjadi variabel dalam penelitian ini.

3. Hirarki III ialah Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Lima Puluh dan Kecamatan Pekanbaru Kota. Kecamatan ini hanya memiliki kelengkapan fasilitas sebanyak 28 fasilitas dari 35 fasilitas yang menjadi variabel dalam penelitian ini.
4. Hirarki IV hanya berada di Kecamatan Sail. Kecamatan Sail hanya memiliki fasilitas sebanyak 27 fasilitas dari total 35 fasilitas yang menjadi variabel dalam penelitian ini.
5. Hirarki V merupakan kelompok kecamatan dengan jumlah fasilitas yang paling sedikit. Jumlah fasilitas hanya berjumlah 26 (dua puluh enam) dari total 35 fasilitas yang menjadi variabel yang menjadi penelitian. Kecamatan yang termasuk dalam Hirarki V ialah kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Dari hasil *analisis scalogram* maka diketahui hasil hirarki wilayah ialah lima (V) hirarki berdasarkan jenis dan jumlah fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan yang menjadi hirarki I berdasarkan kelengkapan fasilitas pelayanan berada di Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Tampan dan Kecamatan Bukit Raya dengan total fasilitas pelayanan yaitu 30 fasilitas dari 35 variabel penelitian. 4 (empat) kecamatan tersebut layak menjadi hirarki I dengan total ketersediaan fasilitas pelayanan sebesar 30 unit.

Untuk kecamatan dengan fasilitas pelayanan paling sedikit dari total 35 variabel penelitian yaitu Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Kecamatan ini hanya memiliki fasilitas pelayanan sebanyak 26 (dua puluh enam). Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir layak dikategorikan sebagai hirarki V berdasarkan hasil perhitungan dari *analisis scalogram*.

*Analisis scalogram* belum bisa dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan dikarenakan distribusi nilai akhir *analisis scalogram* tidak memperhitungkan bobot dan pengaruh jenis – jenis fasilitas, sehingga perbedaan rentang nilai terlalu kecil dan sulit untuk melakukan klasifikasi tata urutan hirarki wilayah. Kelemahan *analisis scalogram* ditutupi dengan *analisis indeks sentralitas marsall* yang memberikan bobot setiap fasilitas, sehingga rentang nilai hirarki lebih tepat dan masing – masing wilayah mempunyai pusat pertumbuhan (Hirarki I) maupun wilayah dibawahnya (Muta'ali, 2015). Berikut gambar 5.1 peta klasifikasi hirarki wilayah berdasarkan *analisis scalogram*.

Peta 5.1



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

101°19'30"E 101°21'0"E 101°22'30"E 101°24'0"E 101°25'30"E 101°27'0"E 101°28'30"E 101°30'0"E 101°31'30"E 101°33'0"E 101°34'30"E 101°36'0"E



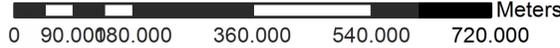
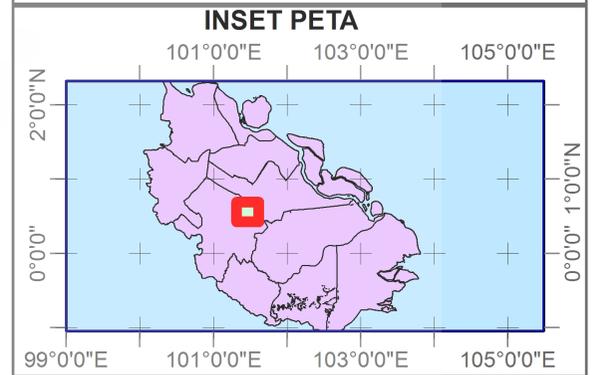
101°19'30"E 101°21'0"E 101°22'30"E 101°24'0"E 101°25'30"E 101°27'0"E 101°28'30"E 101°30'0"E 101°31'30"E 101°33'0"E 101°34'30"E 101°36'0"E



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS TEKNIK**



**SKALA**  
**1:170.000**

**LEGENDA**

--- Batas Kabupaten Kota	■ Hirarki 1
--- Batas Kecamatan	■ Hirarki 2
--- Batas Kelurahan	■ Hirarki 3
— Jalan Arteri	■ Hirarki 4
— Jalan Kolektor	■ Hirarki 5
— Jalan Lokal	
■ Sungai	
■ Air Danau	

**Dosen Pembimbing**  
 PUJI ASTUTI, ST.,MT

Nama : Hera Yolanda Apriani  
 NPM : 153410209

Sumber :  
 RTRW KOTA PEKANBARU

**No. Gambar**  
 5.1

**PETA KLASIFIKASI HIRARKI BERDASARKAN**  
**ANALISIS SCALOGRAM**

**Halaman**  
 150

Perustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Matrik

### 5.1.1.2 Analisis Indeks Sentralitas Marsall

*Analisis indeks sentralitas marsall* merupakan langkah lanjutan dari *analisis scalogram*. *Analisis indeks sentralitas marsall* yakni memberikan pembobotan terhadap jenis fasilitas. Berikut pembobotan dalam *analisis indeks sentralitas marsall* (Muta'ali, 2015) :

1. Pembobotan terhadap jenis fasilitas yang disebut dengan nilai sentralitas gabungan. Dalam pembobotan ini digunakan asumsi bahwa nilai sentralitas gabungan setiap jenis fasilitas dianggap sama. Nilai dapat dipilih sembarangan dan disesuaikan dengan jumlah unit fasilitas terbesar, bisa 100 atau tidak unitnya dapat 1000.
2. Pembobotan terhadap jenis fasilitas unit fasilitas yang disebut dengan sentralitas fasilitas, dengan rumus (Muta'ali, 2015) :

$$C = \frac{x}{X}$$

Keterangan :

- C = Bobot atribut fungsi x  
x = Nilai sentralitas gabungan = 100 (contoh)  
X = Jumlah total atribut dalam system

Berikut perhitungan *analisis indeks sentralitas marsall* yang dijelaskan pada tabel 5.4 penentuan pembobotan fungsi fasilitas pelayanan dan tabel 5.5 penentuan *indeks sentralitas marsall* dan hirarki wilayah.



Berdasarkan hasil tabel 5.4 penentuan pembobotan fungsi fasilitas pelayanan menurut kecamatan di Kota Pekanbaru dilakukan perhitungan bobot fungsi dari fasilitas pelayanan dengan rumus (Mutaali, 2015) :

$$\frac{TS}{TF}$$

$$BF = \frac{TS}{TF} \quad BF = \frac{TS}{TF} \quad BF = \frac{TS}{TF} \quad BF = \frac{TS}{TF}$$

$$BF = \frac{100}{12} \quad BF = \frac{100}{11} \quad BF = \frac{100}{10} \quad BF = \frac{100}{9}$$

$$BF = 8,33 \quad BF = 9,09 \quad BF = 10 \quad BF = 11,1$$

$$BF = \frac{TS}{TF} \quad BF = \frac{TS}{TF} \quad BF = \frac{TS}{TF} \quad BF = \frac{TS}{TF}$$

$$BF = \frac{100}{8} \quad BF = \frac{100}{6} \quad BF = \frac{100}{4} \quad BF = \frac{100}{3}$$

$$BF = 12,5 \quad BF = 16,7 \quad BF = 25 \quad BF = 33,3$$

$$BF = \frac{TS}{TF} \quad BF = \frac{TS}{TF}$$

$$BF = \frac{100}{2} \quad BF = \frac{100}{1}$$

$$BF = 50 \quad BF = 100$$

Setelah didapatkan hasil perhitungan pembobotan fungsi fasilitas pelayanandiatas, maka untuk mencari hirarki wilayah menurut kecamatan di Kota Pekanbaru dilakukan perhitungan dengan memasukkan nilai dari hasil perhitungan pembobotan fungsi fasilitas pelayanan.

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan *analisis indeks sentralitas marsall* untuk menentukan hirarki wilayah di Kota Pekanbaru maka dapat dilihat pada tabel 5.5 dibawah ini. Berikut tabel 5.5 penentuan *indeks sentralitas marsall* dan hirarki wilayah menurut kecamatan di Kota Pekanbaru.



Tabel 5.5 Penentuan Indeks Sentralitas Marsall Dan Hirarki Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Fasilitas Pelayanan																												IS								
		F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>4</sub>	F <sub>8</sub>	F <sub>9</sub>	F <sub>10</sub>	F <sub>11</sub>	F <sub>12</sub>	F <sub>13</sub>	F <sub>14</sub>	F <sub>15</sub>	F <sub>16</sub>	F <sub>20</sub>	F <sub>23</sub>	F <sub>24</sub>	F <sub>25</sub>	F <sub>26</sub>	F <sub>29</sub>	F <sub>33</sub>	F <sub>34</sub>	F <sub>35</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>5</sub>	F <sub>21</sub>	F <sub>6</sub>	F <sub>22</sub>	F <sub>31</sub>	F <sub>7</sub>		F <sub>19</sub>	F <sub>32</sub>	F <sub>30</sub>	F <sub>17</sub>	F <sub>28</sub>	F <sub>27</sub>	F <sub>18</sub>	
Tampan	307.947	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	9,09	9,09	10	11,1	11,1	12,5	0	16,7	0	25	0	33,3	0	0	313
Tenayan Raya	167.929	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	9,09	9,09	10	0	11,1	12,5	0	0	16,7	0	33,3	33,3	50	0	360
Marpoyan Damai	131.550	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	9,09	9,09	0	11,1	11,1	12,5	16,7	0	0	0	0	33,3	50	100	428	
Bukit Raya	105.177	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	9,09	9,09	10	11,1	11,1	12,5	16,7	16,7	16,7	0	0	0	0	0	288	
Payung Sekaki	91.255	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	9,09	9,09	10	0	0	12,5	16,7	16,7	0	25	33,3	0	0	0	307	
Senapelan	36.581	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	9,09	9,09	10	11,1	11,1	12,5	0	0	16,7	25	0	0	0	0	280	
Sukajadi	47.420	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	9,09	9,09	10	11,1	11,1	0	16,7	16,7	0	0	0	0	0	0	259	
Lima Puluh	41.466	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	9,09	0	0	11,1	11,1	12,5	16,7	16,7	0	25	0	0	0	0	277	
Pekanbaru Kota	25.062	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	9,09	9,09	10	11,1	11,1	0	0	0	16,7	0	33,3	0	0	0	275	
Sail	21.438	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	9,09	9,09	10	11,1	0	12,5	0	0	16,7	0	0	0	0	0	0	243
Rumbai Pesisir	73.784	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	0	9,09	10	11,1	11,1	0	16,7	0	0	0	0	0	0	0	233	
Rumbai	67.654	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	9,09	9,09	10	0	0	0	0	16,7	16,7	0	0	0	0	0	0	236
<b>TFT</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Hasil Analisis, 2020



Untuk memudahkan dalam perhitungan penentuan *indeks sentralitas marsall* dan hirarki wilayah menurut kecamatan di Kota Pekanbaru harus mencari terlebih dahulu nilai orde dan nilai interval, dengan rumus (Farizal, dkk, 2011) :

$$\text{Orde} = 1 + 3.3 \log (n)$$

Berikut perhitungan untuk penentuan orde dalam penentuan hirarki wilayah :

$$\begin{aligned} \text{Orde} &= 1 + 3.3 \log (n) \\ &= 1 + 3.3 \log (12) \\ &= 1 + 3.3 (1,079) \\ &= 5 \end{aligned}$$

Maka diketahui nilai orde ialah 5 (lima), diketahui bahwa hirarki dalam pusat – pusat pertumbuhan ada 5 hirarki wilayah. Untuk menentukan hirarki I, hirarki II dan seterusnya, terlebih dahulu harus menenukan nilai interval dengan rumus (Farizal, dkk, 2011) :

$$\text{Interval} = \frac{\text{Max} - \text{Min}}{k}$$

Berikut perhitungan interval dalam penentuan hirarki wilayah :

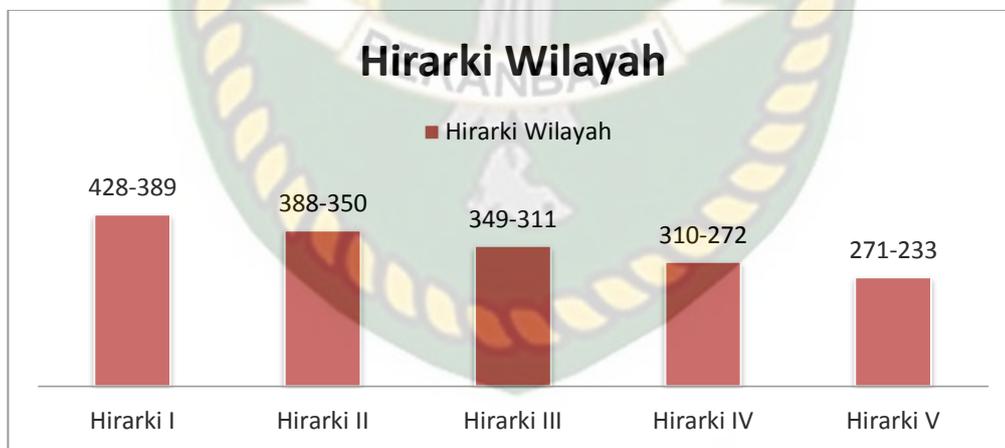
$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Max} - \text{Min}}{k} \\ &= \frac{428 - 233}{5} \\ &= 39 \end{aligned}$$

Maka hasil dari perhitungan hasil interval ialah 39 (tiga puluh sembilan). Untuk menentukan hirarki wilayah dapat dilihat pada tabel 5.6 dan gambar 5.2 dibawah ini Berikut tabel 5.6 penentuan hirarki wilayah menurut kecamatan di Kota Pekanbaru dan gambar 5.2 grafik hirarki wilayah di Kota Pekanbaru.

**Tabel 5.6 Penentuan Hirarki Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru**

No	Hirarki	Interval	Kecamatan
1.	Hirarki I	428 – 389	Marpoyan Damai
2.	Hirarki II	388 – 350	Tenayan
3.	Hirarki III	349 – 311	Tampan
4.	Hirarki IV	310 – 272	Bukit Raya, Payung Sekaki, Senapelan, Lima Puluh, dan Pekanbaru Kota
5.	Hirarki V	271 - 233	Sukajadi, Sail, Rumbai Pesisir dan Rumbai

Sumber : Hasil Analisis, 2020



**Gambar 5.2**  
**Grafik Hirarki Wilayah**  
 Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari tabel dan gambar diatas diketahui bahwa hirarki yang terbentuk ada lima (V) menurut kecamatan di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Hirarki I (Pusat Regional)

Hirarki I (Pusat Regional) berdasarkan *analisis indeks sentralitas marsall* diketahui bahwa yang menjadi hirarki I ialah Kecamatan Marpoyan Damai dengan total pembobotan indeks sentralitas marsall sebesar 428. Sehingga kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru ialah Kecamatan Marpoyan Damai.

2. Hirarki II (Pusat Distrik)

Hirarki II (Pusat Distrik) berdasarkan *analisis indeks sentralitas marsall* diketahui bahwa yang menjadi pusat distrik atau hirarki II ialah Kecamatan Tenayan. Kecamatan Tenayan memiliki nilai pembobotan dengan nilai sentralitas sebesar 360.

3. Hirarki III (Pusat Sub Distrik)

Hirarki III (Pusat Sub Distrik) merupakan Kecamatan Tampan dengan nilai pembobotan sebesar 313. Kecamatan Tampan menjadi hirarki III karena berada di interval 349 – 311.

4. Hirarki IV (Pusat Lokal)

Hirarki IV dalam *analisis indeks sentralitas marsall* ialah Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Lima Puluh, dan Kecamatan Pekanbaru Kota. Kecamatan Bukit Raya dengan total nilai sentralitas sebesar 288. Kecamatan Payung Sekaki dengan total nilai sentralitas 307. Kecamatan Lima Puluh dengan total nilai sentralitas 277 dan

Kecamatan Pekanbaru Kota dengan total 275. Ke-empat kecamatan tersebut termasuk didalam hirarki IV karena nilai interval sebesar 310 – 277 dan dikategorikan sebagai hirarki IV.

5. Hirarki V

Hirarki V pada analisis ini diketahui bahwa nilai interval dari range 271 – 233. Kecamatan yang termasuk di dalam range nilai tersebut ialah Kecamatan Sukajadi dengan total nilai sentralitas 259. Kecamatan Sail dengan total nilai sentralitas 243. Kecamatan Rumbai dengan total nilai sentralitas 236 dan Kecamatan Rumbai Pesisir dengan total nilai sentralitas 233.

Dari *hasil analisis scalogram* dan *analisis indeks sentralitas marsall* maka diketahui hasil bahwa yang menjadi hirarki I berdasarkan ketesediaan fasilitas pelayanan adalah Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan Marpoyan Damai memiliki fasilitas pelayanan sebesar 30 fasilitas dari 35 fasilitas yang menjadi variabel penelitian. Sedangkan untuk nilai pembobotan berdasarkan analisis *indeks sentralitas marsall* Kecamatan Marpoyan Damai memiliki nilai pembobotan sebesar 428. Dari hasil analisis tersebut diketahui bahwa yang menjadi pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Berikut gambar 5.3 peta klasifikasi hirarki wilayah berdasarkan analisis indek sentralitas marsall.

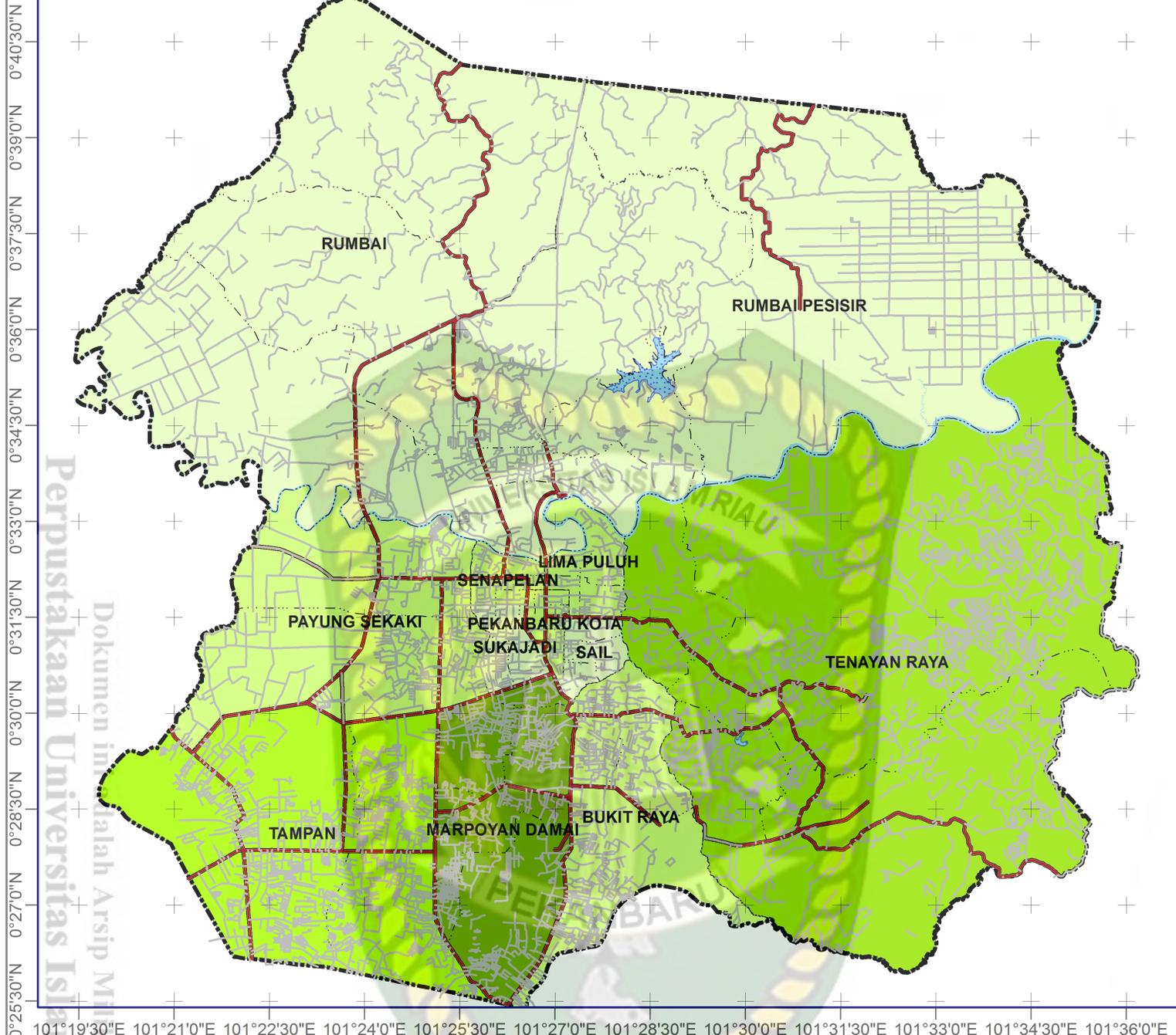
Peta hirarki wilayah 5.3



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

101°19'30"E 101°21'0"E 101°22'30"E 101°24'0"E 101°25'30"E 101°27'0"E 101°28'30"E 101°30'0"E 101°31'30"E 101°33'0"E 101°34'30"E 101°36'0"E



**No. Gambar**  
5.3

**PETA KLASIFIKASI HIRARKI BERDASARKAN ANALISIS INDEKS SENTRALITAS MARSALL**

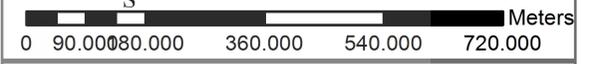
**Halaman**  
160



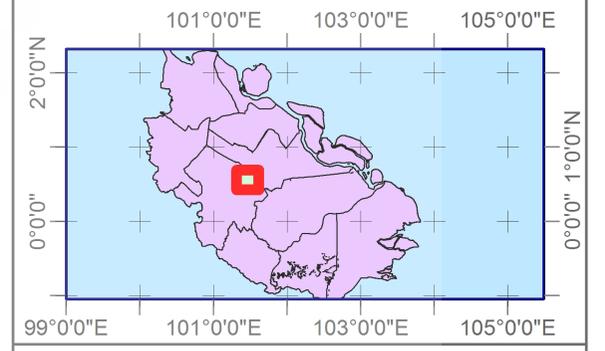
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS TEKNIK**



**SKALA**  
1:170.000



**INSET PETA**



**LEGENDA**

- Batas Kabupaten Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Sungai
- Air Danau
- Hirarki 1
- Hirarki 2
- Hirarki 3
- Hirarki 4
- Hirarki 5

**Dosen Pembimbing**  
PUJI ASTUTI, ST.,MT

Nama : Hera Yolanda Apriani  
NPM : 153410209

Sumber :  
RTRW KOTA PEKANBARU

101°19'30"E 101°21'0"E 101°22'30"E 101°24'0"E 101°25'30"E 101°27'0"E 101°28'30"E 101°30'0"E 101°31'30"E 101°33'0"E 101°34'30"E 101°36'0"E

Perustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip MIPA

### 5.1.3 Identifikasi Lokasi Pusat – Pusat Pertumbuhan di Kota Pekanbaru berdasarkan Prioritas Keputusan *Stakeholder*

Untuk menentukan prioritas lokasi pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru maka analisis selanjutnya yang digunakan adalah analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*), sedangkan alat yang digunakan adalah *software expert choice 11*. AHP dapat membantu dalam menetapkan prioritas dan membuat keputusan. AHP tidak hanya membantu dalam memilih keputusan yang tepat, tetapi juga memberikan pemikiran atau alasan jelas. Karena sudah didapatkan kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan analisis yang sebelumnya, maka bagan AHP dapat disempurnakan seperti yang terlihat pada gambar 5.4 Pohon *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Penentuan Pusat –Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru

Kriteria Tingkat I

Keuntungan Lokasi

Potensi Ekonomi

Potensi Lingkungan

Kriteria Tingkat II

Jarak

Jumlah Penduduk

Sektor Primer

Sektor Sekunder

Sektor Tersier

Daya Dukung Lingkungan

Kesesuaian Lahan

Fasilitas Ekonomi

Fasilitas Pendidikan

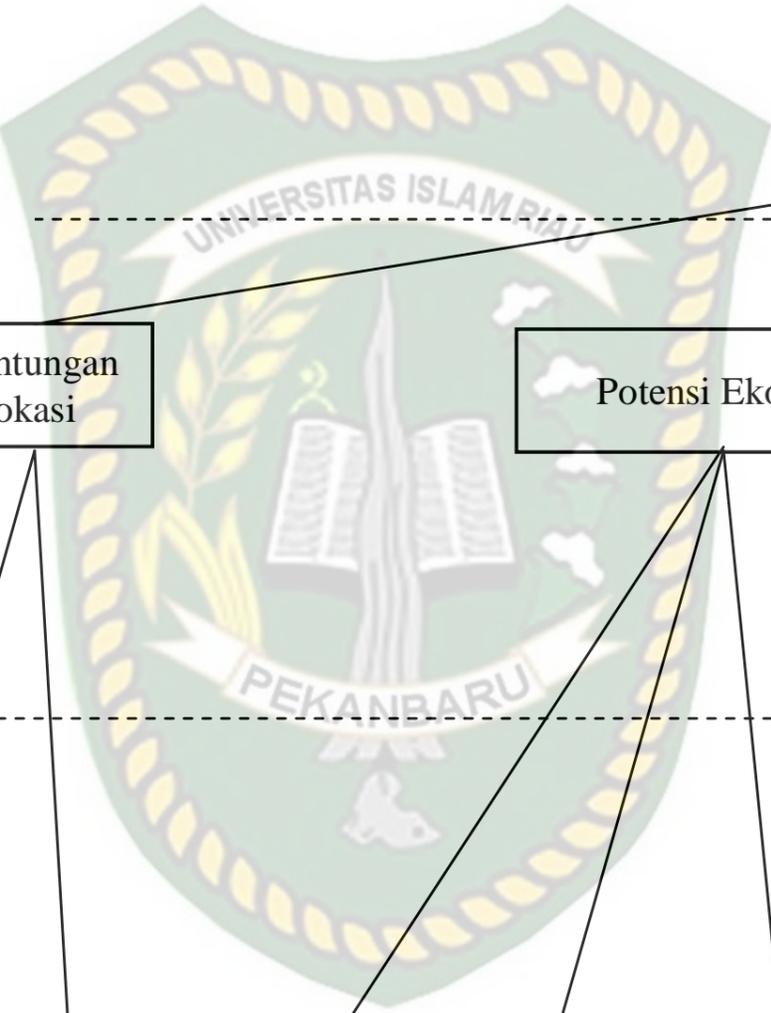
Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Peribadatan

Alternatif

Kecamatan Marpoyan Damai

Kecamatan Tenayan P



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dalam menentukan prioritas lokasi pusat – pusat pertumbuhan ini didahului dengan penyebaran kuesioner (lampiran) kepada *stakeholder*, adapun *stakeholder* dalam kuesioner penelitian ini ialah yang terlibat langsung atau mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru dalam hirarki proses beserta kepentingan masing – masing *stakeholder*. Berikut tabel 5.7 responden (*stakeholder* ahli) dalam kuesioner AHP.

**Tabel 5.7 Responden (Stakeholder Ahli) Dalam Kuesioner AHP**

No	Kode Responden	Stakeholder Pemerintahan	Nama Responden	Jabatan
1.	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	Joenaf Riko, ST, M.Eng	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
2.	02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru	Syaiful Agustianto	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang
3.	03	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru	Sri Suryanti, ST	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
4.	04	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru	Nugraheni Restu Kusumaningrum, SE, M. Si	Kepala Sub Bidang Ekonomi
5.	05	Badan Penelitian dan Pengembanagan	Ir. Yetti Suryati	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6.	06	Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru	Hafiz Yuni Andra, S.Tr	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
7.	07	Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru	Arief Widiandyah, ST	Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Dasar Dan Tematik

Sumber : Hasil Analisis, 2020

**1. Prioritas Keputusan Kriteria Tingkat I, Kriteria Tingkat II dan Alternatif Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru Menurut Responden 01**

**– Pembobotan Setiap Elemen Kriteria Tingkat I**

Berdasarkan hasil analisis responden 01, didapat prioritas keputusan I dengan nilai tertinggi adalah potensi ekonomi dengan nilai 0,561, prioritas keputusan II yaitu kriteria fasilitas pelayanan dengan nilai 0,274, prioritas III yaitu keuntungan lokasi dengan nilai 0,274 dan prioritas IV yaitu potensi lingkungan dengan nilai 0,069. Untuk lebih jelasnya nilai setiap prioritas keputusan pusat pertumbuhan dapat dilihat pada tabel 5.8 dan dibawah ini.

**Tabel 5.8 Nilai Prioritas Kriteria Tingkat I**

<b>Kriteria Tingkat I</b>	<b>Nilai</b>
Potensi Ekonomi	0,561
Fasilitas Pelayanan	0,274
Keuntungan Lokasi	0,096
Potensi Lingkungan	0,069

*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

**– Pembobotan Setiap Elemen Kriteria Tingkat II**

Berdasarkan hasil analisis dari responden 01 setiap elemen kriteria tingkat II diketahui bahwa kriteria tingkat II memiliki nilai yang berbeda – beda. Untuk nilai prioritas keputusan tertinggi berada di kriteria jarak dengan nilai 0,667 dan nilai kriteria proritas ke II yaitu pada sektor sekunder dengan nilai 0,637.

Untuk melihat hasil analisis lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.9 dibawah ini. Berikut tabel 5.9 nilai prioritas kriteria tingkat II

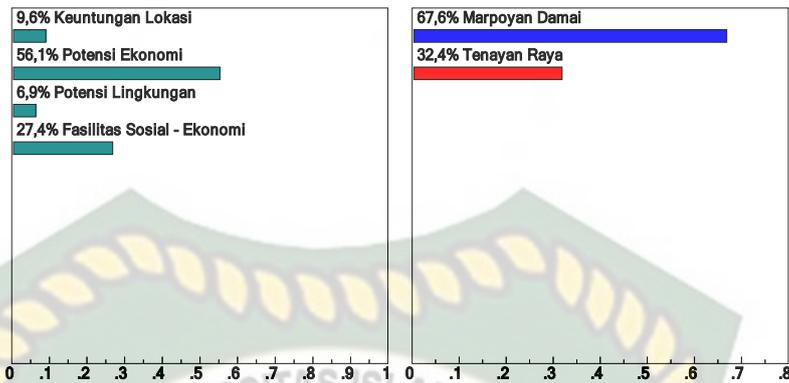
**Tabel 5.9 Nilai Prioritas Kriteria Tingkat II**

<b>Kriteria Tingkat II</b>	<b>Nilai</b>
Jarak	0,667
Jumlah Penduduk	0,333
Sektor Primer	0,105
Sektor Sekunder	0,637
Sektor Tersier	0,258
Daya Dukung Lingkungan	0,500
Kesesuaian Lahan	0,500
Fasilitas Ekonomi	0,185
Fasilitas Kesehatan	0,191
Fasilitas Pendidikan	0,272
Fasilitas Kelembagaan	0,035
Fasilitas Peribadatan	0,105
Fasilitas Kebudayaan Dan Rekreasi	0,063
Fasilitas Ruang Terbuka, Taman, Lapangan Olahraga	0,149

*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

– **Pembobotan Setiap Elemen Kriteria Terhadap Hasil Alternatif**

Berdasarkan hasil analisis dari responden 01 maka diketahui bahwa kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dalam pemilihan alternatif dengan menggunakan analisis AHP yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.5 Berikut gambar 5.5 hasil alternatif terhadap kriteria I.

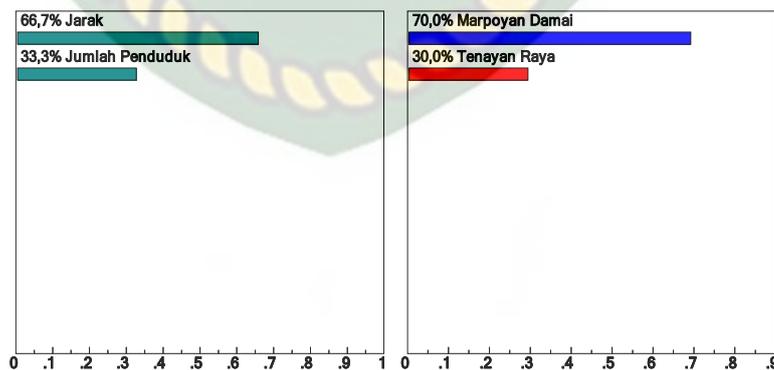


Gambar 5.5

**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat I**

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan Hasil Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi Diketahui Bahwa Kriteria Jarak Dengan Hasil 70,0% Sedangkan Jumlah Penduduk Hanya Berjumlah 30,0%. Dalam hasil penilaian alternatif kecamatan yang menjadi prioritas keputusan dari hasil pembobotan alternatif terhadap kriteria tingkat II yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan total pembobotan 70,0%. Berikut gambar 5.6 alternatif penilaian kriteria tingkat II keuntungan lokasi.

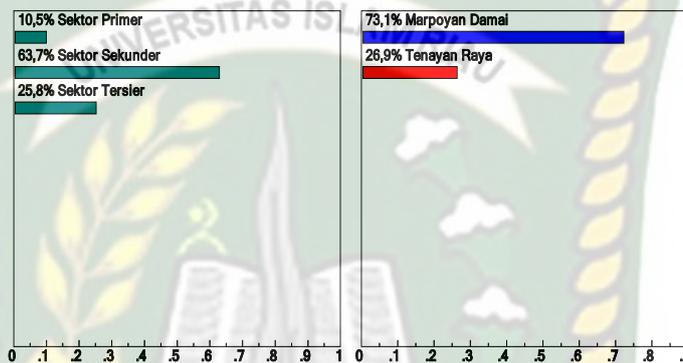


Gambar 5.6

**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi**

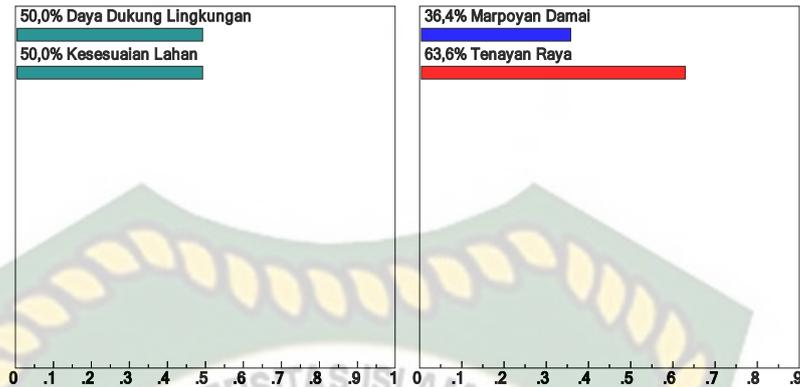
Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil analisis alternatif terhadap kriteria tingkat II diketahui bahwa Nilai tertinggi dari prioritas keputusan hasil alternatif tingkat II yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan total 73,1%. Penilaian kriteria tingkat II tertinggi berdasarkan potensi ekonomi yaitu sektor sekunder sebesar 63,7%. Berikut gambar 5.7 alternatif penilaian kriteria tingkat II Potensi Ekonomi



**Gambar 5.7**  
**Alternatif kriteria tingkat II Potensi Ekonomi**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

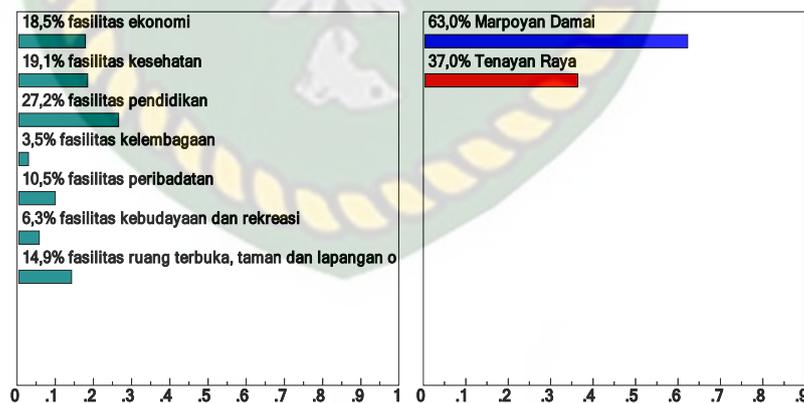
Berdasarkan hasil alternatif kriteria tingkat II berdasarkan Potensi Lingkungan yang menjadi alternatif kecamatan pusat – pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Tenayan Raya dengan total nilai 63,6%. Hasil ini dapat dilihat bahwa Kecamatan Tenayan Raya mempunyai kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan dengan total nilai 50,0%. Berikut gambar 5.8 alternatif penilaian kriteria tingkat II Potensi Lingkungan



**Gambar 5.8**  
**Alternatif Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan**

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari hasil alternatif penilaian kriteria tingkat II terhadap fasilitas Pelayanan diketahui bahwa yang menjadi prioritas keputusan terhadap lokasi pusat – pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan total nilai hasil analisis yaitu 63,0%. Sedangkan Kecamatan Tenayan Raya hanya memiliki total nilai sebesar 37,0%. Berikut gambar 5.9 alternatif penilaian kriteria tingkat II fasilitas pelayanan.



**Gambar 5.9**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan**

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari hasil analisis diatas diketahui bahwa kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru pada penilaian alternatif terhadap kriteria tingkat I dan kriteria tingkat II yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Dapat disimpulkan bahwa menurut responden 01 Bapak Joenaf Rico dengan jabatan Kasi Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan hasil perolehan *analysis hierarchy Process* ialah Kecamatan Marpoyan Damai.

**2. Prioritas Keputusan Kriteria Tingkat I, Kriteria Tingkat II dan Alternatif Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru Menurut Responden 02**

**– Pembobotan Setiap Elemen Kriteria Tingkat I**

Berdasarkan hasil analisis dari responden 02 diketahui bahwa hasil prioritas I dalam kriteria tingkat I yaitu kriteria fasilitas pelayanan dengan nilai 0,540. Sedangkan kriteria prioritas II berada di kriteria keuntungan lokasi dengan total nilai 0,182. Untuk lebih jelasnya nilai prioritas kriteria tingkat I dapat dilihat pada tabel 5.10 dibawah ini. Berikut tabel 5.10 Nilai prioritas kriteria tingkat I.

**Tabel 5.10 Nilai Prioritas Kriteria Tingkat I**

Kriteria Tingkat I	Nilai
Fasilitas Pelayanan	0,540
Keuntungan lokasi	0,182
Potensi ekonomi	0,175
Potensi lingkungan	0,102

Sumber : Hasil Analisis, 2020

– **Pembobotan Setiap Elemen Kriteria Tingkat II**

Hasil pembobotan setiap elemen kriteria tingkat II terhadap responden 02 memiliki nilai tertinggi sebesar 0,500 dengan kriteria jarak, jumlah penduduk, daya dukung lingkungan dan kesesuaian lahan. Sedangkan prioritas dengan nilai terendah berada pada kriteria fasilitas kelembagaan. Untuk lebih jelasnya hasil kriteria tingkat II dapat dilihat pada tabel 5.11 dibawah ini. Berikut tabel 5.11 nilai prioritas kriteria tingkat II

**Tabel 5.11 Nilai Prioritas Kriteria Tingkat II**

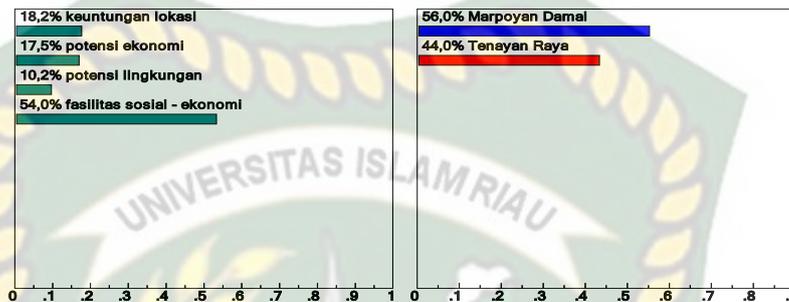
<b>Kriteria tingkat II</b>	<b>Nilai</b>
Jarak	0,500
Jumlah penduduk	0,500
Sektor primer	0,333
Sektor sekunder	0,333
Sektor tersier	0,333
Daya dukung lingkungan	0,500
Kesesuaian lahan	0,500
Fasilitas ekonomi	0,170
Fasilitas kesehatan	0,200
Fasilitas pendidikan	0,129
Fasilitas kelembagaan	0,081
Fasilitas peribadatan	0,165
Fasilitas kebudayaan dan rekreasi	0,116
Fasilitas ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga	0,139

*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

– **Pembobotan Setiap Elemen Kriteria Terhadap Hasil Alternatif**

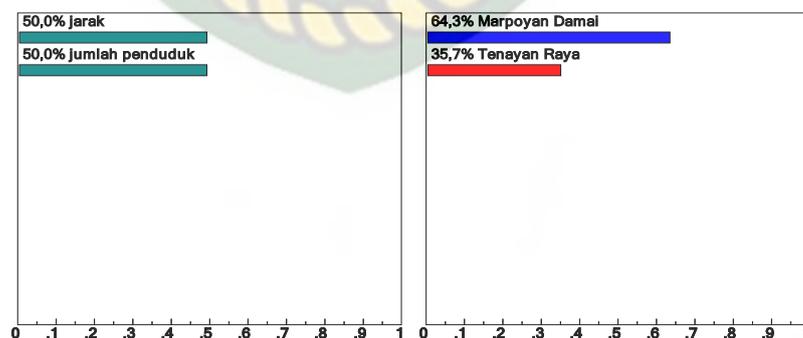
Berdasarkan hasil pembobotan alternatif responden 02 maka diketahuilah alternatif pemilihan lokasi berdasarkan kriteria tingkat I yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan nilai pembobotan 56,0%. Kecamatan Marpoyan Damai layak menjadi pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru.

Untuk lebih jelasnya hasil pembobotan alternatif terhadap kriteria tingkat II dapat dilihat pada gambar 5.10 dibawah ini. Berikut gambar 5.9 Alternatif penilaian kriteria tingkat I.



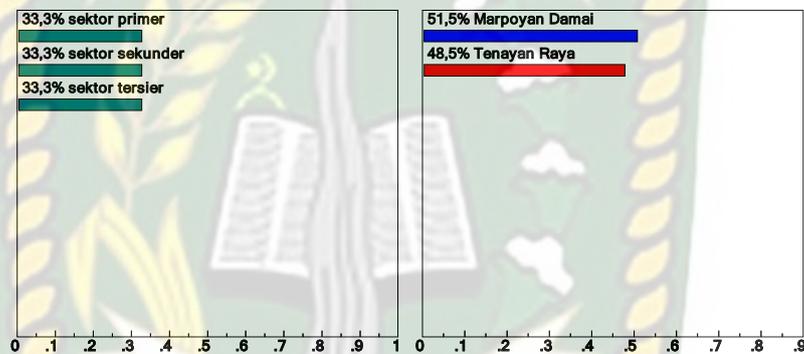
**Gambar 5.10**  
**Alternatif penilaian kriteria tingkat 1**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil analisis alternatif terhadap keuntungan lokasi terhadap kriteria tingkat I yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan total nilai 64,3%. Sedangkan Kecamatan Tenayan Raya hanya memiliki hasil dengan total 35,7%. Untuk melihat hasil alternatif terhadap kriteria tingkat II keunungan lokasi dapat dilihat pada gambar 5.10 dibawah ini. Berikut gambar 5.10 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II Keuntungan lokasi.



**Gambar 5.11**  
**Alternatif Penilaian Terhadap Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

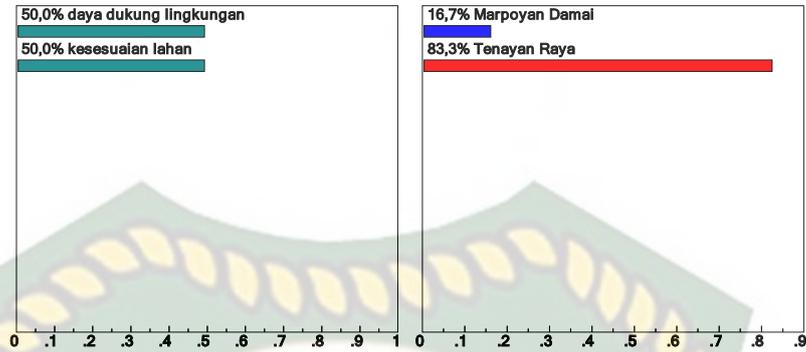
Berdasarkan hasil alternatif terhadap kriteria tingkat II potensi ekonomi diketahui bahwa yang menjadi pusat – pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan total nilai sebesar 51,5%. Penilaian alternatif kriteria tingkat II potensi ekonomi dapat dilihat dari hasil perhitungan kriteria sektor primer, sekunder dan tersier dengan total nilai 33,3%. Berikut gambar 5.12 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II potensi ekonomi.



**Gambar 5.12**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi**

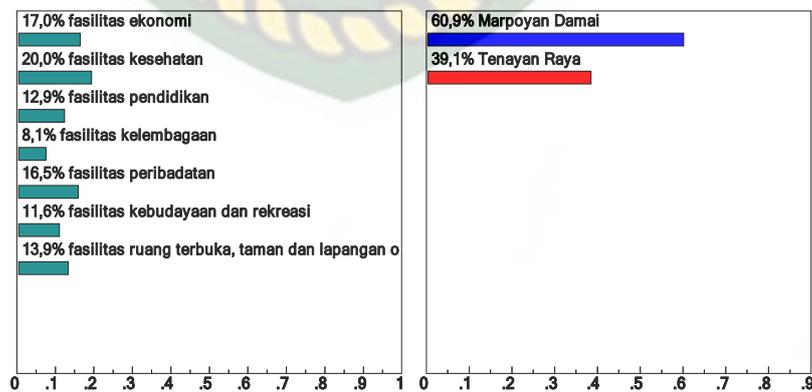
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil analisis alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II potensi lingkungan, diketahui kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan terhadap hasil penilaian alternatif yaitu Kecamatan Tenayan Raya dengan nilai sebesar 83,3%. Untuk lebih jelasnya hasil penilaian alternatif terhadap kriteria potensi lingkungan dapat dilihat pada gambar 5.13 dibawah ini. Berikut gambar 5.13 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II potensi lingkungan.



**Gambar 5.13**  
**Alternatif Pemilihan Lokasi Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan perhitungan alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II fasilitas pelayanan. Kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan di Koa Pekanbaru yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan total nilai 60,9%. Untuk Kecamatan Tenayan Raya dari total keseluruhan fasilitas pelayanan hasil penilaian alternatif yaitu 39,1%. Untuk lebih jelasnya hasil penilaian prioritas keputusan *stakeholder* alternatif terhadap kriteria tingkat II fasilitas pelayanan dapat dilihat pada gambar 5.14 dibawah ini. Berikut gambar 5.14 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II fasilitas pelayanan.



**Gambar 5.14**  
**Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Dari hasil analisis secara keseluruhan terhadap prioritas keputusan pemilihan lokasi, yang menjadi pusat – pusat pertumbuhan berdasarkan penilaian kriteria tingkat I dan kriteria tingkat II yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Hasil ini diperoleh dari responden 02 Bapak Syaiful Agustianto dengan Jabatan Kasi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Kecamatan Marpoyan Damai layak menjadi Pusat – pusat pertumbuhan berdasarkan hasil perhitungan dari responden 02.

**3. Prioritas Keputusan Kriteria Tingkat I, Kriteria Tingkat II dan Alternatif Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru Menurut Responden 03**

**– Pembobotan Setiap Elemen Kriteria Tingkat I**

Berdasarkan hasil analisis kriteria tingkat I diketahui hasil pembobotan kriteria tingkat I dengan nilai tertinggi yaitu kriteria potensi ekonomi dengan nilai 0,471. Untuk lebih jelas hasil dari pembobotan setiap elemen kriteria tingkat I maka dapat dilihat pada tabel 5.12 Dibawah ini. Berikut tabel 5.12 pembobotan nilai prioritas kriteria tingkat I

**Tabel 5.12 Nilai Prioritas Kriteria Tingkat I**

<b>Kriteria Tingkat I</b>	<b>Nilai</b>
Potensi Ekonomi	0,471
Fasilitas Pelayanan	0,342
Keuntungan Lokasi	0,119
Potensi Lingkungan	0,068

*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

– **Pembobotan Setiap Elemen Kriteria Tingkat II**

Berdasarkan hasil pembobotan setiap elemen kriteria tingkat II terhadap responden 03. Diketahui hasil pembobotan terhadap 14 kriteria memiliki nilai yang berbeda – beda. Untuk melihat hasil nilai prioritas keputusan *skeholder* kriteria tingkat II dapat dilihat pada tabel 5.13 Dibawah ini. Berikut tabel 5.13 nilai prioritas kriteria tingkat II.

**Tabel 5.13 Nilai prioritas kriteria tingkat II**

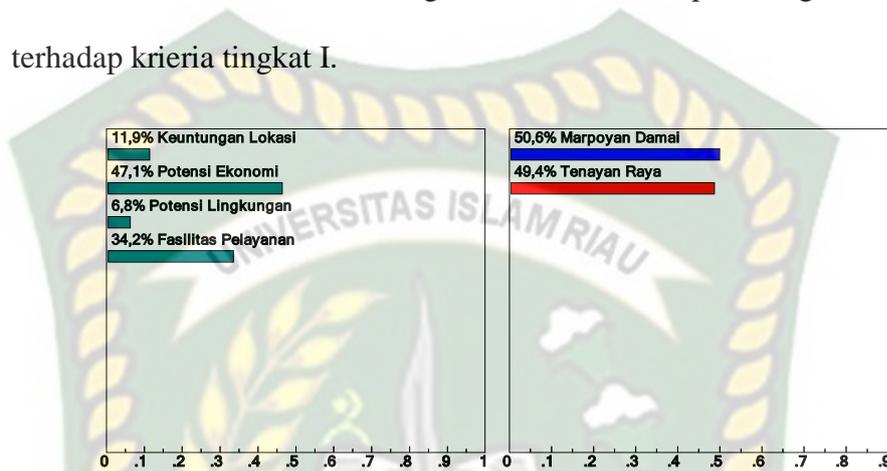
Kriteria Tingkat II	Nilai
Jarak	0,875
Jumlah Penduduk	0,125
Sektor Primer	0,114
Sektor Sekunder	0,481
Sektor Tersier	0,405
Daya Dukung Lingkungan	0,500
Kesesuaian Lahan	0,500
Fasilitas Ekonomi	0,309
Fasilitas Kesehatan	0,161
Fasilitas Pendidikan	0,174
Fasilitas Kelembagaan	0,090
Fasilitas Peribadatan	0,130
Fasilitas Kebudayaan Dan Rekreasi	0,048
Fasilitas Ruang Terbuka, Taman Dan Lapangan Olahraga	0,088

Sumber : Hasil Analisis, 2020

– **Pembobotan Setiap Elemen Kriteria Terhadap Hasil Alternatif**

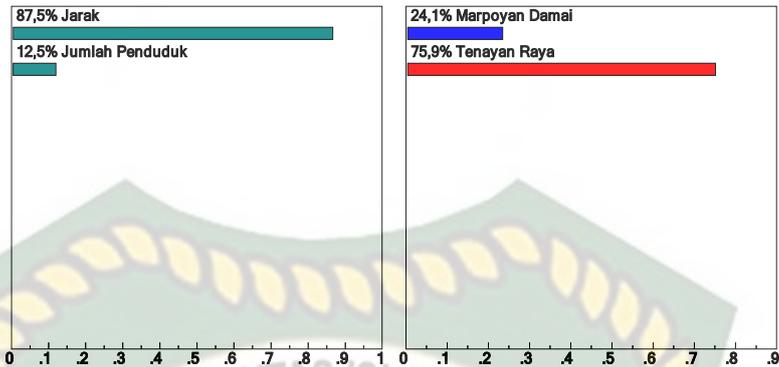
Berdasarkan hasil pembobotan setiap elemen kriteria tingkat I dan kriteria tingkat II terhadap hasil alternatif, diketahui hasil alternatif kecamatan terhadap penentuan pusat pertumbuhan berdasarkan *analysis hierarchy process* yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Untuk lebih jelasnya hasil pembobotan alternatif terhadap kriteria tingkat I dan kriteria tingkat II dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Hasil analisis menggunakan

analisis AHP yang menjadi prioritas keputusan penilaian alternatif terhadap kriteria tingkat I yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan total nilai sebesar 50,6%. Berikut gambar 5.15 hasil perhitungan alternatif terhadap kriteria tingkat I.



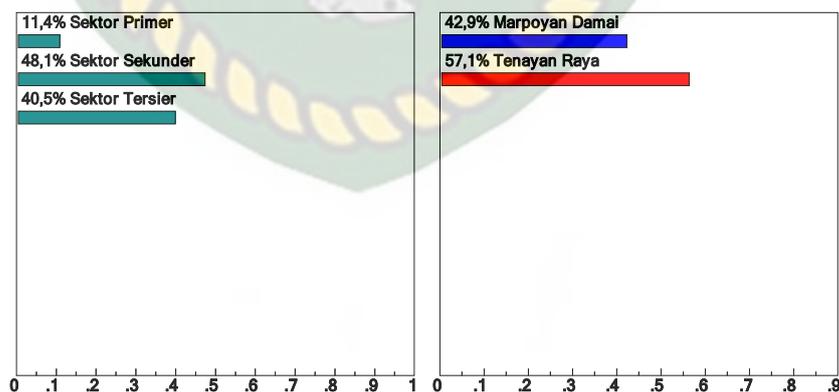
**Gambar 5.15**  
**Hasil Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat I**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Hasil perhitungan alternatif terhadap penilaian kriteria tingkat II keuntungan lokasi dengan kriteria jarak dan jumlah penduduk yaitu Kecamatan Tenayan Raya dengan nilai 75,9%, sedangkan Kecamatan Marpoyan Damai dengan total nilai sebesar 24.1%. dapat disimpulkan bahwa pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru berdasarkan alternatif terhadap kriteria tingkat II keuntungan lokasi yaitu Kecamatan Tenayan Raya. Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan alternatif kriteria keuntungan lokasi dapat dilihat pada gambar 5.16 dibawah ini. Berikut gambar 5.16 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II keuntungan lokasi.



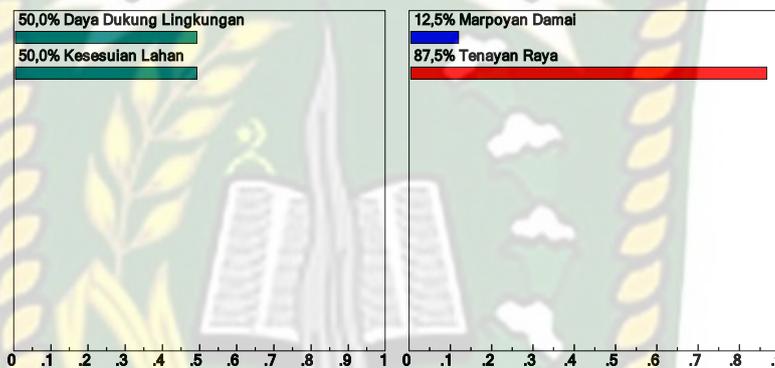
**Gambar 5.16**  
**Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil analisis pemilihan lokasi pusat – pusat pertumbuhan terhadap alternatif penilaian kriteria tingkat II Potensi Ekonomi, Kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Tenayan Raya dengan total 57,1%. Penilaian kriteria dihitung berdasarkan dari hasil penilaian terhadap kriteria sektor primer, sektor sekunder, sektor tersier. Berikut gambar 5.17 hasil perhitungan alternatif penilaian kriteria tingkat II potensi ekonomi.



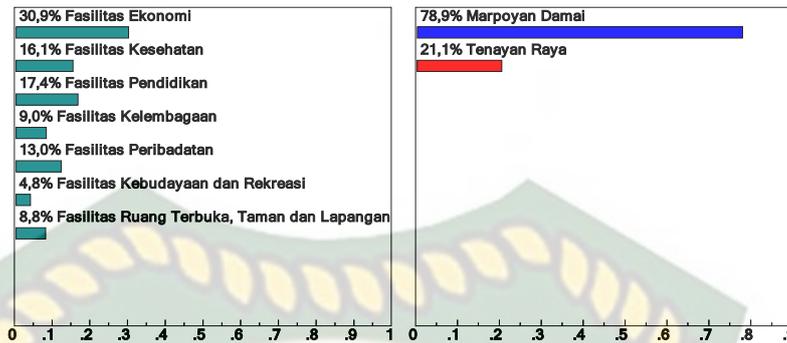
**Gambar 5.17**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil analisis penilaian kriteria tingkat II potensi lingkungan, Kecamatan Tenayan Raya memperoleh nilai tertinggi dibandingkan Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan Teanayan Raya dengan total 87,5%. Hasil ini dilihat dari hasil penilaian terhadap kriteria daya dukung lingkungan dan kriteria kesesuaian lahan. Berikut gambar 5.18 alternatif penilaian kriteria tingkat II potensi lingkungan.



**Gambar 5.18**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Kesesuaian Lahan**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil analisis penilaian kriteria tingkat II fasilitas pelayanan. Kecamatan Marpoyan Damai memperoleh nilai tertinggi sebesar 78,9% sedangkan Kecamatan Tenayan Raya dengan total 21,1%. Hasil ini dilihat dari hasil penilaian terhadap kriteria daya dukung lingkungan dan kriteria kesesuaian lahan. Berikut gambar 5.19 alternatif kriteria tingkat II fasilitas pelayanan.



**Gambar 5.19**  
**Hasil Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Hasil analisis responden 03 Ibu Sri Suryanti, ST dengan jabatan Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik Dan Prasarana Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Pekanbaru. Prioritas keputusan terhadap penentuan pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru berdasarkan penilaian terhadap kriteria tingkat I dan kriteria tingkat II yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan ini layak menjadi pusat – pusat pertumbuhan dilihat dari hasil terhadap seluruh kriteria yang menjadi variabel penelitian.

**4. Prioritas Keputusan Kriteria Tingkat I, Kriteria Tingkat II dan Alternatif Pusat - Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru Menurut Responden 04**

**– Pembobotan Setiap Elemen Terhadap Kriteria Tingkat I**

Berdasarkan hasil kriteria tingkat 1 terhadap responden 04 diketahui hasil prioritas keputusan *stakeholder* terhadap penilaian 4 kriteria yaitu fasilitas pelayanan memiliki nilai tertinggi dari 4 kriteria pembobotan setiap elemen.

Untuk melihat hasil pembobotan kriteria tingkat I dapat dilihat pada tabel 5.14 dibawah ini. Berikut tabel 5.14 Nilai prioritas penilaian tingkat I

**Tabel 5.14 Nilai Prioritas Terhadap Kriteria Tingkat I**

Kriteria tingkat I	Nilai
Fasilitas Pelayanan	0,433
Potensi Ekonomi	0,238
Keuntungan Lokasi	0,169
Potensi Lingkungan	0,161

Sumber : Hasil Analisis, 2020

– **Pembobotan Setiap Elemen Terhadap Kriteria Tingkat II**

Berdasarkan hasil analisis dari responden 04 diketahui nilai prioritas keputusan tertinggi terdapat pada kriteria jarak dengan perolehan nilai 0,875. Untuk melihat hasil pembobotan dari kriteria lainnya dapat dilihat pada tabel 5.15. dibawah ini. Berikut tabel 5.15 Nilai prioritas terhadap kriteria tingkat II

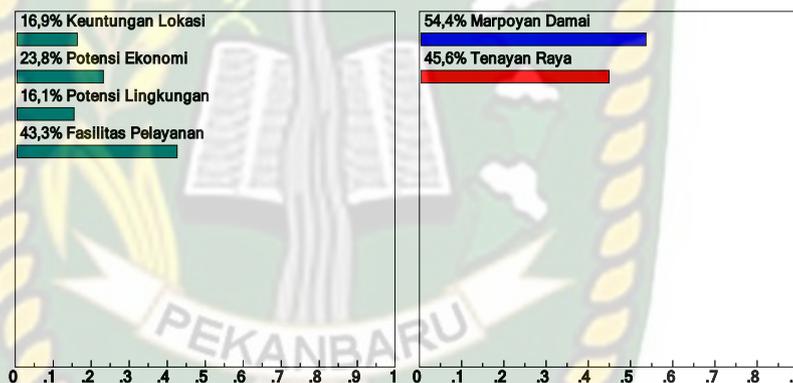
**Tabel 5.15 Nilai Prioritas Terhadap Kriteria Tingkat II**

Kriteria Tingkat Ii	Nilai
Jarak	0,875
Jumlah Penduduk	0,125
Sektor Primer	0,685
Sektor Sekunder	0,080
Sektor Tersier	0,234
Daya Dukung Lingkungan	0,500
Kesesuaian Lahan	0,500
Fasilitas Ekonomi	0,217
Fasilitas Kesehatan	0,169
Fasilitas Pendidikan	0,169
Fasilitas Kelembagaan	0,137
Fasilitas Peribadatan	0,212
Fasilitas Kebudayaan Dan Rekreasi	0,035
Fasilitas Ruang Terbuka, Taman Dan Lapangan Olahraga	0,060

Sumber : Hasil Analisis, 2020

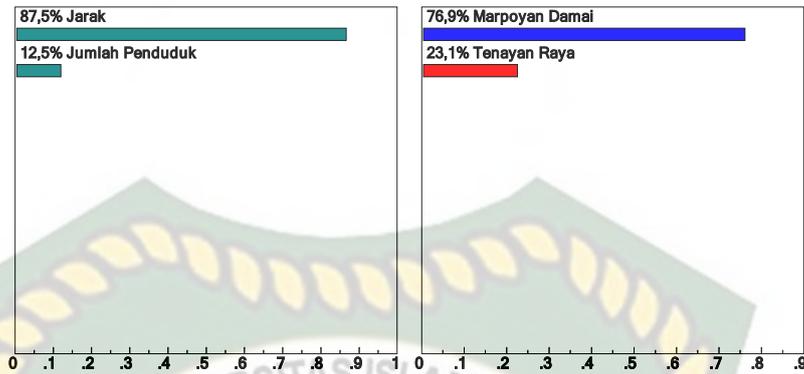
– **Pembobotan Setiap Elemen Kriteria Terhadap Hasil Alternatif**

Berdasarkan hasil dari alternatif terhadap tujuan penentuan pusat – pusat pertumbuhan diketahui bahwa pemilihan calon lokasi terhadap alternatif kecamatan di Kota Pekanbaru diketahui bahwa dari 4 kriteria tingkat I yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Untuk melihat hasil alternatif kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dapat dilihat pada gambar 5.20 dibawah ini. Berikut gambar 5.20 hasil analisis alternatif terhadap kriteria tingkat I



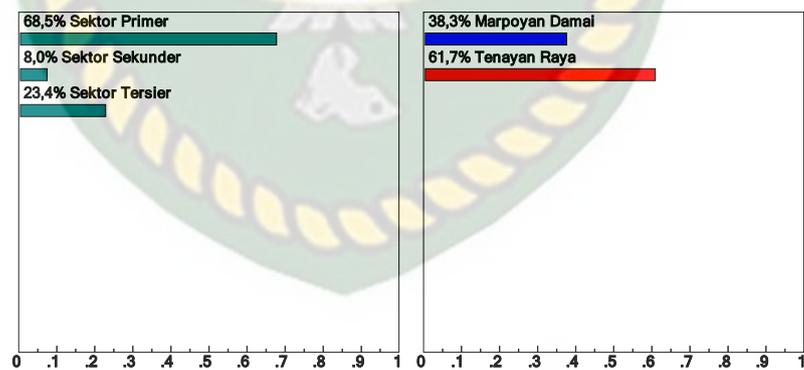
**Gambar 5.20**  
**Hasil Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat I**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil analisis alternatif terhadap kriteria tingkat II keuntungan lokasi diketahui bahwa kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan Marpoyan Damai memiliki jumlah nilai sebesar 76,9%. Kecamatan Tenayan Raya hanya memiliki nilai 23,1%. Berikut gambar 5.21 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II keuntungan lokasi.



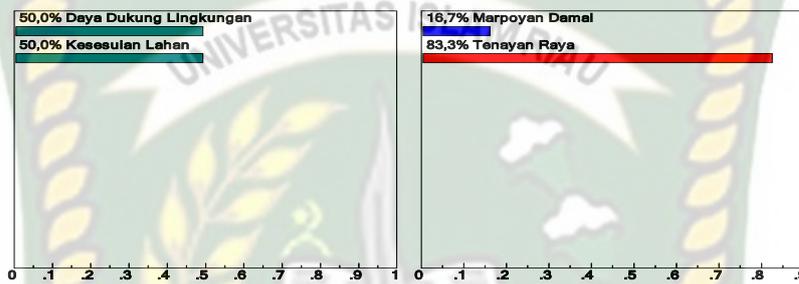
**Gambar 5.21**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil analisis alternatif terhadap kriteria tingkat II potensi ekonomi kecamatan yang memiliki nilai tertinggi terhadap kriteria tingkat II yaitu kecamatan tenayan raya dengan total penilaian 61,7%. Kecamatan Marpoyan Damai dengan total penilaian terhadap kriteria tingkat II terhadap kriteria potensi ekonomisebesar38,3%. Berikut gambar 5.22 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II potensi ekonomi.



**Gambar 5.22**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

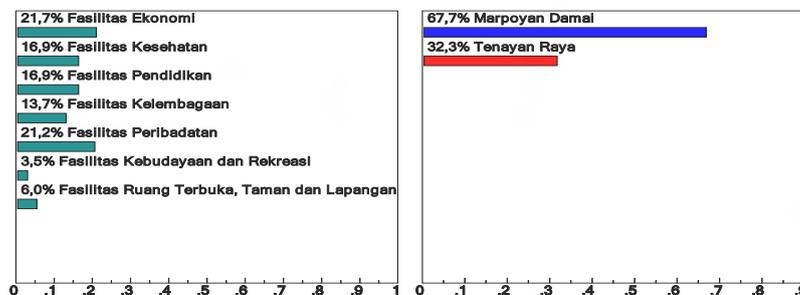
Berdasarkan hasil prioritas keputusan terhadap alternatif kriteria tingkat II potensi lingkungan, kecamatan yang layak menjadi pusat – pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Tenayan Raya dengan total nilai sebesar 83,3%. Berikut gambar 5.23 alternatif penilaian kriteria tingkat II potensi lingkungan.



**Gambar 5.23**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan**

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil analisis kriteria tingkat II yang menjadi alternatif prioritas keputusan terhadap penentuan pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan total 67,7%. Kecamatan Marpoyan Damai lebih unggul fasilitas pelayanan dibandingkan Kecamatan Tenayan Raya dengan total nilai 32,3%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.24 dibawah ini. Berikut gambar 5.24 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II fasilitas pelayanan.



**Gambar 5.24**  
**Hasil Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan**

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil diatas menurut responden 04 Ibu Nungraheni Restu Kusumaningrum, SE, M.Si jabatan Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup diketahui bahwa Kecamatan Marpoyan Damai memiliki nilai yang unggul dibandingkan Kecamatan Tenayan Raya. Penilaian dapat dilihat dari hasil analisis kriteria keuntungan lokasi, potensi ekonomi, potensi lingkungan dan fasilitas pelayanan.

**5. Prioritas Keputusan Kriteria Tingkat I, Kriteria Tingkat II dan Alternatif Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru Menurut Responden 05**

**– Pembobotan Setiap Elemen Terhadap Kriteria Tingkat I**

Pembobotan terhadap kriteria tingkat I terhadap responden 05 ialah potensi ekonomi dan fasilitas pelayanan dengan nilai kriteria sebesar 0,309. Keuntungan lokasi dengan nilai 0,241 dan potensi lingkungan sebesar 0,142. Untuk lebih jelas hasil pembobotan kriteria tingkat I dapat dilihat pada tabel 5.16. Berikut tabel 5.16 nilai prioritas kriteria tingkat I

**Tabel 5.16 Nilai Prioritas Kriteria Tingkat I**

<b>Kriteria Tingkat I</b>	<b>Nilai</b>
Potensi Ekonomi	0,309
Fasilitas Pelayanan	0,309
Keuntungan Lokasi	0,241
Potensi Lingkungan	0,142

*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

– **Pembobotan Setiap Elemen Terhadap Kriteria Tingkat II**

Kriteria tingkat II memiliki jumlah 14 kriteria. Dari masing – masing kriteria mempunyai nilai yang berbeda – beda setiap penilaiannya. Untuk lebih jelasnya hasil pembobotan kriteria tingkat II responden 05 dapat dilihat pada tabel 5.17 dibawah ini. Berikut tabel 5.17 Hasil pembobotan kriteria tingkat II

**Tabel 5.17 Hasil Pembobotan Kriteria Tingkat II**

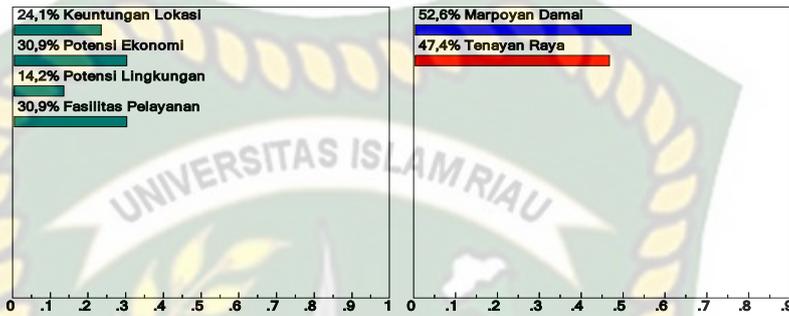
<b>Kriteria Tingkat II</b>	<b>Nilai</b>
Jarak	0,875
Jumlah Penduduk	0,125
Sektor Primer	0,086
Sektor Sekunder	0,618
Sektor Tersier	0,297
Daya Dukung Lingkungan	0,500
Kesesuaian Lahan	0,500
Fasilitas Ekonomi	0,255
Fasilitas Kesehatan	0,140
Fasilitas Pendidikan	0,225
Fasilitas Kelembagaan	0,118
Fasilitas Peribadatan	0,165
Fasilitas Kebudayaan Dan Rekreasi	0,039
Fasilitas Ruang Terbuka, Taman Dan Lapangan Olahraga	0,059

*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

– **Pembobotan Hasil Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat I Dan Kriteria Tingkat II**

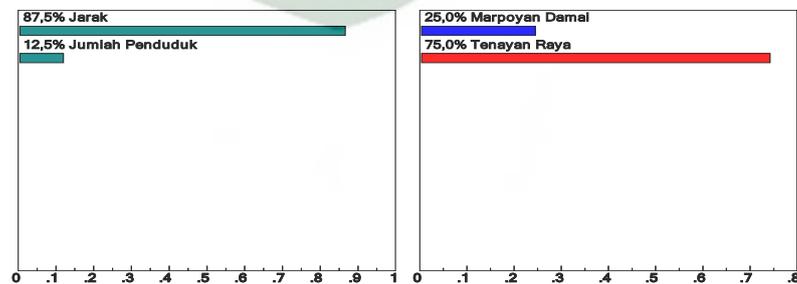
Hasil alternatif terhadap kriteria tingkat I ialah Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan Marpoyan Damai layak menjadi pusat – pusat pertumbuhan menurut perhitungan dari analisis AHP.

Untuk lebih jelasnya hasil analisis alternatif terhadap kriteria tingkat I dan Kriteria Tingkat II dapat dilihat pada gambar 5.25 dibawah ini. Berikut gambar 5.25 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat I



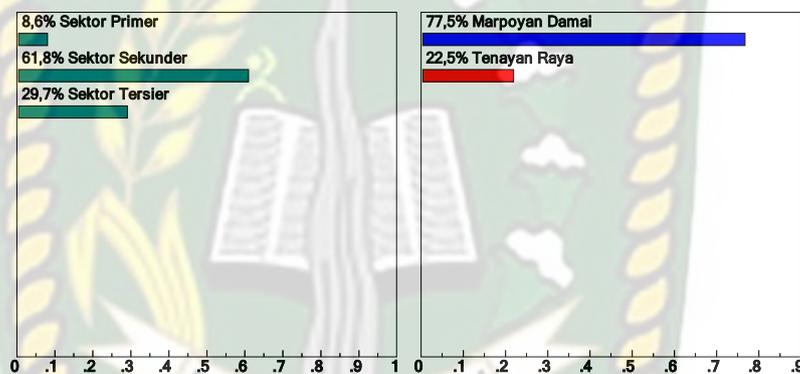
**Gambar 5.25**  
**Hasil Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat I**  
 Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II keuntungan lokasi diketahui bahwa kecamatan yang memiliki nilai tertinggi terhadap penilaian kriteria keuntungan lokasi yaitu Kecamatan Tenayan Raya. Kecamatan Tenayan Raya memiliki nilai sebesar 75,0% sedangkan Kecamatan Marpoyan Damai hanya memiliki nilai sebesar 25,0%. Berikut gambar 5.26 alternatif penilaian kriteria tingkat II Keuntungan Lokasi.



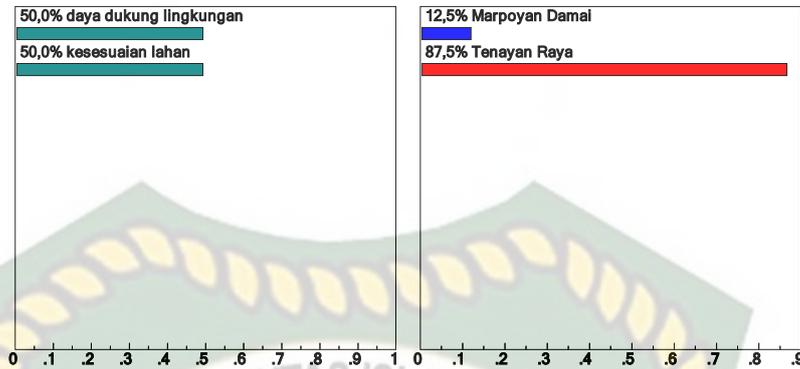
**Gambar 5.26**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi**  
 Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil analisis penilaian alternatif kriteria tingkat II potensi ekonomi, Kecamatan Marpoyan Damai memiliki nilai lebih unggul terhadap kriteria tingkat II potensi ekonomi dibandingkan Kecamatan Tenayan Raya. Kecamatan Marpoyan Damai memiliki jumlah nilai sebesar 77,5% sedangkan Kecamatan Tenayan Raya sebesar 22,5%. Berikut gambar 5.27 alternatif penilaian kriteria tingkat II potensi ekonomi.



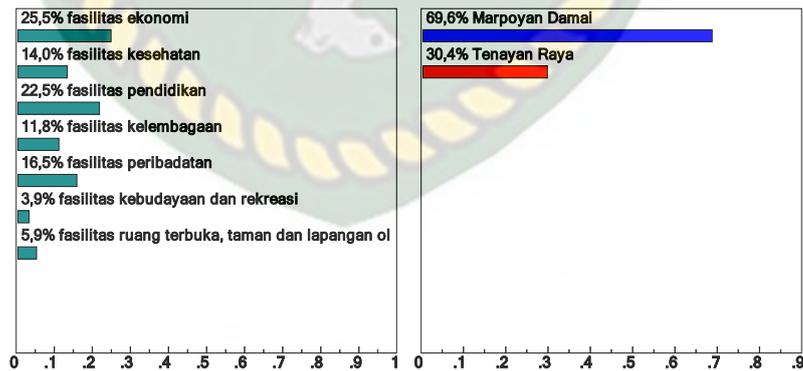
**Gambar 5.27**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan penilaian alternatif kriteria tingkat II terhadap kriteria potensi lingkungan, Kecamatan Marpoyan Damai sebesar 12,5%. Sedangkan Kecamatan Tenayan Raya terhadap kriteria tingkat II memiliki nilai sebesar 87,5%. Kecamatan Tenayan Raya lebih unggul potensi lingkungan dibandingkan Kecamatan Marpoyan Damai. Berikut gambar 5.28 alternatif penilaian kriteria tingkat II potensi lingkungan.



**Gambar 5.28**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil perhitungan alternatif terhadap kriteria tingkat II fasilitas pelayanan diketahui yang memiliki nilai prioritas keputusan tertinggi yaitu kecamatan Marpoyan Damai dengan total nilai 69,6%. Kecamatan Marpoyan Damai memiliki fasilitas pelayanan yang baik dan lengkap dibandingkan Kecamatan Tenayan Raya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.29 dibawah ini. Berikut gambar 5.29 alternatif penilaian kriteria tingkat II fasilitas pelayanan.



**Gambar 5.29**  
**Hasil Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil analisis prioritas keputusan responden 05 ibu Yetti Suryati, Kecamatan Marpoyan Damai memiliki nilai paling unggul terhadap penilaian kriteria tingkat I dan kriteria tingkat II dibandingkan Kecamatan Tenayan Raya. Kecamatan Marpoyan Damai layak menjadi pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru.

**6. Prioritas Keputusan Kriteria Tingkat I, Kriteria Tingkat II dan Alternatif Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru Menurut Responden 06**

**– Pembobotan Setiap Elemen Kriteria Tingkat I**

Berdasarkan hasil analisis dari responden 06 diketahui bahwa hasil prioritas I dalam kriteria tingkat I yaitu kriteria potensi ekonomi dengan nilai 0,389. Sedangkan kriteria prioritas II berada di kriteria fasilitas pelayanan dengan total nilai 0,303. Untuk lebih jelasnya nilai prioritas kriteria tingkat I dapat dilihat pada tabel 5.18 dibawah ini. Berikut tabel 5.18 nilai prioritas kriteria tingkat I.

**Tabel 5.18 Nilai Prioritas Kriteria Tingkat I**

Kriteria Tingkat I	Nilai
Potensi Ekonomi	0,389
Fasilitas Pelayanan	0,303
Potensi Lingkungan	0,178
Keuntungan Lokasi	0,130

Sumber : Hasil Analisis, 2020

– **Pembobotan Setiap Elemen Kriteria Tingkat II**

Hasil pembobotan setiap elemen kriteria tingkat II terhadap responden 06 memiliki nilai tertinggi sebesar 0,875 dengan kriteria jumlah penduduk dan kesesuaian lahan. Sedangkan prioritas dengan nilai terendah berada pada kriteria fasilitas kebudayaan dan rekreasi. Untuk lebih jelasnya hasil kriteria tingkat II dapat dilihat pada tabel 5.19 dibawah ini. Berikut tabel 5.19 nilai prioritas kriteria tingkat II

**Tabel 5.19 Nilai Prioritas Kriteria Tingkat II**

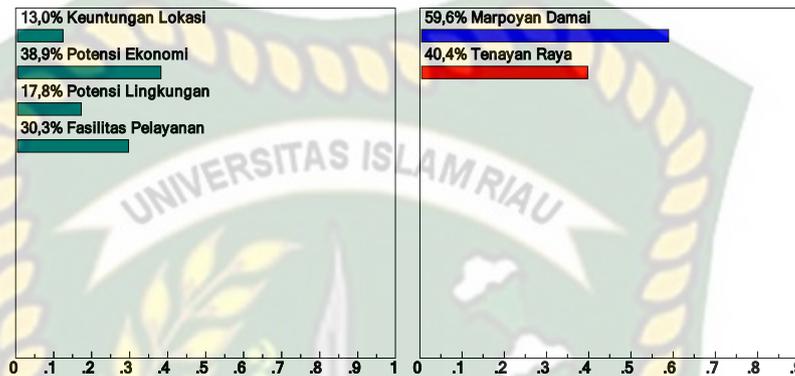
<b>Kriteria Tingkat II</b>	<b>Nilai</b>
Jarak	0,125
Jumlah Penduduk	0,875
Sektor Primer	0,627
Sektor Sekunder	0,094
Sektor Tersier	0,280
Daya Dukung Lingkungan	0,125
Kesesuaian Lahan	0,875
Fasilitas Ekonomi	0,302
Fasilitas Kesehatan	0,120
Fasilitas Pendidikan	0,230
Fasilitas Kelembagaan	0,092
Fasilitas Peribadatan	0,156
Fasilitas Kebudayaan Dan Rekreasi	0,031
Fasilitas Ruang Terbuka, Taman Dan Lapangan Olahraga	0,069

*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

– **Pembobotan Hasil Alternatif Terhadap Kriteria Tingka I Dan Kriteria Tingkat II**

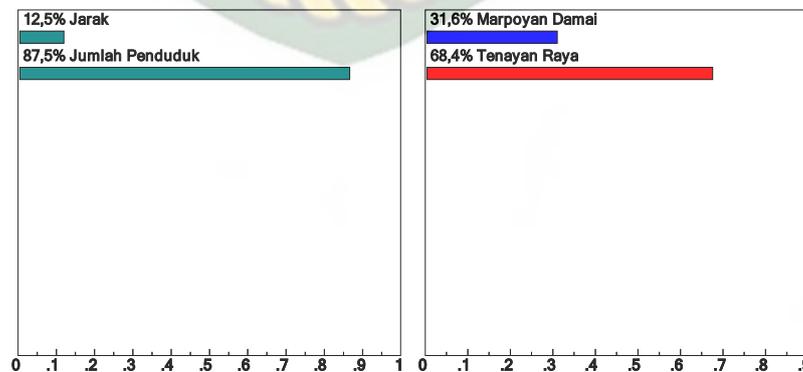
Berdasarkan hasil pembobotan alternatif responden 06 maka diketahuilah yang menjadi pusat pertumbuhan alternatif terhadap kriteria tingkat I yaitu Kecamatan Marpoyan Damai.

Untuk lebih jelasnya hasil pembobotan alternatif terhadap kriteria I dapat dilihat pada gambar 5.30 dibawah ini. Berikut gambar 5.30 alternatif penilaian kriteria tingkat I



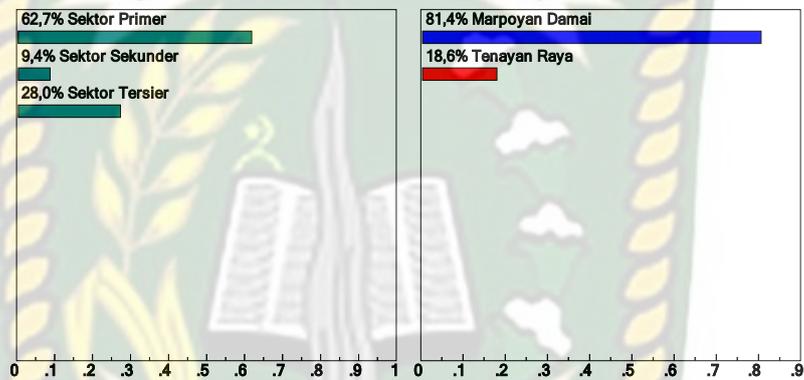
**Gambar 5.30**  
**Alternatif penilaian kriteria tingkat 1**  
 Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil analisis alternatif pemilihan lokasi terhadap kriteria tingkat II keuntungan lokasi yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan total nilai 31,6%. Sedangkan Kecamatan Tenayan Raya memiliki hasil dengan total 68,4%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.31 dibawah ini. Berikut gambar 5.31 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II keuntungan lokasi



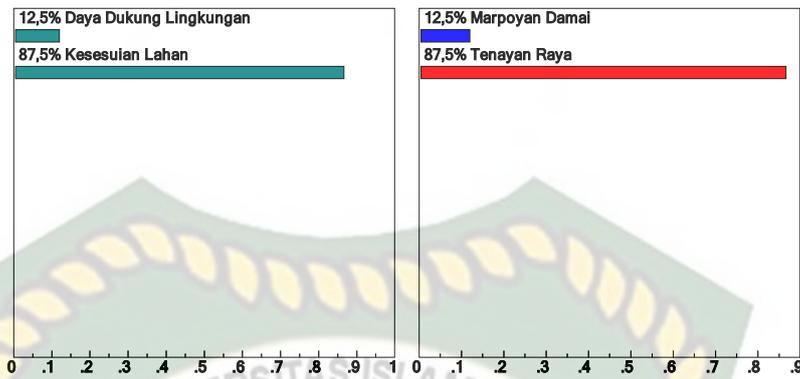
**Gambar 5.31**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi**  
 Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil alternatif pemilihan lokasi terhadap kriteria tingkat II potensi ekonomi diketahui bahwa yang menjadi pusat – pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan total nilai sebesar 81,4%. Penilaian kriteria dapat dilihat dari hasil perhitungan kriteria sektor primer, sekunder dan tersier. Berikut gambar 5.32 alternatif penilain kriteria tingkat II potensi ekonomi.



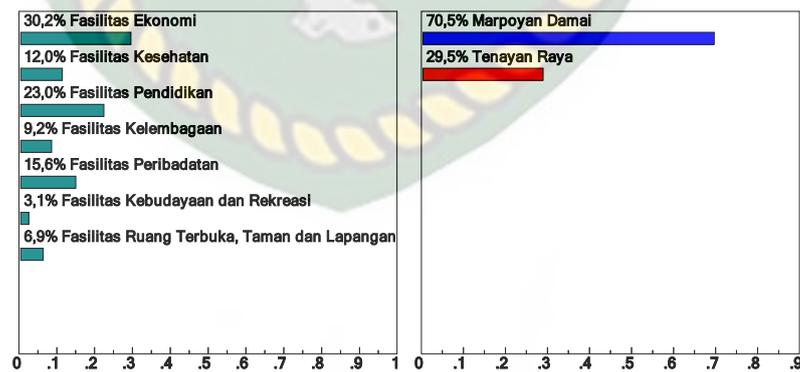
**Gambar 5.32**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil analisis kriteria tingkat II potensi lingkungan. Pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Tenayan Raya dengan total 87,5% sedangkan Kecamatan Marpoyan Damai memiliki nilai 12,5%. Penilaian alternatif dinilai dari daya dukung lingkungan dan kesesuaian lahan. Berikut gambar 5.33 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II potensi lingkungan.



**Gambar 5.33**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II fasilitas pelayanan, lokasi yang layak menjadi pusat - pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan Marpoyan Damai memiliki hasil pembobotan sebesar 70,5% terhadap kriteria fasilitas pelayanan. Untuk lebih jelasnya hasil alternatif kriteria tingkat II fasilitas pelayanan dapat dilihat pada gambar 5.34 dibawah ini. Berikut gambar 5.34 alternatif penilaian kriteria tingkat II fasilitas pelayanan



**Gambar 5.34**  
**Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat II Fasilitas Pelayanan**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Dari hasil analisis secara keseluruhan terhadap prioritas keputusan penentuan pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru, yang menjadi pusat – pusat pertumbuhan berdasarkan penilaian kriteria tingkat I dan kriteria tingkat II yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Hasil ini diperoleh dari responden 06 Bapak Hafiz Yuni Andradengan Jabatan Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Badan Pertanahan Nasional. Kecamatan Marpoyan Damai layak menjadi Pusat – pusat pertumbuhan berdasarkan hasil perhitungan dari responden 06.

**7. Prioritas Keputusan Kriteria Tingkat I, Kriteria Tingkat II dan Alternatif Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru Menurut Responden 07**

**– Pembobotan Setiap Elemen Terhadap Kriteria Tingkat I**

Berdasarkan hasil perhitungan dari responden 07 diketahui bahwa kriteria potensi ekonomi memiliki nilai tertinggi terhadap kriteria tingkat I. Potensi Ekonomimemiliki total nilai sebesar 0,662. Untuk lebih jelas hasil perhitungan pembobotan terhadap kriteria tingkat I dapat dilihat pada tabel 5.20. Berikut tabel 5.20 Nilai Prioritas terhadap kriteria tingkat I

**Tabel 5.20 Nilai Prioritas Terhadap Kriteria Tingkat I**

<b>Kriteria Tingkat I</b>	<b>Nilai</b>
Potensi Ekonomi	0,662
Potensi Lingkungan	0,159
Fasilitas Pelayanan	0,121
Keuntungan Lokasi	0,058

*Sumber : Hasil Analisis 2020*

– **Pembobotan Setiap Elemen Terhadap Kriteria Tingkat II**

Dari hasil perhitungan analisis kriteria tingkat II diketahui bahwa 14 kriteria memiliki jumlah nilai yang berbeda – beda. Untuk melihat hasil pembobotan terhadap kriteria tingkat II dapat dilihat pada tabel 5.21 dibawah ini. Berikut tabel 5.21 hasil prioritas pembobotan terhadap kriteria Tingkat II

**Tabel 5.21 Hasil Prioritas Terhadap Kriteria Tingkat II**

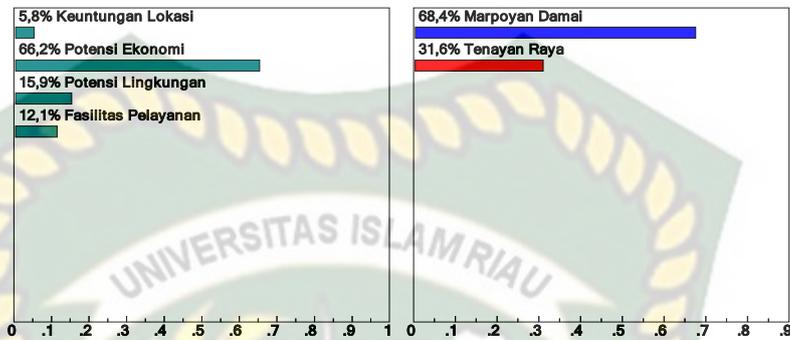
<b>Kriteria Tingkat II</b>	<b>Nilai</b>
Jarak	0,125
Jumlah Penduduk	0,875
Sektor Primer	0,287
Sektor Sekunder	0,078
Sektor Tersier	0,635
Daya Dukung Lingkungan	0,875
Kesesuaian Lahan	0,125
Fasilitas Ekonomi	0,264
Fasilitas Kesehatan	0,172
Fasilitas Pendidikan	0,205
Fasilitas Kelembagaan	0,066
Fasilitas Peribadatan	0,196
Fasilitas Kebudayaan Dan Rekreasi	0,040
Fasilitas Ruang Terbuka, Taman, Lapangan Olahraga	0,058

Sumber : Hasil Analisis, 2020

– **Pembobotan Hasil Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat I Dan Kriteria Tingkat II**

Hasil alternatif terhadap kriteria tingkat I diketahui bahwa kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan ialah Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan ini memiliki keunggulan penilaian dibandingkan Kecamatan Tenayan Raya.

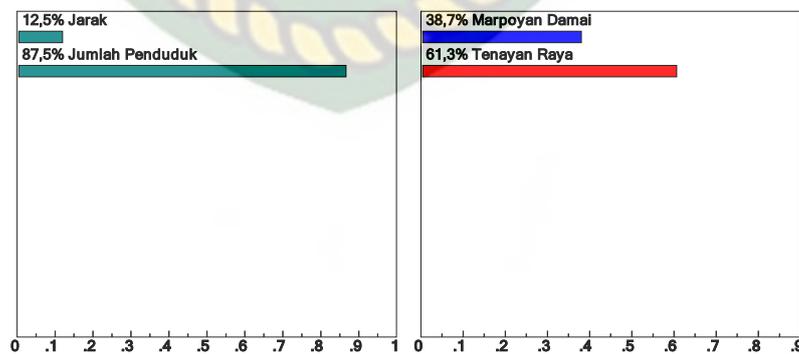
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.35 dibawah ini. Berikut gambar 5.35 hasil alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat I.



**Gambar 5.35**  
**Hasil Alternatif Penilaian Terhadap Kriteria Tingkat I**

Sumber : Hasil Analisis, 2020

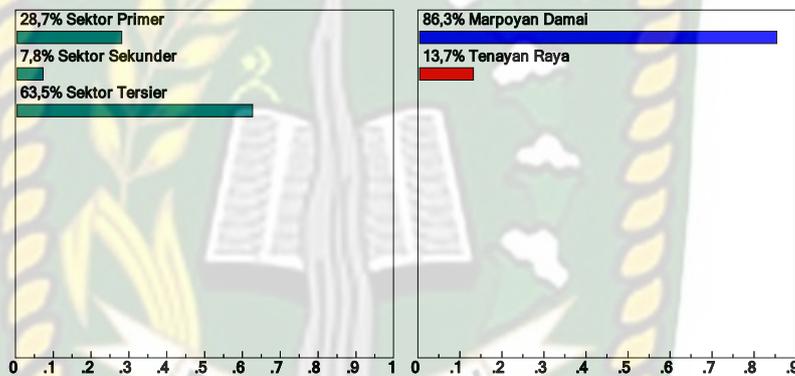
Berdasarkan hasil analisis alternatif terhadap kriteria tingkat II Keuntungan Lokasi. Kecamatan Tenayan Raya menjadi prioritas keputusan penentuan lokasi pusat – pusat pertumbuhan dengan jumlah total nilai alternatif sebesar 61,3%. Hasil analisis menunjukkan Kecamatan Tenayan Raya memiliki nilai yang tinggi terhadap penilaian kriteria tingkat II Keuntungan Lokasi. Berikut gambar 5.36 alternatif penilaian kriteria tingkat II keuntungan lokasi.



**Gambar 5.36**  
**Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat II Keuntungan Lokasi**

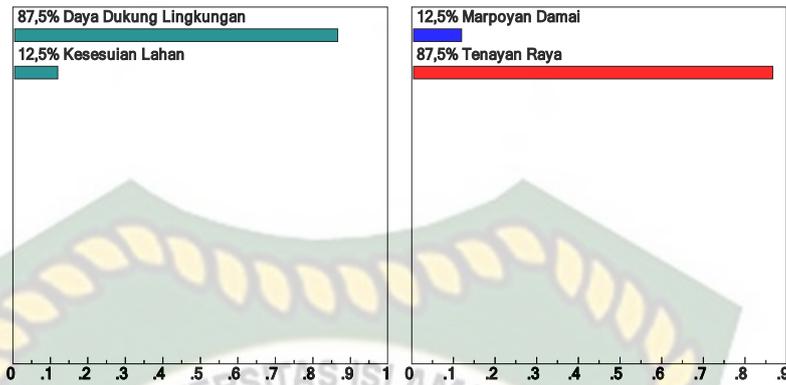
Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil analisis pemilihan lokasi pusat – pusat pertumbuhan terhadap kriteria tingkat II potensi ekonomi. Kecamatan Marpoyan Damai penilaian alternative sebesar 86,3%. Penilaian kriteria dihitung berdasarkan hasil kriteria terhadap sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Untuk lebih jelasnya hasil penilaian alternatif kriteria tingkat II potensi ekonomi dibawah ini. Berikut gambar 5.37 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II potensi ekonomi.



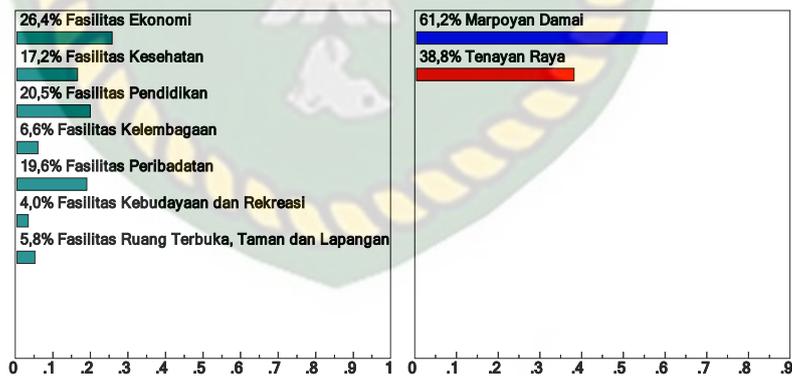
**Gambar 5.37**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil dari alternatif kriteria tingkat II potensi lingkungan diketahui kecamatan yang menjadi prioritas keputusan dalam pemilihan lokasi pusat – pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Tenayan Raya dengan total 87,5% sedangkan Kecamatan Marpoyan Damai hanya memiliki nilai 12,5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.38 dibawah ini. Berikut gambar 5.38 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II potensi lingkungan.



**Gambar 5.38**  
**Alternatif Penilaian Kriteria Tingkat II Potensi Lingkungan**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil analisis penilaian kriteria tingkat II fasilitas pelayanan. Kecamatan Marpoyan Damai memperoleh nilai tertinggi dibandingkan Kecamatan Tenayan Raya dengan total nilai 61,2%. Hasil ini dilihat dari hasil penilaian terhadap kriteria fasilitas pelayanan. Berikut gambar 5.39 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II fasilitas pelayanan.



**Gambar 5.39**  
**Hasil Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat II Fasilitas Sosial - Ekonomi**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Hasil analisis responden 07 Bapak Arief Widiansyah Jabatan Kasubsi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru terhadap prioritas penentuan keputusan pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan ini layak menjadi pusat – pusat pertumbuhan dilihat dari hasil terhadap seluruh kriteria yang menjadi variabel penelitian.

**8. Prioritas Keputusan Kriteria Tingkat I, Kriteria Tingkat II dan Alternatif Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru Menurut Seluruh Responden**

**– Pembobotan Setiap Elemen Terhadap Kriteria Tingkat II**

Berdasarkan hasil seluruh responden terhadap kriteria tingkat I diketahui bahwa kriteria dengan jumlah nilai tertinggi yaitu kriteria potensi ekonomi dengan perolehan nilai sebesar 0,398. Potensi ekonomi layak disebut sebagai prioritas I dari seluruh kriteria tingkat I. untuk lebih jelasnya hasil pembobotan terhadap kriteria tingkat I dapat dilihat pada tabel 5.22 Berikut tabel 5.22 hasil kriteria tingkat I seluruh responden

**Tabel 5.22 Hasil Kriteria Tingkat I Seluruh Responden**

<b>Kriteria Tingkat I</b>	<b>Nilai</b>
Potensi Ekonomi	0,398
Fasilitas Pelayanan	0,333
Keuntungan Lokasi	0,142
Potensi Lingkungan	0,127

*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

– **Pembobotan Setiap Elemen Kriteria Tingkat II**

Dari hasil perhitungan seluruh responden terhadap kriteria tingkat II, Diketahui bahwa kriteria tingkat II yang memiliki nilai tertinggi atau kriteria yang menjadi prioritas I ialah jarak dengan nilai 0,593. Untuk lebih jelasnya hasil kriteria tingkat II dapat tabel 5.23. berikut tabel 5.23 hasil kriteria tingkat II seluruh responden

**Tabel 5.23 Hasil Kriteria Tingkat II Seluruh Responden**

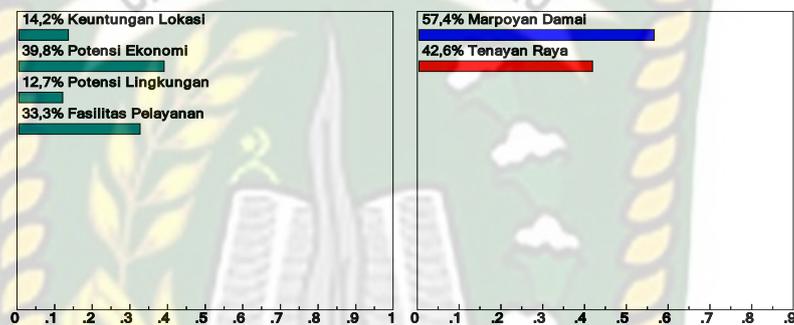
<b>Kriteria Tingkat II</b>	<b>Nilai</b>
Jarak	0,593
Jumlah Penduduk	0,407
Sektor Primer	0,296
Sektor Sekunder	0,291
Sektor Tersier	0,413
Daya Dukung Lingkungan	0,500
Kesesuaian Lahan	0,500
Fasilitas Ekonomi	0,248
Fasilitas Kesehatan	0,171
Fasilitas Pendidikan	0,199
Fasilitas Kelembagaan	0,084
Fasilitas Peribadatan	0,163
Fasilitas Kebudayaan Dan Rekreasi	0,051
Fasilitas	0,084

*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

– **Pembobotan Hasil Alternatif Terhadap Kriteria Tingkat I Dan Kriteria Tingkat II**

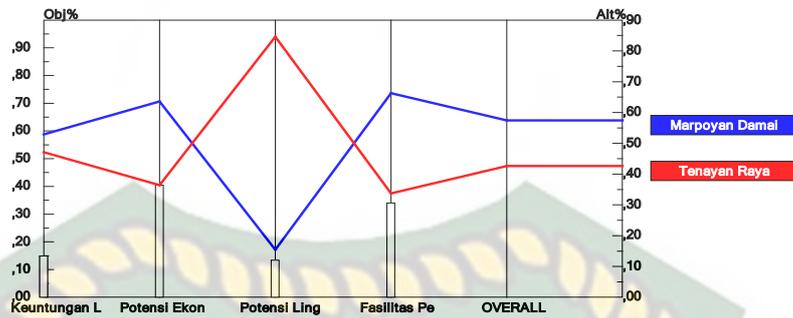
Dalam penentuan alternatif pusat – pusat pertumbuhan diketahui kecamatan yang menjadi alternatif pemilihan lokasi pusat pertumbuhan sesuai dengan hasil analisis sebelumnya yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Tenayan Raya.

Dari hasil seluruh responden terhadap kriteria tingkat I dan kriteria tingkat II yang menjadi pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Untuk lebih jelasnya hasil alternatif seluruh responden terhadap kriteria tingkat I dapat dilihat pada gambar 5.40 dibawah ini. Berikut gambar 5.40 hasil alternatif seluruh responden terhadap kriteria tingkat I



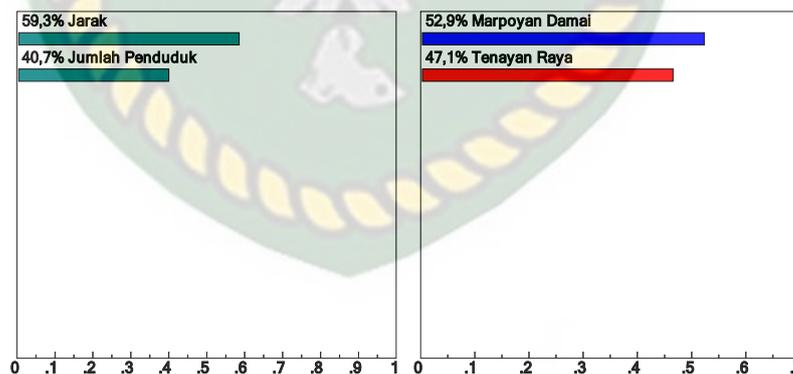
**Gambar 5.40**  
**Hasil Alternatif Seluruh Responden Terhadap Kriteria Tingkat I**  
 Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil alternatif seluruh reponden (*stakeholder ahli*) terhadap kriteria tingkat I diketahui bahwa yang menjadi pusat - pusat pertumbuhan pada kriteria tingkat I yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Kecamatan Marpoyan Damai memiliki nilai sebesar 55,1%. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Tenayan Raya yang hanya memiliki nilai 44,9%. Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan alternatif prioritas keputusan tingkat I dapat dilihat pada gambar grafik 5.41 dibawah ini. Berikut gambar 5.41 grafik perhitungan alternatif seluruh responden terhadap kriteria tingkat I.



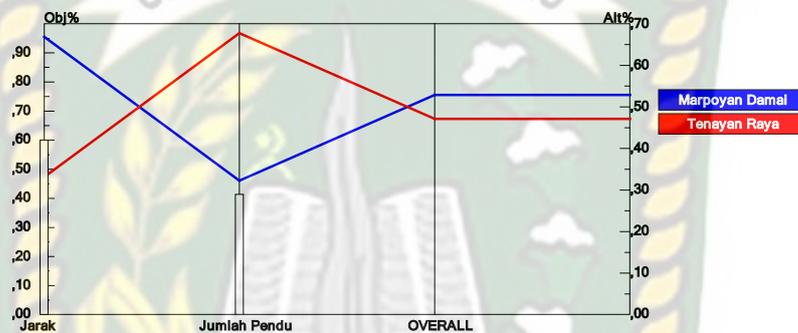
**Gambar 5.41**  
**Grafik Hasil Alternatif Seluruh Responden Terhadap Kriteria Tingkat I**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan prioritas keputusan hasil analisis dari seluruh responden diketahui alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II keuntungan lokasi. Kecamatan yang menjadi prioritas keputusan kriteria keuntungan lokasi yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.42 dibawah ini. Berikut gambar 5.42 alternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II keuntungan lokasi.



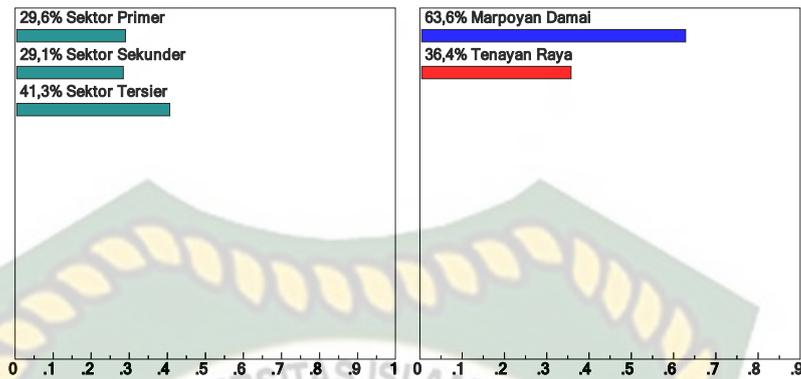
**Gambar 5.42**  
**Hasil Alternatif Seluruh Responden Terhadap Kriteria Tingkat II**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil analisis alternatif terhadap kriteria tingkat II jumlah penduduk dan jarak. Kecamatan Marpoyan Damai yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan Kecamatan Tenayan Raya. Untuk lebih jelasnya perbandingan penilaian kriteria tingkat II dapat dilihat pada gambar grafik 5.43 dibawah ini. Berikut gambar grafik 5.43 hasil alternatif seluruh responden terhadap kriteria tingkat II.



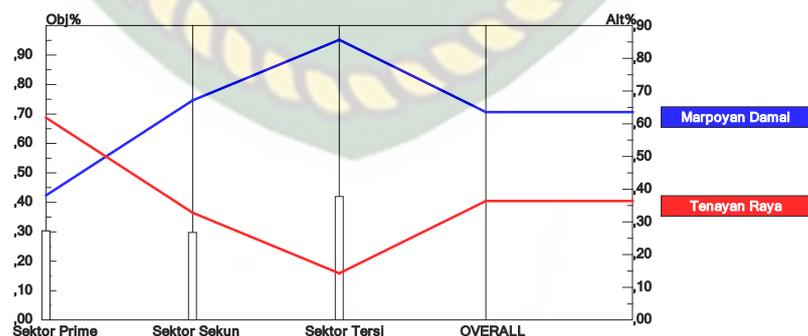
**Gambar 5.43**  
**Grafik Hasil Alternatif Seluruh Responden Terhadap Kriteria Tingkat II**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil analisis terhadap alternatif kriteria tingkat II potensi ekonomi. Kecamatan yang menjadi prioritas keputusan seluruh responden pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan total 63,6%. Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan alternative seluruh responden dapat dilihat pada gambar 5.44 dibawah ini. Berikut gambar 5.44 alternatif penilaian seluruh responden terhadap kriteria tingkat II potensi ekonomi.



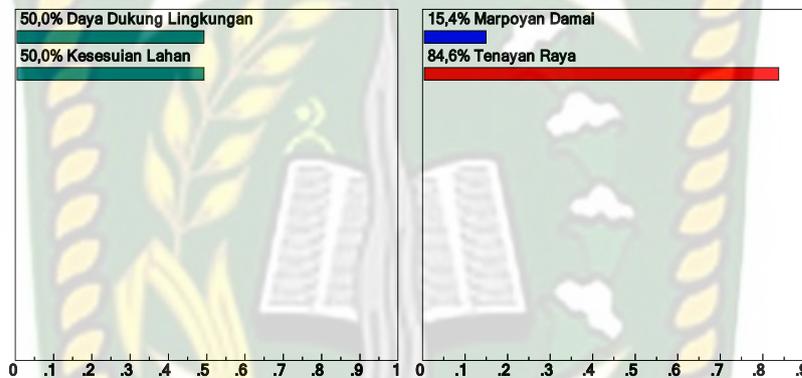
**Gambar 5.44**  
**Hasil Alternatif Seluruh Responden Kriteria Tingkat II Potensi Ekonomi**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil alternatif kriteria sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier diketahui bahwa Kecamatan yang menjadi prioritas keputusan penentuan lokasi pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan total nilai sebesar 63,6. Untuk melihat hasil yang lebih jelas perbandingan hasil alternatif seluruh responden terhadap kriteria tingkat II menurut potensi ekonomi dapat dilihat pada gambar 5.45 dibawah ini. Berikut gambar grafik 5.45 hasil alternatif seluruh responden.



**Gambar 5.45**  
**Grafik Hasil Alternatif Seluruh Responden Terhadap Kriteria Tingkat II**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

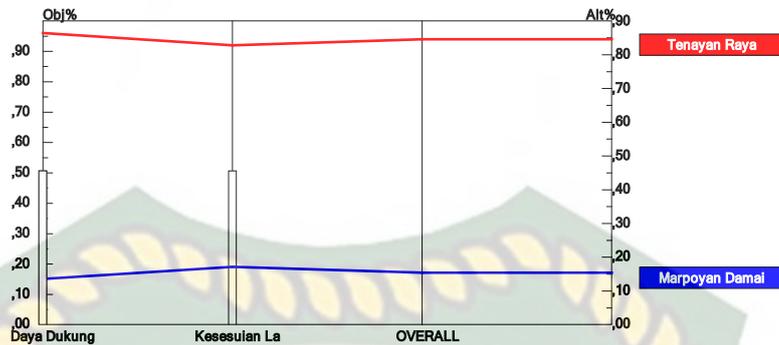
Berdasarkan hasil analisis kriteria tingkat II potensi lingkungan. Kecamatan Tenayan Raya lebih unggul penilaian alternatif terhadap kriteria potensi lingkungan dibandingkan dengan Kecamatan Marpoyan Damai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.46 dibawah ini. Berikut gambar 5.46 hasil alternatif seluruh responden terhadap kriteria tingkat II potensi lingkungan.



**Gambar 5.46**  
**Hasil Alternatif Seluruh Responden Terhadap Kriteria Tingkat II**  
**Potensi Lingkungan**

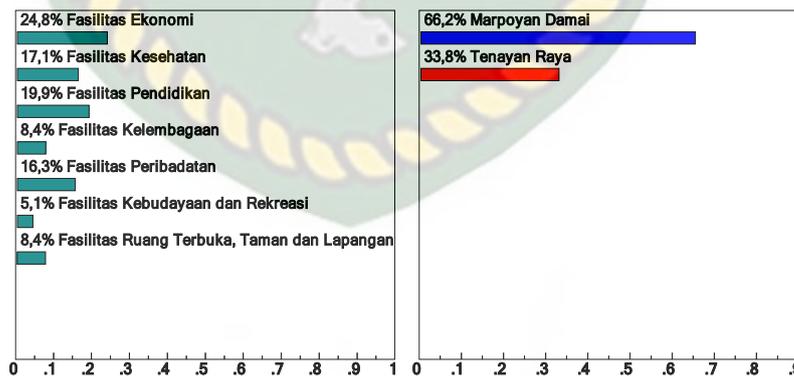
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil alternatif kriteria daya dukung lingkungan dan kriteria kesesuaian lahan diketahui bahwa Kecamatan yang menjadi prioritas keputusan penentuan lokasi pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Tenayan Raya dengan total nilai sebesar 85,2%, sedangkan Kecamatan Marpoyan Damai dengan nilai 14,8%. Untuk melihat hasil yang lebih jelas perbandingan hasil alternatif seluruh responden terhadap kriteria tingkat II menurut potensi lingkungan dapat dilihat pada gambar garfik 5.47 dibawah ini. Berikut gambar grafik 5.47 hasil alternatif seluruh responden.



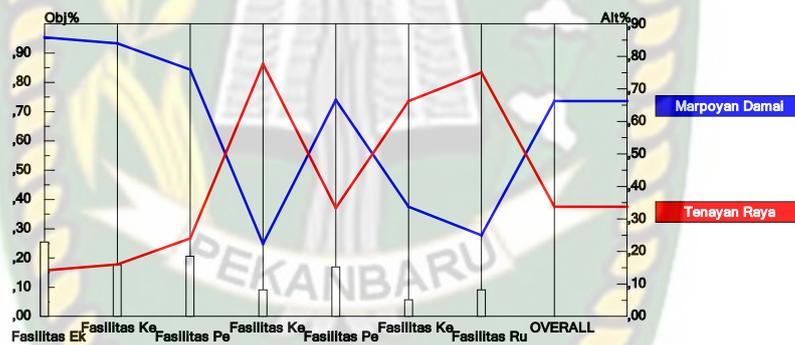
**Gambar 5.47**  
**Hasil Alternatif Seluruh Responden Terhadap Kriteria Tingkat II**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil alternatif seluruh responden terhadap kriteria fasilitas pelayanan. Kecamatan yang layak menjadi pusa – pusat pertumbuhan di Kota pekanbaru yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Untuk lebih jelasnya hasil aalternatif penilaian terhadap kriteria tingkat II fasilitas pelayanan dapat dilihat pada gambar 5.48 dibawah ini. Berikut gambar 5.48 alternatif penilaian seluruh responden terhadap seluruh prioritas keputusan kriteria fasilitas pelayanan.



**Gambar 5.48**  
**Hasil Alternatif Seluruh Responden Terhadap Kriteria Tingkat I**  
*Sumber : Hasil Analisis, 2020*

Berdasarkan hasil perhitungan seluruh responden alternatif kriteria tingkat II terhadap fasilitas pelayanan diketahui bahwa Kecamatan Marpoyan Damai menjadi prioritas keputusan alternatif terhadap kriteria tingkat II berdasarkan kriteria fasilitas pelayanan. Kecamatan Marpoyan Damai dengan total nilai 66,2% sedangkan Kecamatan Tenayan Raya dengan total nilai sebesar 33,8%. Untuk lebih jelasnya perbandingan hasil seluruh alternatif kriteria fasilitas pelayanan dapat dilihat pada gambar 5.49 dibawah ini. Berikut gambar grafik 5.49 hasil penilaian alternatif terhadap kriteria tingkat II seluruh responden.



**Gambar 5.49**  
**Grafik Hasil Alternatif Seluruh Responden Terhadap Kriteria Tingkat II**  
 Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil prioritas keputusan seluruh responden terhadap penentuan pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru berdasarkan perhitungan terhadap kriteria tingkat I dan kriteria tingkat II Kecamatan yang layak menjadi Pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Marpoyan Damai. Untuk lebih jelasnya hasil analisis AHP dapat dilihat pada gambar peta 5.50 dibawah ini. Berikut gambar 5.50 peta analisis *analytical hierarchy process*

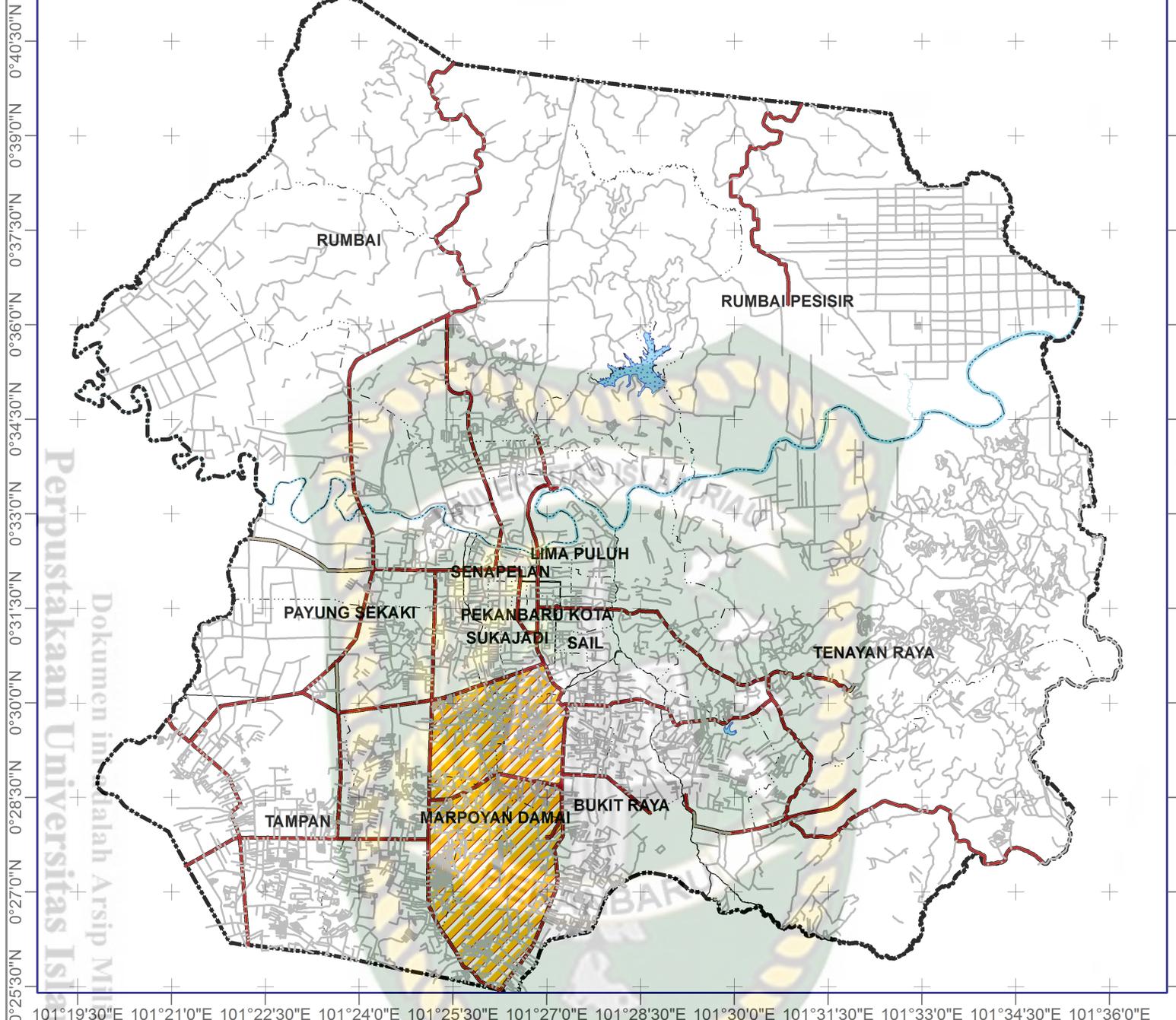
*Peta ahp 5.50*



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

101°19'30"E 101°21'0"E 101°22'30"E 101°24'0"E 101°25'30"E 101°27'0"E 101°28'30"E 101°30'0"E 101°31'30"E 101°33'0"E 101°34'30"E 101°36'0"E



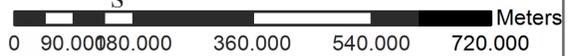
101°19'30"E 101°21'0"E 101°22'30"E 101°24'0"E 101°25'30"E 101°27'0"E 101°28'30"E 101°30'0"E 101°31'30"E 101°33'0"E 101°34'30"E 101°36'0"E



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS TEKNIK**



**SKALA**  
**1:170.000**



**INSET PETA**



**LEGENDA**

- Batas Kabupaten Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Sungai
- Air Danau
- Pusat Pertumbuhan

**Dosen Pembimbing**  
**PUJI ASTUTI, ST.,MT**

Nama : Hera Yolanda Apriani  
 NPM : 153410209

Sumber :  
 RTRW KOTA PEKANBARU

**No. Gambar**

5.50

**PETA PUSAT PERTUMBUHAN DI KOTA PEKANBARU**

**Halaman**

209

Perustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip MIPA

– **Kondisi Eksisting Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan kondisi eksisting Kecamatan Marpoyan Damai layak menjadi pusat pertumbuhan. Kecamatan Marpoyan Damai memiliki potensi yang sangat unggul baik dari fasilitas pelayanan, pertanian, industri dan lainnya. Dari data BPS Kota Pekanbaru 2019 Kota Pekanbaru memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha pada tahun 2018 tertinggi. Nilai PDRB menurut lapangan usaha berada di perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda dengan total Rp 19.431.654,3. Ini dibuktikan bahwa Kecamatan Marpoyan Damai termasuk didalam kategori nilai tertinggi dalam PDRB menurut lapangan usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 5.50 dibawah ini. Berikut gambar 5.51 Reparasi Mobil



**Gambar 5.51**  
**Reparasi Mobil**  
*Sumber : Hasil Survey, 2020*

Kecamatan Marpoyan Damai juga memiliki transportasi udara yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II. Bandara Sultan Syarif Kasim II sudah memiliki rute internasional seperti rute Kuala Lumpur dan Singapura. Kecamatan Marpoyan Damai memiliki jalur penghubung yang sangat baik, sehingga kecamatan Marpoyan Damai menjadi jalur utama bagi masyarakat dari luar wilayah Kota Pekanbaru maupun masyarakat di Kota Pekanbaru. Interaksi yang besar menyebabkan Kecamatan Marpoyan Damai memiliki nilai besaran interaksi tertinggi di Kota Pekanbaru. Berikut gambar 5.52 Sultan Syarif Kasim II



**Gambar 5.52**  
**Sultan Syarif Kasim II**  
*Sumber :Hasil Survey, 2020*

Dari hasil pertanian Kecamatan Marpoyan Damai juga menjadi sektor unggul dalam hasil pertanian. Hasil pertanian di Kecamatan Marpoyan Damai yang paling dominan dan palingunggul dari hasil pertanian 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru. Dapat dilihat dari data hasil pertanian Kecamatan Marpoyan Damai seperti hasil panen tanaman sayuran, buah – buahan semusim, tanaman biofarmka dan tanaman hias (BPS Kota Pekanbaru Tahun 2019). Berikut gambar 5.53 Pertanian



**Gambar 5.53**  
**Pertanian**

*Sumber : Hasil Survey, 2020*

Dari hasil perdagangan dan jasa Kecamatan Marpoyan Damai juga memiliki potensi ekonomi yang sangat baik mulai dari tempat makan yang tersebar di Kecamatan Marpoyan Damai seperti kampung kecil, pagi sore, koki sunda dan lainnya. Tempat perbelanjaan, dan toko lainnya juga berkembang sangat pesat mulai dari mall living world, giant, toko jam tangan dan lainnya. Majunya perdagangan di Kecamatan Marpoyan Damai dapat dilihat dari jumlah fasilitas ekonomi. Berikut gambar 5.54 perdagangan dan jasa di Kecamatan Marpoyan Damai.



**Gambar 5.54**  
**Perdagangan dan Jasa**

*Sumber : Hasil Survey, 2020*

Berdasarkan jumlah industri Kecamatan Marpoyan Damai memiliki jumlah industri besar yang paling banyak dibandingkan 12 (dua belas) kecamatan lainnya. Industri tersebut mulai dari produksi mie instan yang dikenal dengan PT Indofood, adanya pabrik karet di jalan kereta api dan industri lainnya. Industri tersebut mampu meningkatkan peekonomian masyarakat disekitarnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5.55 dibawah ini. Berikut gambar 5.55 industri besar di Kecamatan Marpoyan Damai.



**Gambar 5.55**  
**Industri Besar**

*Sumber : Hasil Survey, 2020*

Kecamatan Marpoyan Damai juga memiliki Gor Gelanggang Remaja. Gor gelanggang remaja banyak digunakan oleh masyarakat baik untuk pertandingan basket, volley, konser musik dan tempat untuk kegiatan tes ujian. Untuk lebih jelasnya gor gelanggang remaja dapat dilahat pada gambar 5.56 dibawah ini. Berikut gambar 5.56 gor gelanggang remaja



**Gambar 5.56**  
**Gor Gelanggang Remaja**  
*Sumber : Hasil Survey, 2020*

Peta 5.57 kondisi eksisting



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## 5.2 Analisis Besaran Interaksi (Tingkat Keterkaitan) Pusat Pertumbuhan Dengan Kecamatan Disekitarnya

Analisis besaran interaksi antara pusat pertumbuhan dengan kecamatan disekitarnya menggunakan analisis gravitasi dan analisis titik henti. Analisis ini menggunakan variabel jarak dan jumlah penduduk.

### 5.2.1 Analisis Gravitasi

Analisis gravitasi adalah konsep yang digunakan untuk mengukur kekuatan keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Rumus dalam analisis gravitasi ialah sebagai berikut (Nainggolan, 2013) :

$$I = \frac{P1 \times P2}{J^212}$$

Keterangan : I = Interaksi  
P1 = penduduk wilayah 1  
P2 = Penduduk Wilayah 2  
 $J^212$  = Jarak Wilayah 1 dan Jarak Wilayah 2

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan interaksi pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 5.24 dibawah ini. Berikut tabel 5.24 Hasil analisis gravitasi

**Tabel 5.24 Hasil Analisis Gravitasi**

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Jarak (KM)	Jarak Yang Dikuadratkan	Interaksi
	Pusat Pertumbuhan	Kecamatan	Penduduk I	Penduduk II			
1	Marpoyan Damai	Tenayan	131.550	167.929	16	256	86293202,93
2	Marpoyan Damai	Tampian	131.550	307.947	17	289	140174490,8
3	Marpoyan Damai	Bukit Raya	131.550	105.177	5,6	31,36	441200074,9
4	Marpoyan Damai	Payung Sekaki	131.550	91.255	4,6	21,16	567324917,3
5	Marpoyan Damai	Lima Puluh	131.550	41.466	3,5	12,25	445294065,3
6	Marpoyan Damai	Senapelan	131.550	36.581	3,5	12,25	392835146,9
7	Marpoyan Damai	Sukajadi	131.550	47.420	2	4	1559525250
8	Marpoyan Damai	Pekanbaru Kota	131.550	25.103	2,9	8,41	392663454,2
9	Marpoyan Damai	Sail	131.550	21.492	1,6	2,56	1104403359
10	Marpoyan Damai	Rumbai	131.550	67.654	17	289	30795445,33
11	Marpoyan Damai	Rumbai Pesisir	131.550	73.784	4,7	22,09	439397247,6

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil analisis gravitasi diatas diketahui bahwa kecamatan dengan besaran interaksi tertinggi berada di kecamatan Sukajadi. Kecamatan Sukajadi dengan kecamatan Marpoyan Damai memiliki besaran interaksi 1559525250. Besarnya interaksi Kecamatan Marpoyan Damai dengan Kecamatan Sukajadi dikarenakan jarak kecamatan yang berdekatan yaitu 4 Km. Sedangkan kecamatan dengan besaran interaksi paling kecil dengan total besaran interaksi 30795445,33 berada di interaksi Kecamatan Marpoyan Damai dengan Kecamatan Rumbai. Jarak Kecamatan Marpoyan Damai dengan Kecamatan Rumbai sebesar 289 Km, mengakibatkan pergerakan interaki Kecamatan Rumbai dengan Kecamatan Marpoyan Damai cukup jauh. Berikut peta 5.58 Besaran interaksi pusat pertumbuhan dengan kecamatan disekitarnya

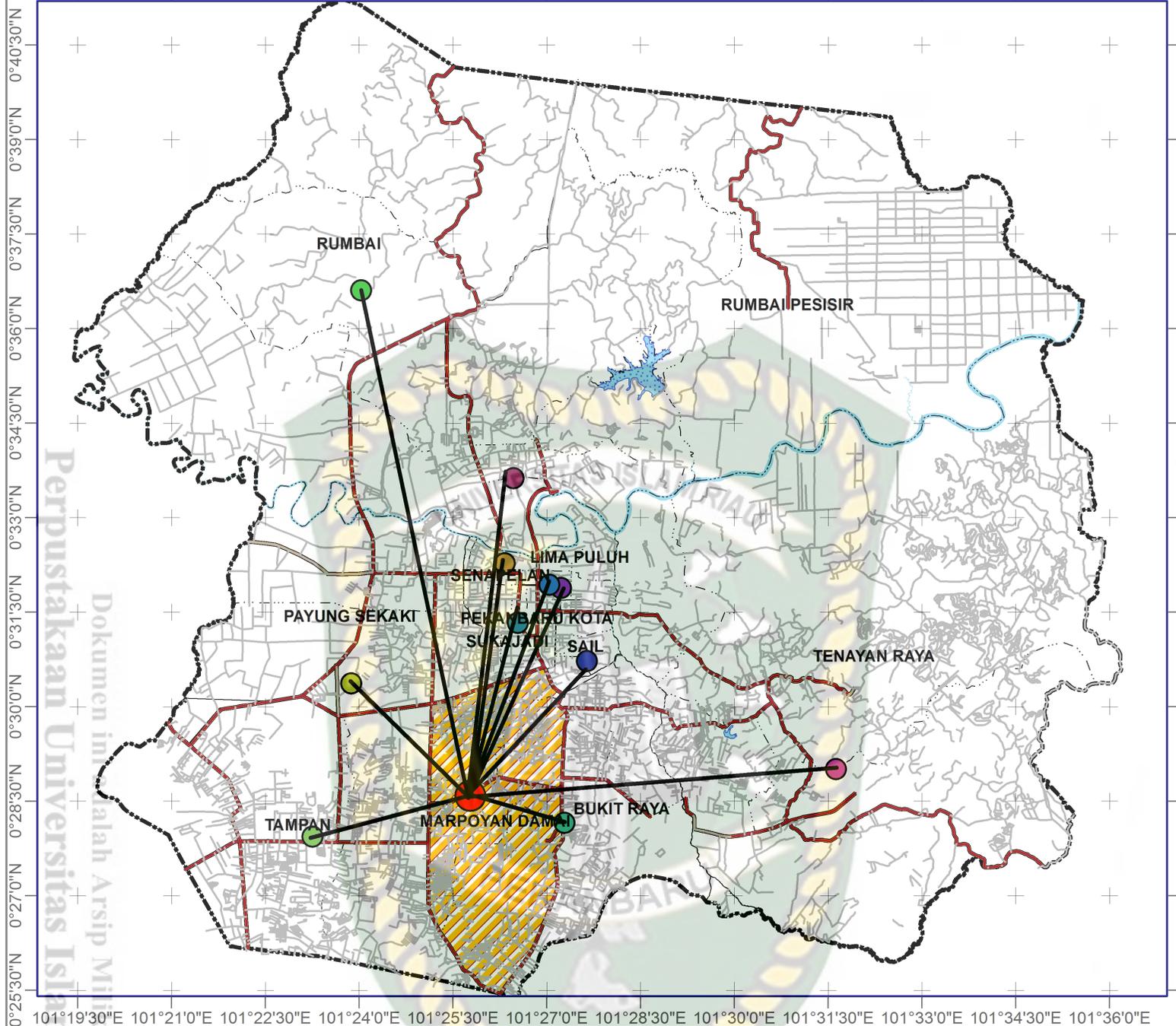
Peta 5.58 Peta besaran interaksi analisis gravitasi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

101°19'30"E 101°21'0"E 101°22'30"E 101°24'0"E 101°25'30"E 101°27'0"E 101°28'30"E 101°30'0"E 101°31'30"E 101°33'0"E 101°34'30"E 101°36'0"E



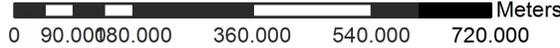


**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS TEKNIK**



W N E S

**SKALA**  
**1:170.000**



0 90.000 180.000 360.000 540.000 720.000 Meters

**INSET PETA**



101°0'0"E 103°0'0"E 105°0'0"E  
 2°0'0"N 0°0'0" 1°0'0"N  
 99°0'0"E 101°0'0"E 103°0'0"E 105°0'0"E

**LEGENDA**

	Batas Kabupaten Kota		441200074,9
	Batas Kecamatan		445294065,3
	Batas Kelurahan		567324917,3
	Jalan Arteri		392663454,2
	Jalan Kolektor		30795445,3
	Jalan Lokal		439397247,6
	Sungai		1104403359,0
	Air Danau		392835146,9
	Pusat Pertumbuhan		155955250,0
			140174490,8
			86293202,9

**Dosen Pembimbing**  
 PUJI ASTUTI, ST.,MT

Nama : Hera Yolanda Apriani  
 NPM : 153410209

Sumber :  
 RTRW KOTA PEKANBARU

**No. Gambar**  
5.58

**PETA BESARAN INTERAKSI BERDASARKAN ANALISIS GRAVITASI  
 DI KOTA PEKANBARU**

**Halaman**  
217

Perustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik

### 5.2.2 Analisis Titik Henti

Analisis titik henti yakni analisis yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang posisi garis batas yang memisahkan wilayah – wilayah dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Rumus dalam analisis titik henti sebagai berikut (Muta'ali, 2015) :

$$Th = \frac{J}{1 + \sqrt{\frac{Pz}{Py}}}$$

Keterangan =

Th = Titik Henti

J = Jarak

Pz = Jumlah Penduduk Kota Tujuan

Py = Jumlah Penduduk Kota Asal

Untuk lebih jelasnya hasil analisis titik henti pusat pertumbuhan dengan kecamatan disekitarnya dapat dilihat pada tabel 5.25 dibawah ini. Berikut tabel 5.25 hasil analisis titik henti.

**Tabel 5.25 Hasil Analisis Titik Henti**

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Jarak (KM)	Titik henti
	Pusat Pertumbuhan	Kecamatan	Penduduk I	Penduduk II		
1	Marpoyan Damai	Tenayan	131.550	167.929	16	7,51
2	Marpoyan Damai	Tampar	131.550	307.947	17	6,72
3	Marpoyan Damai	Bukit Raya	131.550	105.177	5,6	2,96
4	Marpoyan Damai	Payung Sekaki	131.550	91.255	4,6	2,51
5	Marpoyan Damai	Lima Puluh	131.550	41.466	3,5	2,24
6	Marpoyan Damai	Senapelan	131.550	36.581	3,5	2,29
7	Marpoyan Damai	Sukajadi	131.550	47.420	2	1,25
8	Marpoyan Damai	Pekanbaru Kota	131.550	25.103	2,9	2,02
9	Marpoyan Damai	Sail	131.550	21.492	1,6	1,14
10	Marpoyan Damai	Rumbai	131.550	67.654	17	9,90
11	Marpoyan Damai	Rumbai Pesisir	131.550	73.784	4,7	2,69

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil analisis titik henti pada tabel 5.25 diatas diketahui kecamatan Marpoyan Damai dengan Kecamatan Sukajadi memiliki nilai titik henti sebesar 1,25. Km. Sedangkan kecamatan Marpoyan Damai dengan kecamatan Rumbai memiliki nilai titik henti sebesar 9,90 Km. Penduduk yang berada di pinggiran Kota Pekanbaru tidak perlu menempuh jarak yang jauh menuju pusat pertumbuhan, dikarenakan teori titik henti memudahkan masyarakat dalam melayani kebutuhan dan keperluan penduduk yang memiliki jarak terlalu jauh dari pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru, sehingga seluruh kebutuhan yang diinginkan tidak perlu menuju jarak yang terlalu jauh dan biaya transportasi juga lebih murah dan perjalanan lebih efektif dan efisien. Berikut gambar 5.59 Peta analisis titik henti di Kota Pekanbaru.

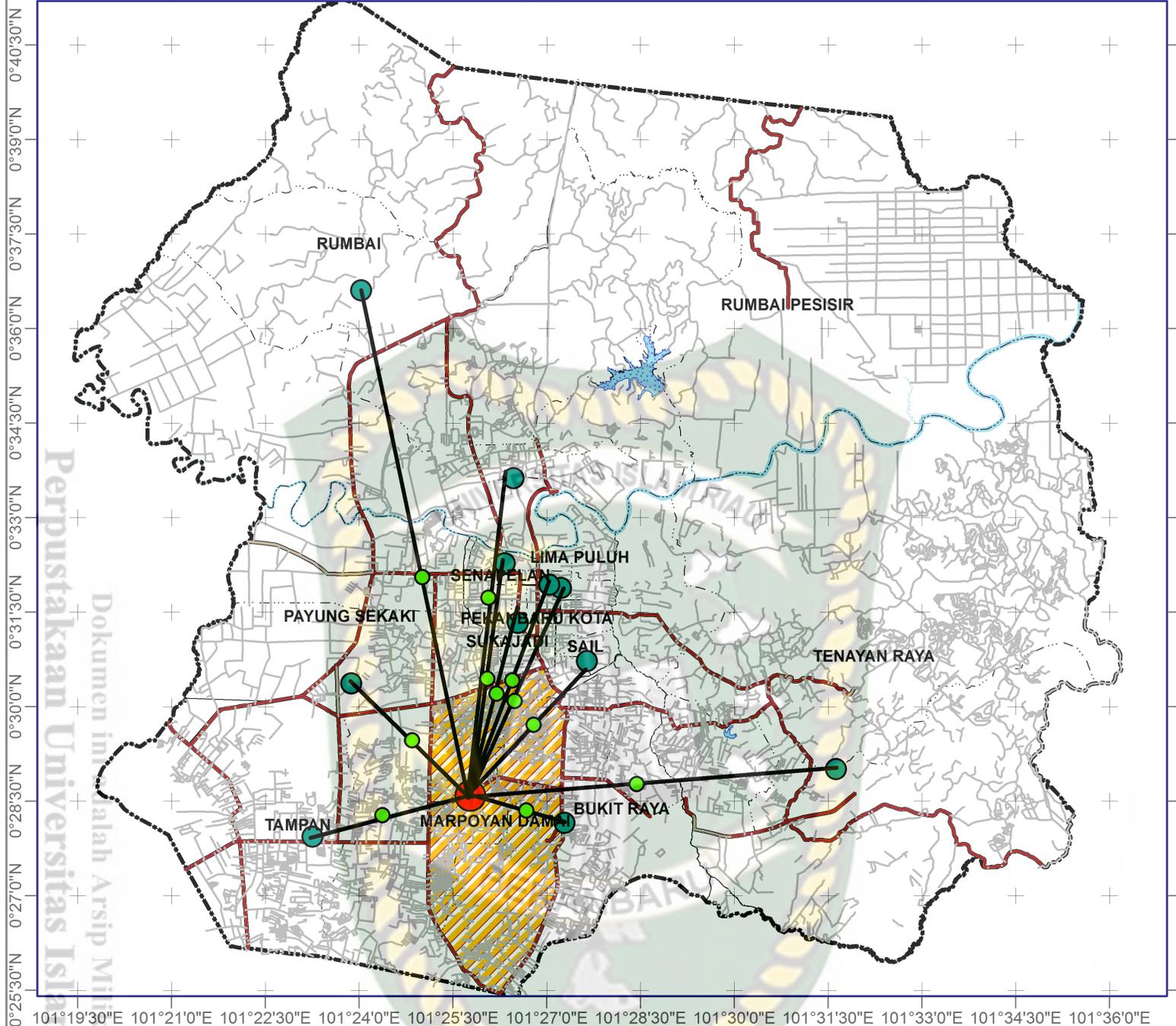
Peta 5.59 analisis titik henti



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

101°19'30"E 101°21'0"E 101°22'30"E 101°24'0"E 101°25'30"E 101°27'0"E 101°28'30"E 101°30'0"E 101°31'30"E 101°33'0"E 101°34'30"E 101°36'0"E



101°19'30"E 101°21'0"E 101°22'30"E 101°24'0"E 101°25'30"E 101°27'0"E 101°28'30"E 101°30'0"E 101°31'30"E 101°33'0"E 101°34'30"E 101°36'0"E

**No. Gambar**  
5.59

**PETA HASIL ANALISIS TITIK HENTI  
DI KOTA PEKANBARU**

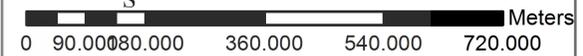
**Halaman**  
220



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**  
**FAKULTAS TEKNIK**



**SKALA**  
1:170.000



**INSET PETA**



**LEGENDA**

- Batas Kabupaten Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Sungai
- Air Danau
- ▨ Pusat Pertumbuhan
- Titik Henti

**Dosen Pembimbing**  
PUJI ASTUTI, ST.,MT

Nama : Hera Yolanda Apriani  
NPM : 153410209

Sumber :  
RTRW KOTA PEKANBARU

Perustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis analisis dan pembahasan tentang analisis penentuan pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru, maka kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *analisis scalogram* untuk menentukan pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan yaitu :
  - Hirarki I : Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya Kecamatan Tampan dan Kecamatan Bukit Raya.
  - Hirarki II : Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Payung Sekaki
  - Hirarki III : Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Pekanbaru Kota, dan Kecamatan Lima Puluh.
  - Hirarki IV : Kecamatan Sail.
  - Hirarki V : Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.
2. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *analisis indeks sentralitas marsall* untuk menentukan pusat – pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan fasilitas pelayanan dengan melakukan pembobotan terhadap jumlah fasilitas pelayanan yaitu :
  - Hiraraki I yaitu Kecamatan Marpoyan Damai dengan hasil pembobotan sebesar 428 – 389.

- Hirarki II yaitu Kecamatan Tenayan Raya dengan hasil pembobotan sebesar 388 – 350.
  - Hirarki III yaitu Kecamatan Tampan dengan hasil pembobotan sebesar 349 – 311.
  - Hirarki IV yaitu Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Lima Puluh, dan Kecamatan Pekanbaru Kota dengan hasil pembobotan sebesar 310 – 272.
  - Hirarki V yaitu Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Sail, Kecamatan Rumbai Pesisir dan Kecamatan Rumbai dengan hasil pembobotan sebesar 271 – 233.
3. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan analisis *analytical hierarchy process* (AHP) kecamatan yang layak menjadi pusat – pusat pertumbuhan di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Marpoyan Damai.
  4. Berdasarkan hasil analisis gravitasi dan hasil analisis titik henti (*break point*) untuk menentukan besaran interaksi (tingkat keterkaitan) tertinggi berada di Kecamatan Marpoyan Damai dengan Kecamatan Sukajadi dengan besaran interaksi 1559525250 dengan hasil analisis titik henti sebesar 1,25 km.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Agar pemerataan seluruh pembangunan merata di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru pemerintah lebih memberikan prioritas terhadap kecamatan dengan hirarki terendah dan kecamatan yang berada di pinggiran Kota Pekanbaru. Peningkatan prioritas fasilitas pelayanan, prasarana maupun penunjang lainnya, untuk menciptakan kecamatan yang berada di pinggiran Kota Pekanbaru dan kecamatan yang bukan sebagai pusat pertumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan pengembangan wilayah.
2. Pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan pembangunan untuk peningkatan ataupun perbaikan fasilitas dan memprioritaskan sektor unggulan pada tiap kecamatan untuk mengurangi terjadinya kesenjangan antar wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru.
3. Pemerintah lebih memperhatikan dan menampung seluruh aspirasi masyarakat guna menekan permasalahan yang akan terjadi terus menerus, terutama permasalahan yang terjadi pada kecamatan yang berada di pinggiran Kota Pekanbaru
4. Diharapkan pemerintah senantiasa aktif dalam berbagai kegiatan promosi daerah terhadap berbagai komoditas baik lokal maupun mancanegara dalam rangka memperkenalkan atau menawarkan potensi daerah seperti dari hasil pertanian sayuran, buah – buahan, perkebunan dan semua sektor menurut lapangan usaha di Kota Pekanbaru.

5. Perlu koordinasi pemerintah, seluruh perangkat yang ada di kecamatan dan peran serta masyarakat didalam pengembangan wilayah dengan harapan dapat menekan permasalahan yang menghambat pertumbuhan wilayah di kecamatan tersebut.
6. Perlu sekiranya pembangunan jalur penghubung untuk mengurangi permasalahan jarak tempuh menuju kecamatan disekitarnya.
7. Perlu sekiranya memperhatikan kondisi jalan di Kota Pekanbaru untuk mengurangi terjadinya permasalahan yang mengakibatkan terhambatnya interaksi antar kecamatan.
8. Perlu sekiranya mendapat perhatian khusus terhadap masyarakat dengan latar belakang kurang mampu, guna menekan permasalahan kemiskinan dan angka pengangguran terutama kecamatan yang berada di pinggiran Kota Pekanbaru.
9. Untuk jangka panjang, perlunya penelitian lebih lanjut pola hubungan sebab akibat yang lebih rinci sehingga penelitian ini dapat diimplementasikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo.2013. Teori - Teori Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta:  
Graha Ilmu
- Abdurrahman. 2005. Dasar – Dasar Public Relations. Bandung : Cita Aditya Bakti
- Astuti, Puji. 2004. *Studi Pola Pergerakan Mengonsumsi Fasilitas Sosial di Kawasan Pinggiran Kota Pekanbaru*. Thesis. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota. Bandung: Institut Teknologi Bandung
- Asteriani, Febby. 2011. *Preferensi Penghuni Perumahan Di Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Lokasi Perumahan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi, Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, 77-91. Pekanbaru : Universitas Islam Riau
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kota Pekanbaru Riau Dalam Angka 2019*, Pekanbaru
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Tampan Dalam Angka 2019*, Pekanbaru
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Payung Sekaki Dalam Angka 2019*, Pekanbaru
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Marpoyan Damai Dalam Angka 2019*, Pekanbaru
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Tenayan Raya Dalam Angka 2019*, Pekanbaru
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Bukit Raya Dalam Angka 2019*, Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Lima Puluh Dalam Angka 2019*, Pekanbaru.

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Sukajadi Riau Dalam Angka 2019*, Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Sail Dalam Angka 2019*, Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Pekanbaru Kota Dalam Angka 2019*, Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Senapelan Dalam Angka 2019*, Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Rumbai Dalam Angka 2019*, Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Rumbai Pesisir Dalam Angka 2019*, Pekanbaru.
- Baja, Sumbangan. 2012. *Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pengembangan Wilayah Pendekatan Spasial & Aplikasi*. Yogyakarta :Andi
- Danastri, Sasya. 2011. *Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Di Kecamatan Harjamukti, Cirebon Selatan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. 2018. *Materi Teknis RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2013 – 2033*. Pekanbaru.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2011. *Pedoman Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Ruang*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2013. *Pedoman Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Ruang*. Jakarta.
- Djunaedi, Ahmad. 2012. *Proses Perencanaan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

- Ermawati. 2010. *Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pada Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Effendi, Jurnar., &Asnawi.2014. *Alternatif Lokasi Terminal Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan*.Jurnal Wilayah dan Lingkungan Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2014, 113 – 128. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Farizal, Fian, Hidayanti, Agustina & Kuncoro, Teguh. 2011. *Penentuan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya Pusat Pertumbuhan (Studi Kasus :Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat)*. JurnalTata Kota dan Daerah Volume 3 Nomor 1, Juli 2011. Jurusan Teknik Planologi. Malang: Institut Teknologi Malang
- Farida, Isti. Emalia, Zulfa. 2017. *Identifikasi Pusat – Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung*.Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Volume 19, Nomor 1 April 2017. Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Gulo, Yarman. 2015. *Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Wilayah Pendukung Dalam Pengembagn Wilayah Kabupaten Nias*. Jurnal Widyariset, Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Kebersihan Volume 18, Nomor 1, April 2012. Gunungsitoli Selatan.
- Gustian, Wiyono, Sugeng., & Asteriani, Febby. 2016. *Preferensi Pengguna Ruko Dalam Melakukan Pemilihan Terhadap Lokasi Ruko Di Kota*

- Pekanbaru. Jurnal Saintis*, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Volume 16 Nomor 2, Oktober 2016, 32-39. Pekanbaru : Universitas Islam Riau
- Habib, Sulton. 2016. *Analisis Kecamatan Dalam Rangka Penentuan Kecamatan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Skripsi Fakultas Ekonomi Pembangunan. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Harahap, Erwin. 2009. *Kecamatan Perbaungan Sebagai Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Serdang Bedagai*. Thesis Pasca Sarjana. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Hartono. (2007). *Geografi, Jelajah Bumi dan Alam Semesta*. Bandung: Citra Raya.
- Imelda. 2013. *Identifikasi Pusat – Pusat Pertumbuhan dan Daerah Hinterland Kota Palembang*. *Jurnal Tata Kota dan Daerah. Teknik Planologi*. Volume 11, No.1 Hal : 54 – 66: Institut Teknologi Malang.
- Ishizaka, Alessio., Labib Ashraf. 2011. *Review Of The Main Development In The Analytic Hierarchy Process*. *Journal Expert Systems With Applications*. Portsmouth Business Scholl. 38(11), 14336-14345. United Kingdom: University Of Portsmouth.
- Kabul, Ali. 2016. *Pengembangan Wilayah: Teori & Aplikasi*. Jakarta: Kencana
- Kubis, A., Titze, M., & Ragnitz, J. (2007). *Spillover Effects Of Spatial Growth Poles*. IWH Discussion Papers Nr. 8/2007: Institut Fur Wirtschaftsforschung Halle.

- Kurniawan, Yogi., Asteriani, Febby., & Astuti, Puji. 2016. *Faktor Analisis Yang Harus Ditentukan Lokasi Toko Modern Di Kota Pekanbaru. Proceedings.* ISBN 978-602-17688-9-1. Pekanbaru : Universitas Islam Riau.
- Makesure, Chinyamakobu. 2018. *The Challenges And Prospects Of Murewa Growth Point, Zimbabwe.* Eouropan Jurnal Of Social Sciences Studies. Geography and Eviromental Science. Volume 3, Issues 1, 2018. : Great Zimbabwe University.
- Mustika 2017. *Penggunaan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Pemilihan Lokasi Mangrove Park.* Jurnal KLIK Volume 04. No.01. Semarang : Universitas Negeri Semarang
- Minesa, Punt. Siregar, Hermanto. & Manuwoto. 2014. *Aplikasi Analytical Hierarchy Process Dalam Penentuan Skala Prioritas Penyelenggaraan Jalan Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.*Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah Volume 6 Nomor 2, Oktober 2014. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional.* Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BFKG)
- Muta'ali, Lutfi. 2003. *Studi Penentuan Desa – Desa Pusat Pertumbuhan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.* Majalah Geografi Indonesia. Fakultas Geografi. Volume 17, Nomor 1, Maret 2003. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
- Morlok, Edward K. 2005. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi* Jakarta : Erlangga

- Nainggolan, Pandapotan. 2013. *Analisis Penentuan Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Simalungun*. Jurnal Ekonomi Dan Keruangan. Volume 1 Nomor 12. Medan : Universitas Sumatera Utara
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001. *Visi dan Misi Kota Pekanbaru*.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 tahun 2000. *Pengukuran Kriteria Kawasan Perkotaan*
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009. *Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah*
- Pengembangan Wilayah Botton-Up dan Top Down. Universitas Sumatera Utara. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31697/Chapter%20II.pdf;jsessionid=C64E938D20E3FEF605DE33C4D098318B?sequence=4>(Di akses pada tanggal 27 November 2019 jam 21.45)
- Pontoh, Nia. & Kustiawan, Iwan. 2008. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung: Institut Teknolgi Bandung.
- Pratama, Bruce. 2018. *Analisis Hierarki Wilayah Dan Interaksi Wilayah Untuk Penentuan Pusat Pelayanan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Skripsi. Fakultas Geografi. Jawa Tengah : Universitas Muhammadiyah Surakarta

- Priyadi, Unggul., & Atmadji, Eko. 2017. *Identifikasi Pertumbuhan Dan Wilayah Hinterland Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal AJIE. Program Studi Ilmu Ekonomi. Volume 02 Nomor 02, May 2017. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Rahayu, Eta. 2014. *Penentuan Pusat Pertumbuhan Dalam Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Gunung Kidul*. Skripsi Perencanaan Wilayah dan Kota. Surabaya: Institut Sepuluh November
- Santosa, Slamet. 2005. *Dinamika*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Setiono, D. N. S. (2011). *Ekonomi pengembangan wilayah, Teori dan aplikasi*. Fakultas Ekonomi. Jakarta : Universitas Indonesia
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang : Baduose Media
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surah Al – Furqan Ayat 48 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia. <https://Tafsirweb.Com/6304-Surah-Al-Furqan-Ayat-48.Html> (Diakses Pada Tanggal 27 November 2019 Jam 21.45)
- Surah Al – Furqan Ayat 49 Arab, Latin, Terjemahan Arti Bahasa Indonesia. <https://Tafsirweb.Com/6305-Surah-Al-Furqan-Ayat-49.Html> (Diakses Pada Tanggal 27 November 2019 Jam 21.45)
- SNI 03-1733-2004. 2004. *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.

- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tumada, La Ode. 2012. *Analisis Strategis Pembangunan Kabupaten Muna*. Thesis. Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik. Jakarta : Universitas Indonesia
- Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Perencanaan Wilayah Dan Kota*
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintah Daerah*
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 *Pelayanan Publik*
- Wahyudi. Ade. 2013. *Analisis Hirarki Kota Dan Alternatif Pengembangan Pusat – Pusat Pertumbuhan Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota. Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Widodo & Ratna. 2019. *Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang*. Yogyakarta : Budi Utama